



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI, BISNIS DAN PARIWISATA
JALAN SANGGALANGIT, TEMBAU, PENATIH, TELP. (0361) 464700, 462486

SURAT KEPUTUSAN
NO : 539/SKP/FEBP/UNHI/III/2023

Tentang :
Tim Penyusun Dokumen Dampak Pembangunan Bali
Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi Bali
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata
Universitas Hindu Indonesia

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata

Menimbang : Bahwa dalam menyusun Dokumen Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2023, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata UNHI, maka diperlukan adanya suatu tim penyusun.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP. No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Mendikbud No.75 / D / 0 / 1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No: 1364/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 tentang telah terakreditasinya Program Sudi Manajemen Fakultas Ekonomi UNHI.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No : 10021/SK/BAN-PT/Ak-PPj/VIII/ 2021 tentang telah terakreditasinya Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNHI.
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.10481/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 tentang telah terakreditasinya Program Studi Manajemen Pada Program Magister Universitas Hindu Indonesia.
7. SK. Dirjen Dikti No : 1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1).
8. SK. Dirjen Dikti No : 1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1).
9. SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 432/M/2020, tentang ijin Pembukaan Program Studi Magister Manajemen Pada Universitas Hindu Indonesia
10. Renstra UNHI
11. Renstra FE UNHI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2023, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia .
Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan atas surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 30 Maret 2023
Dekan
Dr. Puji Yudy Wijaya, SE., M.Si
07.82.1.051
Wakil Dekan

Tembusan Kepada Yth. :

1. Yang Bersangkutan



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI, BISNIS DAN PARIWISATA

JALAN SANGGALANGIT, TEMBAU, PENATIH, TELP. (0361) 464700, 462486

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata
Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Nomor : 539/SKP/FEBP/UNHI/III/2023
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi
Bali Tahun 2023, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata UNHI.

Pengarah : 1. Dr. Putu Yudy Wijaya, SE.,M.Si
2. Dr. I Wayan Sudiana, SE.M.Si.Ak.CA
3. Dr. Ida Ayu Putu Widani Sugianingrat,SE.,MM
4. I Wayan Suartina, SE.MM
5. Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, SE,M.Si.,Ak.,CA

Ketua : Dr. I Gede Putu Kawiana, SE.,MM

Anggota Ahli Ekonomi : 1. Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom.,M.Kom
2. Dr. Putu Yudy Wijaya, SE.,M.Si
3. Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP.,M.Si

Ahli Infrastruktur : I Nyoman Suta Widnyana, ST.,MT

Tenaga Pembantu Ahli : 1. Gde Indra Surya Diputra, SE.,M.Si
2. Ni Nyoman Adityarini Abiyoga V.S, SE.,M.Si
3. I Made Risma M. Arsha, SE.,M.Ec.Dev
4. Ni Wayan Wina Premayani, SE.,MM

Tenaga Pendukung : Ni Komang Sumadi, SE.,M.Si.,Ak

Ditetapkan : di Denpasar
Pada Tanggal : 30 Maret 2023



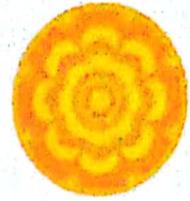
Dr. Putu Yudy Wijaya, SE.,M.Si
NIK. : 07.82.1.051



Tembusan Kepada Yth. :
1. Yang Bersangkutan
2. Arsip.



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
(KONTRAK SWAKELOLA)



ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BALI

DENGAN
FAKULTAS EKONOMI, BISNIS DAN PARIWISATA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Pekerjaan:

KAJIAN DAMPAK PEMBANGUNAN BALI ERA BARU TERHADAP
PEREKONOMIAN BALI

NOMOR : B.11.075/1770/BPSDA/BAPPEDA

NOMOR : 608.A/FEBP/UNHI/IV/2023

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Denpasar, pada hari Kamis, tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, antara :

- I. Nama : **I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos, M.Si.**
NIP : 19710814 200003 1 010
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali selaku Pengguna Anggaran Bappeda Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Kapten Cokorde Agung Tresna - Renon - Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Nama : **Dr. Putu Yudy Wijaya, SE., M.Si**
NIP. : 07.82.1.051
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia selaku Pelaksana Swakelola, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Hindu Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sanggalangit - Tembau - Penatih, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Udayana,
Nomor : 075/01/PKS/B Pem.Otda/U/2019 Tanggal 15 Januari 2019;
024/U/UNHI/2019
- Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dengan Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia
Nomor : B.11.075/1472/BPSDA/Bappeda Tanggal 27 Maret 2023,
060/HK-MoU/UNHI/III/2023.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 Nomor: DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 30 Maret 2023.

Serta mengingat bahwa :

- (a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sebagai **PIHAK PERTAMA** telah meminta Pelaksana Swakelola sebagai **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang terlampir dalam Kontrak Swakelola ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak Swakelola ini;
- (c) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak Swakelola ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak Swakelola ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak Swakelola ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak Swakelola ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak Swakelola ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kontrak Swakelola ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kontrak Swakelola ini dilakukan dengan tujuan sebagai dasar kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru terhadap Perekonomian Bali.

PASAL 2

DOKUMEN DOKUMEN YANG MENDUKUNG KONTRAK SWAKELOLA

- (1). Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- (2). Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada ayat (1) di atas;

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1). Melaksanakan Pekerjaan penyusunan dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru terhadap Perekonomian Bali.
- (2). Melakukan pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru terhadap Perekonomian Bali.
- (3). Menyusun Laporan :
 - a. Laporan Pendahuluan
 - b. Laporan Akhir
- (4). Melakukan Diskusi dan Presentasi/*Focus Group Discussion*
- (5). Menyerahkan hasil pekerjaan penyusunan dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru terhadap Perekonomian Bali.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru terhadap Perekonomian Bali sesuai dengan Pasal 3 di atas, maka **PIHAK PERTAMA** bersedia membayar biaya pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** yang dibebankan pada Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Nomor : DPPA/A.2/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 30 Maret 2023 pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian, kode rekening 5.1.02.02.09.0012. dengan nilai seluruh pekerjaan Rp. 148.247.000 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

- (1). Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
- (2). Untuk pelaksanaan pembayaran, **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan permohonan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai uraian biaya dalam RAB.

Paraf Pihak Pertama	<i>JK</i>
Paraf Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

- (3). Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Kontrak ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (4). Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan (transfer) kepada rekening PIHAK KEDUA yang ada di :
- Bank : BNI Cabang Denpasar
Nomor Rekening/VA : 1470300873
Atas Nama : Universitas Hindu Indonesia

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1). Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 diatas dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai saat ditanda tangannya Kontrak Swakeelola yaitu mulai tanggal 13 April 2023 s/d 13 Juli 2023
- (2). Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan 5 (lima) berkas *hardcopy* dan 1 (satu) *softcopy* dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru terhadap Perekonomian Bali dan dinyatakan diterima oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak Swakeelola yang meliputi khususnya:

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakeelola;
 - meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakeelola;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakeelola;
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - melibatkan sumber daya profesional dan teknis lintas program studi yang terkait (Prodi Manajemen, Prodi Teknik Sipil, dan Prodi Ilmu Ekonomi)
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan bertanggungjawab atas akurasi hasil pekerjaan;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
- 3) Apabila hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan tujuan seperti yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk melakukan penyusunan ulang sesuai dengan apa yang termuat dalam Kerangka Acuan Kerja, tanpa ada penambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**.
- 4) Apabila **PIHAK KEDUA** menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** ternyata dinilai tidak dapat (tidak mampu) lagi menyelenggarakan/menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan pekerjaan tersebut, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

PENUTUP

- (1). Perjanjian Kerjasama (Kontrak Swakelola) ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil kerjanya seperti tercantum pada pasal 6 ayat (2) perjanjian ini.
- (2). Perjanjian Kerjasama (Kontrak Swakelola) ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan dua diantaranya bermaterai masing-masing Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3). Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Bali/Pengguna Anggaran,

I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos, M.Si
NIP. 19710814 200003 1 010

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan
Pariwisata Universitas Hindu Indonesia
/Pelaksana Swakelola
Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru
terhadap Perekonomian Bali,

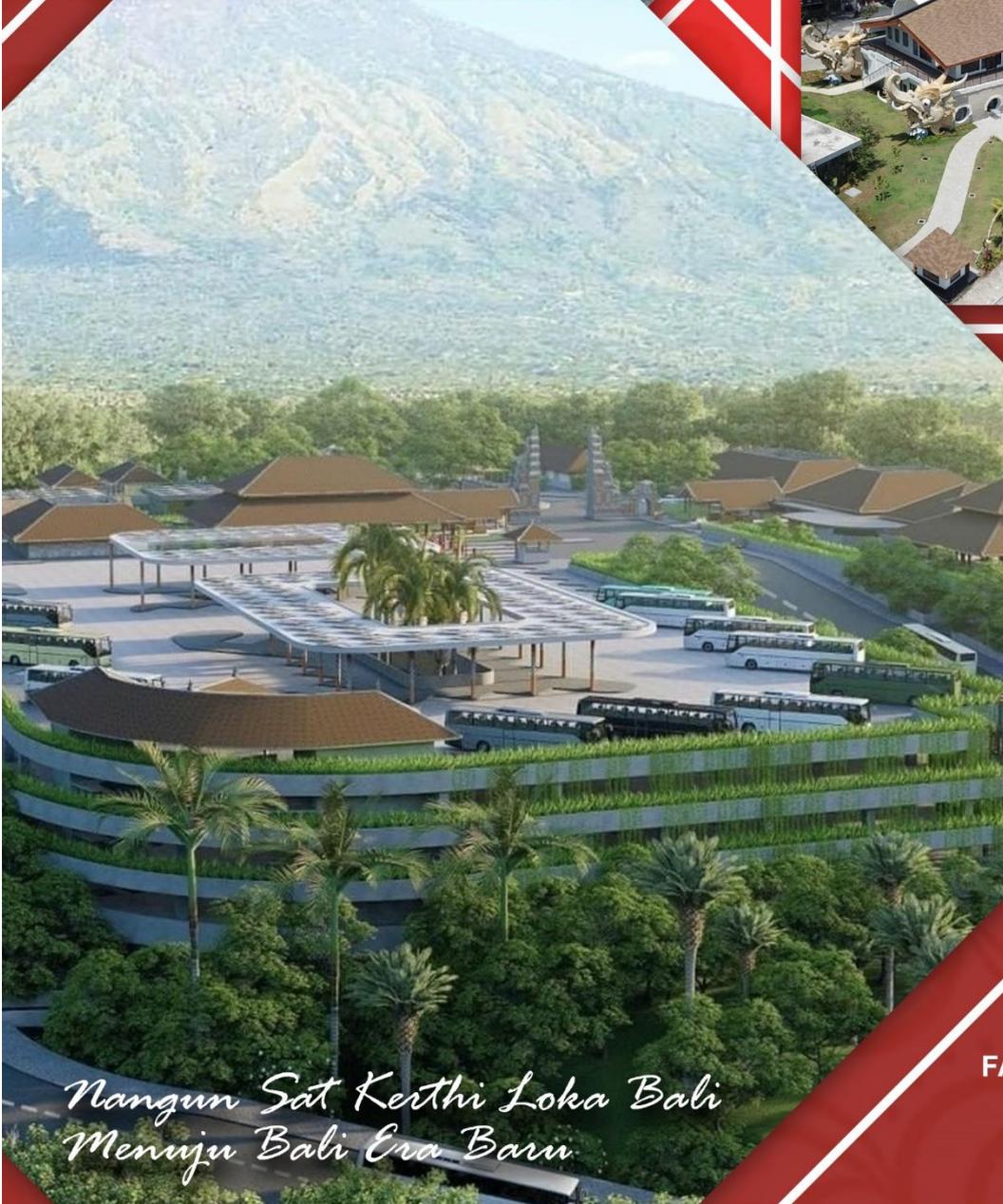


Dr. Putu Yudy Wijaya, SE., M.Si
NIK. 07.82.1.051



ລາຍງານສຸດທ້າຍ ການຄົ້ນຄວ້າ

LAPORAN AKHIR KAJIAN DAMPAK PEMBANGUNAN BALI ERA BARU TERHADAP PEREKONOMIAN BALI



*Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Menuju Bali Era Baru*

KERJASAMA ANTARA
BAPPEDA PROVINSI BALI
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN
PARIWISATA UNHI
2023



ꦒꦤꦸꦁꦱꦠꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦏꦺꦧꦭ

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

melalui pola pembangunan Semesta Berencana
menuju **BALI ERA BARU**

LAPORAN AKHIR

KAJIAN DAMPAK PEMBANGUNAN BALI ERA BARU TERHADAP PEREKONOMIAN BALI

Kontrak :

Nomor: B.11.075/1770/BPSDA/BAPPEDA
608.A/FEBP/UNHI/IV/2023

Antara:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI

dengan

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN PARIWISATA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**



LAPORAN AKHIR

KAJIAN DAMPAK PEMBANGUNAN BALI ERA BARU TERHADAP PEREKONOMIAN BALI

TIM PENELITI:

Dr. I Gede Putu Kawiana, SE., MM.

Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom., M.Kom.

Dr. Putu Yudy Wijaya, SE., M.Si.

Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si.

I Nyoman Suta Widnyana, ST., MT.

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN PARIWISATA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
2023**

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur tim penulis panjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia beliau Laporan Akhir Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Bali dapat diselesaikan. Pemerintah Provinsi Bali pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 mengusung Visi ***“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”*** Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Bali Era Baru merupakan suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Sehingga untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan Pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

Tim Peneliti menggunakan pendekatan *mixed method* dalam proses dan penyusunan laporan kajian ini, dengan harapan mampu memotret secara makro kondisi perekonomian Bali tanpa mengesampingkan aspek mikro. Data yang dianalisis dalam kajian ini meliputi data pada level kabupaten/kota, provinsi, hingga data nasional. Selain itu, dengan adanya komparasi antara masing-masing level akan memberikan kejelasan tentang *positioning* perekonomian Bali.

Kajian ini banyak membahas mengenai kondisi perekonomian Bali selama beberapa tahun terakhir, sebagai dampak potret Pembangunan Bali Era Baru di Tengah masa pandemi Covid-19. Selain itu juga disajikan hasil analisis mengenai *outcome* infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru. Dimana pada bagian akhir kajian juga disajikan strategi dan rekomendasi pembangunan dan perekonomian Bali kedepannya sebagai bentuk akselerasi *recovery post Covid-19* serta optimalisasi potensi sektor perekonomian Bali.

Dalam kesempatan ini, ijinkan kami selaku tim peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi pada penyelesaian kajian ini. Pertama kami ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Bappeda Provinsi Bali yang telah memberikan kepercayaan kepada tim untuk melakukan kajian ini. Demikian juga kepada seluruh pihak yang terlibat seperti narasumber, informan, serta tenaga pembantu ahli yang telah membantu dalam pengumpulan data lapangan yang diperlukan, sehingga informasi dan data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan dengan lebih cepat. Tim peneliti berharap hasil kajian ini dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bentuk evaluasi untuk menyusun berbagai program dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan menuju Bali Era Baru.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Denpasar, 11 Juli 2023

Tim Peneliti

SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI BALI

Om Swastiastu,

Puja pangastuti dan angayubagia Saya haturkan kehadiran Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertha waranugraha-Nya, laporan ini dapat disusun. Laporan Akhir “Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Bali” yang disusun oleh Tim Peneliti Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Provinsi Bali sangat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk evaluasi dan referensi dalam perencanaan maupun implementasi Pembangunan Bali untuk mewujudkan Visi “***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***” Melalui **Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.**

Bali Era Baru merupakan suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Sehingga untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan Pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek. Program Prioritas Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana mencakup 5 (lima) bidang, yaitu: (1) pangan, sandang, dan papan; (2) kesehatan dan pendidikan; (3) jaminan sosial dan ketenagakerjaan; (4) adat, agama, tradisi, seni dan budaya; serta (5) pariwisata. Kelima bidang tersebut didukung oleh Pembangunan infrastruktur sebagai program penunjang. Selain itu juga Pemerintah Provinsi Bali pada masa pemerintahan Bapak Gubernur Wayan Koster telah mampu menghasilkan 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru, yang didalamnya termasuk infrastruktur strategis dan monumental. Dimana kajian ini juga berfokus pada penilaian *outcome* infrastruktur tersebut. Selain itu, penggunaan berbagai data makroekonomi pada berbagai level juga mampu menyajikan informasi yang jelas tentang kondisi perekonomian Bali dari berbagai sisi dan komparasinya pada level nasional, maupun kabupaten/kota di Bali.

Akhirnya semoga laporan ini dapat memacu kita semua dalam mewujudkan Bali Era Baru serta akselerasi berbagai program Pembangunan Bali. Sehingga harapan untuk mewujudkan struktur dan fundamental perekonomian Bali lebih terarah, menyeluruh, terpadu, seimbang, berkualitas dan berkelanjutan dengan menjaga *genuine Bali*.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Denpasar, 12 Juli 2023
Kepala BAPPEDA Provinsi Bali,

I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si.
NIP. 197108142000031010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN TIM PENELITI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI BALI.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan	3
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan.....	4
1.4 Landasan Hukum.....	4
1.5 Keluaran Kajian	6
1.6 Sistematisasi Penulisan	6
BAB II. KAJIAN LITERATUR.....	8
2.1 Pembangunan Daerah	8
2.2 Evaluasi Dampak Pembangunan.....	11
2.3 Paradigma Pembangunan Bali	15
2.4 Transformasi Ekonomi Bali.....	18
BAB III. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN	21
3.1 Desain Pelaksanaan Kegiatan	21
3.2 Data dan Metode Pengumpulan Data	22
3.3 Metode Analisis	24
3.4 Personil.....	29
3.5 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	30
3.6 Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).....	32
3.7 Pelaporan.....	32
BAB IV. KONDISI UMUM PROVINSI BALI DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BALI ERA BARU.....	33
4.1 Gambaran Umum Kondisi Wilayah	33
4.2 Implementasi Pembangunan Bali Era Baru.....	44
4.3 Arahan Kebijakan Pembangunan Daerah Terhadap Pencapaian Pembangunan Bali Era Baru	48
BAB V. DAYA SAING DAERAH	62
5.1 Tinjauan Daya Saing Daerah (DSD) Provinsi.....	62
5.2 Tinjauan Pilar Daya Saing Daerah (DSD)	63

BAB VI. PEMETAAN POTENSI EKONOMI BALI	75
6.1 Hasil Analisis Location Quotient (LQ)	75
6.2 Peta Potensi Ekonomi dengan Tipologi Klassen	76
6.3 Pemetaan Sektor Berdasarkan <i>Forward Linkage</i> dan <i>Backward Linkage</i>	80
BAB VII. NILAI TAMBAH PEMBANGUNAN EKONOMI BALI	82
7.1 Struktur Output Perekonomian Provinsi Bali.....	82
7.2 Struktur Nilai Tambah Bruto (NTB) Provinsi Bali	84
7.3 Perbandingan Peringkat Output dan Nilai Tambah Bruto (NTB) Provinsi Bali.....	87
BAB VIII DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DAN MONUMENTAL PENANDA BALI ERA BARU.....	89
8.1 Identifikasi Infratraktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru.....	89
8.2 Dampak Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Bali.....	106
8.3 Analisis <i>Outcome</i> Infratraktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru.....	108
BAB IX. STRATEGI PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI.....	119
9.1 Peramalan Indikator Makro Ekonomi Bali.....	119
9.2 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal.....	125
9.3 Strategi Pembangunan Perekonomian Dalam Rangka Akselerasi Mewujudkan Bali Era Baru.....	132
BAB X. SIMPULAN DAN SARAN	138
10.1 Simpulan	138
10.2 Saran.....	141
REFERENSI	144
LAMPIRAN	146

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1	Tabel Input-Output Untuk Sistem Perekonomian Dengan Tiga Sektor Produksi25
3.2	Klasifikasi Tipologi Klassen27
3.3	Personil Tenaga Ahli/Profesional31
3.4	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan31
4.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali33
4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023*35
4.3	Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik Provinsi Bali, Tahun 2017 dan 2021.....39
4.4	Tema Fokus Pembangunan dan Perumusan Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2019-202349
4.5	Indikator Capaian Pembangunan dan Sosial Ekonomi Provinsi Bali.....53
5.1	Skor Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 202262
6.1	Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Bali dan Nasional Tahun 2013-202276
6.2	Rata-rata Laju Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Bali dan Nasional Terhadap PDRB/PDB Tahun 2013-202277
7.1	Struktur Output Perekonomian Provinsi Bali Berdasarkan Tabel I-O.....82
7.2	Nilai Tambah Bruto Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO84
8.1	Klasifikasi Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru89
8.2	Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bali pada 10 Sektor Utama (Berdasarkan Klasifikasi 52 Sektor Industri)..... 107
8.3	Dampak Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru Terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) 108
9.1	Aktual dan Peramalan PDRB Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032 119
9.2	Aktual dan Peramalan Persentase Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032 121
9.3	Aktual dan Peramalan TPT Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032 122
9.4	Aktual dan Peramalan TPAK Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2023..... 123
9.5	Aktual dan Peramalan Inflasi Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2023..... 124
9.6	Analisis Faktor Strategis Internal..... 132
9.7	Analisis Faktor Strategis Eksternal..... 133
9.8	Hasil Analisis Faktor Strategis Internal dan Eksternal 134
9.9	Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan Analisis SWOT 136

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Tipe Umum Desain <i>Mixed Methods</i>	21
3.2 Tahapan Pelaksanaan <i>Impact Assessment</i> Pembangunan	22
3.3 Diagram Analisis SWOT.....	28
4.1 Peta Wilayah Administratif Provinsi Bali.....	33
4.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023	34
4.3 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2022	36
4.4 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali (yoy) Tahun 2013 – 2022.....	36
4.5 PDRB Perkapita Provinsi Bali Tahun 2013 – 2022	37
4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali Tahun 2013 – 2022	41
4.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Bali Tahun 2013 – 2022	42
4.8 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 Penduduk Provinsi Bali, Tahun 2012 – 2021	43
4.9 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali, Tahun 2012 – 2021	43
4.10 Garis Kemiskinan Provinsi Bali, Tahun 2012 – 2021	44
4.11 Skema Substansi Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah Dalam SEB Mendagri dan Menteri PPB/Kepala Bappenas	52
4.12 Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali	55
4.13 Target dan Capaian Indikator Persentase Kemiskinan Bali	56
4.14 Target dan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Bali	55
4.15 Target dan Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali ..	57
4.16 Target dan Capaian Indikator Gini Ratio Bali	58
4.17 Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Bali	59
4.18 Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Bali	60
4.19 Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor KUMKM Terhadap PDRB Bali	60
5.1 Grafik Skor Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota di Bali Tahun 2022.....	63
5.2 Grafik Skor IDSD Pilar 1 (Institusi) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022	64
5.3 Grafik Skor IDSD Pilar 2 (Infrastruktur) Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota di Bali Tahun 2022.....	64

5.4	Grafik Skor IDSD Pilar 3 (Adopsi TIK) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022	65
5.5	Grafik Skor IDSD Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022	66
5.6	Grafik Skor IDSD Pilar 5 (Kesehatan) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022	67
5.7	Grafik Skor IDSD Pilar 6 (Keterampilan) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022.....	68
5.8	Grafik Skor IDSD Pilar 7 (Pasar Produk) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022.....	69
5.9	Grafik Skor IDSD Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022	70
5.10	Grafik Skor IDSD Pilar 9 (Sistem Keuangan) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022	71
5.11	Grafik Skor IDSD Pilar 9 (Sistem Keuangan) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022	72
5.12	Grafik Skor IDSD Pilar 11 (Dinamisme Bisnis) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022	73
5.13	Grafik Skor IDSD Pilar 12 (Kapasitas Inovasi) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022	74
6.1	Peta Hasil Analisis LQ Provinsi Bali.....	75
6.2	Diagram <i>Scatter</i> Analisis Tipologi Klassen Provinsi Bali	78
6.3	Klasifikasi Sektor PDRB Provinsi Bali Tahun 2018-2022 Hasil Analisis Tipologi Klassen	79
6.4	Identifikasi Industri Unggulan Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO	81
7.1	Peringkat Output Perekonomian Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO	83
7.2	Peringkat Output 5 (Lima) Sektor Industri Utama Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO.....	84
7.3	Peringkat Nilai Tambah Bruto Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO	85
7.4	Peringkat Nilai Tambah Bruto 5 (Lima) Sektor Industri Utama Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO.....	86
7.5	Distribusi Nilai Tambah Bruto di Bali Berdasarkan Tabel IO	86
7.6	Komparasi Peringkat Peranan Output dan Nilai Tambah Bruto Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO.....	88
8.1	Potret Infrastruktur Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih	91
8.2	Potret Rancangan Infrastruktur Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.....	93
8.3	Potret Infrastruktur Pembangunan Ruas Jalan Shortcut Singaraja-Mengwitani.....	94

8.4	Potret Infrastruktur Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung	95
8.5	Potret Infrastruktur Pembangunan Pelabuhan Benoa Menjadi <i>Bali Maritime Tourism Hub</i> , Denpasar	97
8.6	Potret Infrastruktur Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan Empat Lapangan Pendukung.....	98
8.7	Potret Infrastruktur Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C	99
8.8	Potret Infrastruktur Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.....	100
8.9	Potret Infrastruktur Pembangunan Bendungan Sidan di Wilayah Badung, Gianyar, dan Bangli.....	101
8.10	Potret Infrastruktur Pembangunan Bendungan Tamblang di Buleleng...	102
8.11	Potret Infrastruktur Turyapada Tower 6.0 KBS Kerthi Bali.....	103
8.12	Potret Jalur Jalan Tol Jagat Kerthi (Gilimanuk-Mengwi).....	105
8.13	Persentase Outcome Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih.....	109
8.14	Persentase Outcome Infrastruktur Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.....	110
8.15	Persentase Outcome Infrastruktur Pembangunan Ruas Jalan Shortcut Singaraja-Mengwitani.....	111
8.16	Persentase Outcome Infrastruktur Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung	112
8.17	Persentase Outcome Infrastruktur Pembangunan Pelabuhan Benoa Menjadi <i>Bali Maritime Tourism Hub</i> , Denpasar	113
8.18	Persentase Outcome Infrastruktur Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan Empat Lapangan Pendukung.....	114
8.19	Persentase Outcome Infrastruktur Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C	114
8.20	Persentase Outcome Infrastruktur Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali	115
8.21	Persentase Outcome Infrastruktur Pembangunan Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang.....	116
8.22	Persentase Outcome Insfrastruktur Pembangunan Turyapada Tower 6.0 KBS	117
8.23	Persentase Outcome Infrastruktur Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi	118
9.1	Grafik Aktual dan Peramalan PDRB Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032.....	120
9.2	Grafik Aktual dan Peramalan Persentase Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032.....	121

9.3	Grafik Aktual dan Peramalan TPT Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2023 ...	122
9.4	Grafik Aktual dan Peramalan TPAK Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032.....	124
9.5	Grafik Aktual dan Peramalan Inflasi Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032.....	125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan.....	147
2. Penilaian Variabel dan Indikator Capaian Outcome Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru	148
3. Konkordasi 17 Lapangan Usaha Dengan 52 Sektor Industri pada Tabel Input-Output.....	162
4. Perhitungan LQ.....	164
5. Ringkasan Eksekutif.....	170

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Pembangunan ini disusun secara komprehensif dan berkesinambungan dengan memperhatikan daya dukung alam Bali yang berpedoman kepada program pembangunan semesta berencana yang tertuang dalam program sebagai implementasi dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dengan program ini maka diharapkan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian alam sekitar sebagai penopang kehidupan manusia di berbagai sektor kehidupan.

Pembangunan merupakan salah satu fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu pengambil kebijakan. Berdasarkan konsep pembangunan, terkandung makna-makna alokasi sumber-sumber daya, regulasi dan pemberdayaan masyarakat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Pembangunan sebagai metode alokasi sumber-sumber daya (*resources*) yang dimiliki publik, seperti sumber daya alam, sumber daya energy, sumber daya dana dan sumber daya manusia sesuai dengan yang tertuang dalam program sebagai implementasi dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan memelihara keseimbangan Alam, Krama (Manusia), dan Kebudayaan Bali.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, **pembangunan kebudayaan Bali** harus ditempatkan sebagai **hulu** pembangunan Bali dalam berbagai sektor/bidang secara konprehensif atau mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali; serta **pembangunan pertanian dan kebudayaan Bali** harus diposisikan sebagai **fundamental atau pilar utama** dalam membangun perekonomian Bali.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan, arah regulasi daerah dan kebijakan pembangunan sumber daya Bali terutama sektor pertanian dan

kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk kebutuhan dasar air dan listrik bagi Krama Bali.

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan **harus ditata kembali** yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada **Genuine Bali** yaitu dengan menerapkan konsep **Pola Pembangunan Semesta Berencana** guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan **Gumi** /wilayah Bali yang sesuai dengan **Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa** yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep **Tri Semaya: Atita** (masa lalu), **Nagata** (masa kini), dan **Wartamana** (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang. Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa **Romantika**; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa **Dinamika**; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (**sintesis**) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari **tesis dan antitesis** terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa **Dialektika**.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju **Era Baru**, yaitu suatu **Era** yang ditandai **dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi**, yakni **tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama: Dimensi pertama**, bisa

menjaga/memelihara keseimbangan **Alam, Krama (manusia), dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)**; **Dimensi kedua**, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi **Krama Bali** dalam berbagai aspek kehidupan; dan **Dimensi ketiga**, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Dimensi ketiga merupakan suatu manajemen resiko (*risk management*) dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan dan tantangan baru di masa yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun Dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi Bali sebagai dokumen yang meliputi hasil serta prediksi dampak program pembangunan yang telah dilaksanakan diantaranya pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis dan program pembangunan lainnya serta factor-faktor sebagai dasar rumusan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Provinsi Bali, nilai tambah ekonomi Bali atau daya saing daerah, peningkatan kapasitas fiskal provinsi, kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, penambahan lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan serta terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja Provinsi Bali. Selanjutnya dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan untuk dijabarkan secara lebih lanjut dalam berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Bali.

Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sinkronisasi dan menyelaraskan perencanaan terkait hasil kinerja pembangunan terhadap pencapaian tujuan dan target pembangunan Bali Era Baru yang diamankan dalam RPJMD Semesta Berencana dan dokumen perencanaan yang ada di Bappeda Provinsi Bali.

- 2) Melakukan analisis/menghitung hasil dan prediksi dampak pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis serta program pembangunan lainnya serta faktor sebagai dasar rumusan terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota Provinsi Bali, daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, penambahan lapangan kerja, dan pengurangan angka kemiskinan serta produktivitas tenaga kerjanya.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi Bali meliputi:

- 1) Identifikasi dan analisis arahan kebijakan pembangunan daerah terhadap pencapaian target pembangunan Bali Era Baru.
- 2) Identifikasi dan analisis pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah provinsi, kabupaten/kota.
- 3) Identifikasi dan analisis nilai tambah program pembangunan ekonomi daerah pada sektor-sektor strategis.
- 4) Analisis pemetaan potensi ekonomi Provinsi Bali terhadap serta tantangan perekonomian daerah.
- 5) Identifikasi dan analisis strategi pembangunan perekonomian Provinsi Bali.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi Bali merujuk pada berbagai regulasi terkait. Undang-undang, peraturan yang berasal dari presiden, kementerian terkait, ataupun Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang merupakan landasan kelembagaan yang wajib digunakan dalam proses analisis. Ini merupakan bagian dalam kaidah yang wajib untuk digunakan dalam proses perumusan rekomendasi dan pengambilan kebijakan. Berikut kelembagaan regulasi terkait kebijakan pembangunan manusia.

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3).

1.5 Keluaran Kajian

Keluaran kegiatan adalah Dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi Bali.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi Bali ini disusun berdasarkan kebutuhan dari Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kaidah akademik. Berikut merupakan sistematika penulisan kajian.

Bab I Pendahuluan

Pada bab I disajikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, landasan hukum serta Keluaran Kajian.

Bab II Kajian Literatur

Pada bab II diuraikan mengenai ekonomi regional, perencanaan dan pembangunan ekonomi, serta dampak pengembangan infrastruktur, yang digunakan untuk dasar analisis kajian ini.

Bab III Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Pada bab III diuraikan mengenai data dan metode pengumpulan data, metode analisis, uraian penugasan personil, jadwal pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

Bab IV Kondisi Umum Provinsi Bali dan Paradigma Pembangunan Bali Era Baru

Pada bab IV diuraikan mengenai gambaran umum Provinsi Bali, baik dari segi geografi, demografi, dan ekonomi, serta implementasi Pembangunan Bali Era Baru.

Bab V Daya Saing Daerah

Pada bab V diuraikan mengenai daya saing Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali berdasarkan 12 pilar Daya Saing Daerah.

Bab VI Pemetaan Potensi Ekonomi Bali

Pada bab VI diuraikan mengenai sektor basis di Provinsi Bali dengan analisis Locatio Quotient (LQ), pemetaan potensi ekonomi Bali dengan Tipologi Klassen, serta analisis *forward* dan *backward linkage*.

Bab VII Nilai Tambah Pembangunan Ekonomi Bali

Pada bab VII diuraikan mengenai output dan Nilai Tambah Bruto (NTB) Pembangunan Ekonomi Bali dengan menggunakan pendekatan Tabel Input-Output.

Bab VIII Dampak Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru

Pada bab VIII diuraikan mengenai dampak pembangunan infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru terhadap pertumbuhan ekonomi Bali serta identifikasi dan analisis berdasarkan *outcome*-nya.

Bab IX Strategi Pembangunan Perekonomian Provinsi Bali

Pada bab IX diuraikan mengenai peramalan perekonomian Bali, serta analisis SWOT yang mendasari penyusunan strategi.

Bab X Simpulan dan Saran

Pada bab X diuraikan mengenai simpulan dari hasil kajian sesuai dengan tujuan, serta disertai saran sebagai rekomendasi bagi pengambil kebijakan.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi yang didorong oleh peningkatan pendapatan. Proses natural harus diciptakan melalui intervensi pemerintah melalui serangkaian kebijaksanaan pembangunan yang akan mendorong terciptanya kondisi yang memungkinkan rakyat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Sehingga proses pembangunan yang memihak rakyat merupakan upaya sinergi dalam langkah pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 1999).

Pembangunan daerah menempati posisi penting dalam pelaksanaan pembangunan yang sistemik. Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintah. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral, seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Karenanya, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang terpadu dan saling mengisi. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung-jawab (Sumodiningrat, 1999). Pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua aspek, yaitu: (1) bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan (2) untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui

kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif (Soegijoko dan Kusbiantoro, 1997).

Pembangunan daerah dalam beberapa teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu pembangunan daerah adalah mewujudkan pertumbuhan wilayah. Pandangan teori *resource endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumberdaya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumberdaya itu. Sementara pandangan lain, teori *export base* menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor. Teori lain tentang pertumbuhan wilayah yang dikembangkan dengan asumsi-asumsi ilmu ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam teori ini ditekankan pentingnya perpindahan faktor-faktor ekonomi-khususnya modal dan tenaga kerja-antar wilayah. Perpindahan faktor modal dan tenaga kerja antar wilayah dalam suatu negara lebih mudah terjadi dan dapat menghilangkan perbedaan faktor harga diantara wilayah-wilayah itu yang bermuara pada penyeragaman pendapatan per kapita wilayah (Soegijoko dan Kusbiantoro, 1997).

Sementara itu teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan seperti diungkap dalam teori neo-klasik. Tesis utama teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antar wilayah dalam suatu negara, bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. Perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial ternyata tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan. Oleh karena itu

intervensi negara diperlukan sebatas mengarahkan kembali kekuatan-kekuatan itu dalam pasar agar perbedaan yang muncul tidak membesar, sehingga pertumbuhan wilayah tetap dapat diwujudkan. Pertumbuhan keluaran (*output*) wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapat keuntungan produktivitas yang lebih besari dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibanding wilayah yang bergantung pada sektor primer. Dengan demikian, suatu kawasan yang mempunyai keunggulan di sektor pertanian perlu menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama dalam menggerakkan sektor industri agar pertumbuhan wilayah dapat dipercepat dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Untuk itu maka diperlukan upaya khusus untuk pengembangan sumberdaya manusia lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah. Teori ini dikembangkan sebagai jawaban atas akselerasi pertumbuhan wilayah yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan sosial riil masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa investasi pada sumberdaya manusia akan menyebabkan peningkatan skala pengembalian. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang (Soegijoko dan Kusbiantoro, 1997).

Suatu kelompok manusia dalam suatu lingkungan tertentu (*community*) atau masyarakat dalam suatu wilayah, tempat atau daerah, dihubungkan dengan unit daerah (tempat atau wilayah) lain oleh faktor maupun keadaan-keadaan ekonomi, fisik, dan sosialnya. Dengan demikian, pembangunan dalam suatu tempat tertentu membutuhkan koordinasi proyek pembangunan lokalnya dengan rencana regional dan nasional. Dari segi pembangunan, *region* sebetulnya adalah penghubung (*link*) antara masyarakat lokal dan nasional. Suatu peng-regional-an memungkinkan identifikasi tujuan nasional ke dalam pelaksanaan lokal yang lebih jelas dan tajam. Dengan kata lain, *regional planning* memberikan rangka dasar untuk mempertemukan proyek pembangunan, baik nasional maupun lokal secara berimbang (*balanced*) dan dapat menempati kedudukan yang sebenarnya dalam

suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh (Soegijoko dan Kusbiantoro, 1997).

2.2. Evaluasi Dampak Pembangunan

Dinamika perkembangan wilayah yang semakin pesat, menuntut pemerintah lokal serta masyarakat agar mampu menyeimbangkan antar ketiga aspek, yaitu; lingkungan, ekonomi dan sosial, agar mampu mencapai pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Dalam mengakomodasi dinamika pertumbuhan wilayah, diperlukan berbagai macam kebijakan dan proyek pembangunan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang ada. Namun, mengingat adanya keterbatasan dari segi biaya, waktu dan tenaga tidak semua proyek pembangunan ini dapat dilaksanakan secara bersamaan, diperlukan sebuah prioritas-prioritas proyek pembangunan untuk dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan yang ada.

Analisa dampak pembangunan pada intinya memiliki maksud untuk mengevaluasi pembangunan yang diusulkan dari berbagai aspek dan kepentingan, baik dari segi dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak lingkungan serta dampak lainnya yang terkait. Dengan adanya analisa dampak pembangunan, diharapkan adanya sebuah penilaian objektif yang dapat membantu untuk menghindari terciptanya ketimpangan pada aspek tertentu serta mendorong dampak positif dari pembangunan. Secara umum, kegiatan analisa dampak pembangunan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan.
3. Mengidentifikasi proses dan metode untuk mengantisipasi dampak merugikan dari sebuah usulan program pembangunan.
4. Sarana kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, analisa dampak pembangunan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan program (*ex-ante*), sesudah pelaksanaan program (*ex-post*) maupun pada saat berjalannya pelaksanaan program. Penilaian *ex-ante* memprediksi potensi dampak dari sebuah usulan program pembangunan, sebagai

dasar dalam perumusan mitigasi atau langkah penanganan dampak tersebut. Untuk beberapa usulan kebijakan tertentu, digunakan beberapa bentuk analisa dampak ex-ante sebagai syarat dalam proses persetujuan usulan program kebijakan, seperti; analisa dampak lingkungan dan analisa pembiayaan (cost-benefit analysis). Sedangkan penilaian ex-post mengidentifikasi dampak aktual yang terjadi selama dan setelah pelaksanaan program. Karena dilaksanakan setelah program berjalan, penilaian ini digunakan sebagai bahan untuk merumuskan langkah perbaikan (jika diperlukan) dan juga dapat berfungsi untuk memberi masukan untuk perbaikan program kedepannya. Penilaian dampak ex-post dapat dilakukan pada berbagai jenis program kebijakan untuk memberikan informasi yang lebih menyeluruh dari dari informasi yang didapatkan melalui monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin.

Idelanya, pengkajian dampak pembangunan harus dikupas oleh perencana ataupun perwakilan dari masyarakat yang berkaitan dengan usulan program tersebut sehingga didapat hasil penilaian secara lebih komprehensif. Peran dari masyarakat disini adalah untuk memberikan masukan-masukan dari sudut pandangnya sendiri terhadap pengambilan keputusan. Dengan adanya masukan dari perspektif masyarakat, diharapkan usulan program pembangunan yang ada memiliki keberlanjutan yang baik. Dalam melakukan analisa dampak pembangunan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

- 1) Mengevaluasi dampak positif dan negatif dari usulan pembangunan untuk masing-masing dampak.
- 2) Fokus pada dampak yang signifikan, bukan pada jumlah dampak pembangunan.
- 3) Mempertimbangkan dampak langsung, sama atau setara dengan dampak keseluruhan dari pembangunan untuk menunjukkan konsekuensi-konsekuensi yang paling signifikan.
- 4) Memberikan prioritas tinggi pada nilai-nilai masyarakat dan tujuan jangka panjang dari masyarakat ketika menilai dampak.
- 5) Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dampak, terutama selama proses penilaian dampak sosial ekonomi.

Impact assessment dapat diklasifikasikan atas dampak fiskal, dampak lingkungan, serta dampak sosial ekonomi.

Dampak Fiskal

Analisa dampak fiskal adalah analisa untuk memperkirakan dampak dari perubahan tata guna lahan terhadap biaya dan pendapatan pemerintah yang melayani pembangunan. Analisis ini dirancang untuk menguji efek dari sebuah kegiatan pembangunan. Analisis dampak fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk memperkirakan perbedaan antara biaya penyediaan layanan untuk pengembangan baru, pajak dan biaya yang akan dihasilkan oleh pembangunan. Karena analisis dampak fiskal didasarkan pada pendapatan pemerintah daerah, maka pelaku utama dalam penilaian fiskal ini adalah masyarakat, petugas keuangan dan penilai pajak.

Dalam prakteknya, analisis dampak fiskal juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari analisis ini adalah belum adanya penjelasan lebih lanjut mengenai interaksi antara penggunaan lahan saat pembangunan terjadi. Semisal, pembangunan underpass di sebuah kota tentunya akan menunjukkan dampak fiskal positif apabila proyek tersebut telah selesai. Namun selama kegiatan konstruksi underpass berlangsung, terjadi kemacetan parah pada beberapa ruas jalan di sekitar proyek yang mana kemacetan ini tentunya akan meningkatkan biaya perbaikan dan pemeliharaan jalan kota. Selain itu, ketika underpass telah selesai dibangun, proyek ini dapat turut mempengaruhi nilai/harga properti yang ada pada lingkungan di sekitar pembangunan. Penilaian efek samping dari pembangunan yang seperti ini terkadang belum terakomodasi dalam analisa dampak fiskal.

Dampak Lingkungan

Di Indonesia, analisa dampak lingkungan biasa dikenal dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pengertian AMDAL menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, berbunyi bahwa AMDAL adalah kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL merupakan suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan dampak lingkungan atas suatu

rencana kegiatan proyek dengan tujuan memastikan ada tidaknya masalah dampak lingkungan yang dianalisis pada tahap perencanaan dan perancangan proyek sebagai pertimbangan bagi pembuat keputusan. AMDAL terdiri dari analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial ekonomi, biologi dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh.

Studi AMDAL diperlukan untuk menilai kelayakan suatu proyek pembangunan dari sisi lingkungan. Apabila studi AMDAL suatu proyek disetujui, maka proyek tersebut dapat dilanjutkan. Namun apabila studi AMDALnya tidak disetujui, maka proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan karena dikhawatirkan setelah pembangunan selesai, akan terjadi kerusakan lingkungan yang tidak diinginkan. Studi AMDAL harus direvisi terlebih dahulu hingga disetujui baru proyek yang bersangkutan dapat dilaksanakan pembangunannya. Komponen-komponen AMDAL adalah PIL (Penyajian Informasi Lingkungan), KA (Kerangka Acuan), ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan).

Dampak Sosial Ekonomi

Analisis dampak sosial-ekonomi mengkaji bagaimana suatu pembangunan yang diusulkan akan mengubah kehidupan warga/masyarakat saat ini dan di masa depan. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur potensi dampak sosial-ekonomi dari sebuah kebijakan atau pembangunan diantaranya:

- 1) Perubahan demografi masyarakat.
- 2) Analisa perubahan pada pola perdagangan, pelayanan dan kebutuhan perumahan.
- 3) Permintaan untuk layanan publik.
- 4) Perubahan dalam pekerjaan dan tingkat pendapatan.
- 5) Perubahan kualitas estetika lingkungan masyarakat.

Pengukuran kuantitatif dan kualitatif merupakan komponen penting dari penilaian dampak sosial-ekonomi. Persepsi masyarakat tentang bagaimana rencana program pembangunan nantinya akan mempengaruhi kehidupan mereka adalah bagian penting dari penilaian dan harus menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Analisa dampak sosial-ekonomi dipandang amat perlu untuk dilakukan dikarenakan beberapa alasan. Secara umum, analisis ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat lokal mengenai besarnya dampak pembangunan yang diusulkan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Penilaian tersebut dapat membantu masyarakat untuk menghindari terciptanya ketidakadilan pada kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, pengkajian dampak sosial-ekonomi juga memberikan kesempatan bagi nilai-nilai masyarakat yang beragam untuk diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan. Hasil dari penilaian dampak dapat menjadi landasan dalam perubahan usulan pembangunan apabila diperlukan.

Untuk menilai dampak sosial-ekonomi akibat sebuah usulan proyek, dapat digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur sesuatu yang sifatnya tangible, seperti misalnya; usulan sebuah proyek pembangunan akan menciptakan lapangan kerja baru sebanyak sekian persen, meningkatkan pendapatan masyarakat sebanyak sekian persen ataupun meningkatkan kebutuhan akan lahan permukiman sebesar sekian persen.

Sedangkan untuk pendekatan kualitatif, digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan apa sajakah yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya usulan proyek maupun persepsi masyarakat terhadap suatu usulan kegiatan pembangunan. Dikarenakan analisa dampak sosialekonomi ini dirancang untuk memperkirakan efek dari pembangunan yang diusulkan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu masyarakat, realibilitas hasil analisa bergantung pada seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses analisa.

2.3. Paradigma Pembangunan Bali

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi

munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1) Pembangunan yang mengandung dimensi *sakala* dan *niskala*

Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

2) Pembangunan bersifat holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3) Pembangunan bersifat integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan. Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian

maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4) Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5) Pembangunan berbasis kepemimpinan kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6) Pembangunan dengan pendekatan satu kesatuan wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7) Pembangunan yang berpihak pada kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sector, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai

tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

2.4. Transformasi Ekonomi Bali

Perekonomian Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata menyebabkan sangat rentan terhadap guncangan kondisi global maupun domestik. Keterpurukan ekonomi Bali akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat selama masa pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas perekonomian melemah dan sulit untuk bangkit karena struktur ekonomi Bali yang kurang tangguh, sehingga memerlukan intervensi pemerintah untuk segera menata kembali melalui transformasi ekonomi.

Dampak pandemi Covid-19 memberikan momentum untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki, memperkuat dan mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi Bali yang berlandaskan filosofi Alam, Krama dan Budaya Bali. Pemulihan ekonomi dalam jangka pendek diarahkan terutama untuk mengembalikan kegiatan ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan memulihkan kesejahteraan masyarakat Bali. Transformasi ekonomi yang bersifat jangka menengah-panjang dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya berbasis kearifan lokal, yang menekankan pada keharmonisan alam, krama dan budaya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengan demikian, ekonomi Bali akan tumbuh lebih tangguh (berdikari, bernilai tambah tinggi, berdaya saing dan berdaya tahan), sekaligus membangun ekonomi Bali menjadi lebih hijau dan berkelanjutan.

Sektor pertanian dalam arti luas, sektor kelautan dan perikanan, dan sektor industri kerajinan rakyat di Bali memiliki potensi besar yang selama ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Pengembangan perekonomian yang bersumber dari keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal meliputi: Alam,

Krama, dan Kebudayaan Bali sebagai sumber daya potensial pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan industri kerajinan rakyat.

Pembangunan pertanian dalam arti luas termasuk perikanan dan sumber daya kelautan harus ditata dan dikelola dengan baik dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan potensi wilayah. Bali harus mencapai kedaulatan pangan dalam upaya pemenuhan jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali maupun wisatawan, dan berorientasi ekspor. Untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan sudah seharusnya menerapkan sistem pertanian organik menuju Bali Pulau Organik.

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi digital diarahkan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif dan digital sesuai dengan potensi Krama Bali secara efektif, efisien, produktif, serta bernilai tambah.

Penguatan sektor pariwisata sebagai sumber tambahan (bonus) dalam perekonomian Bali. Sektor pariwisata harus berperan sebagai penarik (lokomotif) untuk bergeraknya sektor pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kerajinan rakyat sehingga secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali. Demikian pula, Industri Branding Bali harus dikembangkan dari hulu sampai ke hilir sejalan dengan Ekonomi Kreatif berbasis budaya Branding Bali serta Ekonomi digital. Pengembangan dan penguatan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi terutama Koperasi Produksi serta Lembaga Perekonomian Adat dalam pengelolaan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat, juga harus dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat terutama di perdesaan.

Pembangunan/pengembangan perekonomian Bali sesuai dengan potensi wilayah dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar wilayah se-Bali, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kebijakan transformasi ekonomi Bali diperkuat oleh konsep Ekonomi Kerthi Bali, yaitu konsep ekonomi yang komprehensif untuk mewujudkan Bali Berdikari

dalam Bidang Ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sad Kerthi. Enam Sektor Unggulan Ekonomi Kerthi Bali sebagai Pilar Perekonomian Bali, meliputi: 1) Sektor Pertanian; 2) Sektor Kelautan/Perikanan; 3) Sektor Industri; 4) Sektor IKM, UMKM, dan Koperasi; 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan 6) Sektor Pariwisata.

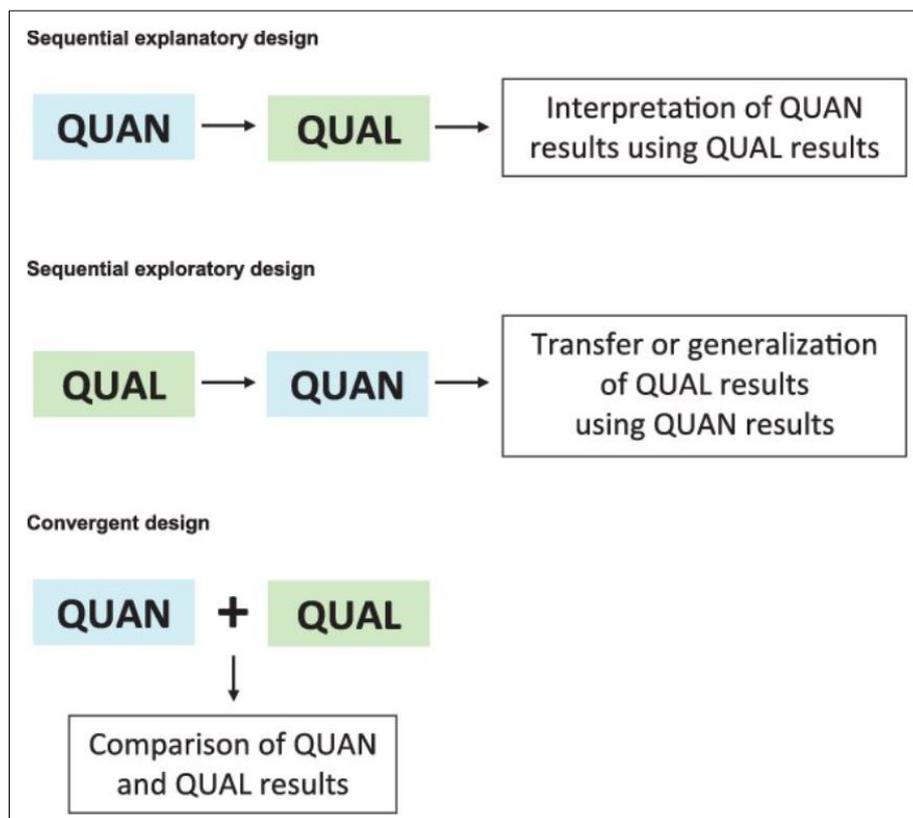
Transformasi ekonomi Bali adalah proses pembangunan ekonomi dalam jangka menengah-panjang, yang mencakup enam strategi besar dan diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan, yaitu:

- 1) Bali Pintar dan Sehat, diarahkan melalui transformasi pembangunan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan mewujudkan SDM sehat bergizi, SDM cerdas berkarakter kuat dan SDM yang kreatif dan inovatif.
- 2) Bali Produktif, diarahkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah, modernisasi pertanian, modernisasi kelautan dan perikanan, peningkatan industrialisasi, penguatan sektor pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM.
- 3) Bali Hijau, melalui penerapan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk menurunkan Green House Gases (GHG) secara lebih cepat, serta meningkatkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi hijau.
- 4) Bali Terintegrasi, melalui peningkatan sarana dan prasarana konektivitas, pengembangan Bali sebagai hub logistik udara, penguatan kerjasama Bali-Nusra, serta pengembangan skema inovatif pembiayaan infrastruktur.
- 5) Bali Smart Island, melalui penguatan infrastruktur digital (100% coverage dan berkualitas), dapat mewujudkan peningkatan SDM trampil digital, pengembangan berbagai pelayanan publik dan swasta secara digital, serta digitisasi perekonomian Bali antara lain start up UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk pengembangan layanan swasta digital.
- 6) Bali Kondusif, melalui penguatan enabler atau faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi, meliputi: aspek keuangan daerah, aspek pembiayaan usaha, aspek kemudahan berusaha, aspek reformasi birokrasi, serta perbaikan tata Kelola dan kelembagaan.

BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Desain Pelaksanaan Kegiatan

Kajian ini dilaksanakan dengan pendekatan *mixed method* yang merupakan pendekatan baru dalam penelitian. *Mixed method* merupakan penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (baik *embedded* maupun *sequential*) dengan rancangan tertentu untuk dapat menjawab tujuan penelitian (Creswell dan Clark, 2011). Pendekatan ini juga dinilai sebagai bentuk pengembangan atas penelitian sebelumnya, apalagi dalam penelitian ilmu sosial yang cenderung kompleks (Creswell, 2009).



Gambar 3.1
Tipe Umum Desain *Mixed Methods*

Sumber: Nicolau et al., 2017

Terdapat dua tujuan utama dalam penyusunan kajian dampak pembangunan Bali Era Baru, yaitu terkait integrasi perencanaan pembangunan dan dampak pembangunan infrastruktur. Sebelumnya juga telah dipaparkan ruang

lingkup pelaksanaan kegiatan, sehingga untuk menghasilkan kajian yang komprehensif, maka analisis dilakukan dengan *mixed method*. Selain itu, diperhatikan pula ruang lingkup kegiatan ini, baik dari tahap analisis dokumen perencanaan pembangunan hingga analisis dampak. Penggunaan teknik *mixed method* akan dilakukan secara *embedded* sehingga proses pengumpulan maupun analisis data dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Secara garis besar, desain pelaksanaan kegiatan mengacu pada tahapan umum pelaksanaan analisis dampak pembangunan.



Gambar 3.2
Tahapan Pelaksanaan *Impact Assessment* Pembangunan

Sumber: Tim Penulis, 2016

3.2. Data dan Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan penelitian ini adalah *mixed method*, sehingga data yang digunakan juga merupakan data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Data kuantitatif menunjukkan kuantitas, bentuk angka absolut (*parametric*) sehingga dapat ditentukan magnitudenya (besarannya). Data kuantitatif yang digunakan adalah berbagai ukuran variabel pembangunan khususnya yang berkaitan dengan data makro ekonomi, infrastruktur dan dampaknya, serta data numerikal lainnya.
- 2) Data kualitatif merupakan data yang hanya berupa penjelasan-penjelasan menunjukkan kualitas, bentuk angka non parametrik (*ordinal dan nominal*), memiliki ciri terdiri dari dua atau lebih atribut, tidak mempunyai ranking atau peringkat. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa penjelasan atau gambaran mengenai dampak pembangunan Bali Era Baru.

Berdasarkan sumber data, kajian ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer:

- 1) Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi-instansi diantaranya dari Bappeda Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), BPS Provinsi Bali, dan instansi lainnya. Data pendukung lainnya diperoleh melalui publikasi ilmiah, buku, dan media internet.
- 2) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer yang digunakan pada penelitian diperoleh dari *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para *expert* serta *stakeholders* yang berkaitan dengan pembangunan di Provinsi Bali.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah:

- 1) Observasi atau survei lapangan, untuk mengumpulkan data faktual (primer) berkaitan dengan potensi daerah dan dampak program pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dilaksanakan.
- 2) Survei instansional, untuk mengumpulkan data yang berupa data non-fisik, seperti data statistik, profil daerah, data kebijakan, dan data acuan perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun yang berkaitan dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

- 3) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis (Moto, 2019).

3.3. Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran pembangunan di Provinsi Bali baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara lebih spesifik, statistika deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai sesuatu hal, sehingga data disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau dibaca (Nasution, 2017).

2. Literature Review (Tinjauan Literatur)

Literature review merupakan suatu kerangka, konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan (Mardiyantoro, 2019).

3. Analisis Pencapaian *Outcome* Pembangunan Infrastruktur

Indikator *outcome* Pembangunan infrastruktur menjadi sebuah alat ukur yang perlu dibangun sebagai langkah awal pemikiran pentingnya mengetahui tingkat keberfungsian pembangunan infrastruktur. *Outcome* berbeda dengan *output*, dimana *output* merupakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan, sedangkan *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran/*output* dari kegiatan-kegiatan suatu program. Tahap penilaian *outcome* dilakukan dengan menetapkan variabel serta indikatornya yang terukur, dimana penilaian dilakukan dengan membandingkan target yang diharapkan dan realisasi *outcome* (Nur'Aini *et al.*, 2013).

4. Model Analisis Input-Output (IO)

Tabel Input-Output (IO) merupakan tabel data yang disusun oleh BPS dengan tujuan untuk menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik

dan saling keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) dalam perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Bentuk penyajian tabel IO adalah matriks, dimana masing-masing barisnya menunjukkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, sedangkan masing-masing kolomnya menunjukkan pemakaian input antara dan input primer oleh suatu sektor dalam proses produksinya.

Tabel 3.1
Tabel Input-Output Untuk Sistem Perekonomian
Dengan Tiga Sektor Produksi

Alokasi Output			Permintaan Antara			Permintaan Akhir	Jumlah Output
			Sektor Produksi				
Struktur Input			1	2	3		
Input Antara	Sektor Produksi	1	X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	F ₁	X ₁
		2	X ₂₁	X ₂₂	X ₂₃	F ₂	X ₂
		3	X ₃₁	X ₃₂	X ₃₃	F ₃	X ₃
Input Primer			V ₁	V ₂	V ₃		
Jumlah Input			X ₁	X ₂	X ₃		

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} + F_i = X_i; \text{ untuk semua } i = 1, 2, 3, \dots$$

Dimana:

X_{ij} = output sektor I yang digunakan sebagai input sektor j

F_i = permintaan akhir terhadap sektor i

X_i = jumlah output sektor i

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} + V_j = X_j; \text{ untuk semua } i = 1, 2, 3, \dots$$

Dimana:

V_j = nilai tambah atau input primer sektor j.

Tabel Input Output dapat memberikan informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar kegiatan produksi di dalam suatu perekonomian tertentu dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1, melalui penyajian struktur input, permintaan antara, dan alokasi output, dapat diketahui pula Nilai Tambah Bruto (NTB)

masing-masing sektor produksi. BPS mengklasifikasikan 52 sektor produksi dalam Tabel IO, dimana 52 sektor tersebut telah dikondorsasi pula ke dalam 17 sektor lapangan usaha pembentuk PDB, sehingga analisis dapat dilakukan menggunakan kedua tipe sektor industri tersebut.

5. Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk menentukan sektor basis dan non basis dapat digunakan teknik analisis *Location Quotient* (LQ). Metode LQ merupakan salah satu pendekatan umum dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB suatu wilayah, dalam hal ini Provinsi Bali, yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah.

LQ menjadi indikator sederhana untuk menunjukkan kekuatan peran suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah di atasnya. Secara umum, metode ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis suatu aktivitas serta mengidentifikasi sektor unggulan suatu wilayah.

Persamaan dari LQ adalah:

$$LQ = \frac{x_i/PDRB}{X_i/PNB}$$

Keterangan:

x_i : Nilai tambah sektor i di suatu daerah

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto daerah tersebut

X_i : Nilai tambah sektor I secara nasional

PNB : Produk Nasional Bruto atau GNP

$LQ > 1$: Sektor basis

$LQ = 1$: Sektor sama dengan daerah lain

$LQ < 1$: Sektor non basis

I : sektor lapangan usaha (A, B, C U)

6. Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen bertujuan untuk menentukan sektor mana yang termasuk kategori unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang yang didasarkan pada perhitungan laju pertumbuhan kontribusi sektoral

dan rata-rata nilai kontribusi sektoralnya terhadap PDRB/PDB. Keempat kategori tersebut dikenal sebagai Tipologi Klassen dengan kriteria yang tertera pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Klasifikasi Tipologi Klassen

Rata-rata Pertumbuhan Rata-rata (r) Kontribusi (y)	$r_i \geq r$	$r_i < r$
$y_i \geq y$	Kuadran I Sektor maju dan tumbuh dengan pesat (<i>Developed Sector</i>)	Kuadran II Sektor maju tapi tertekan (<i>Stagnant Sector</i>)
$y_i < y$	Kuadran III Sektor potensial/masih dapat berkembang (<i>Developing Sector</i>)	Kuadran IV Sektor relatif tertinggal (<i>Underdeveloped Sector</i>)

Sumber: Diadopsi dari Wulandari dan Rejeki (2018)

7. Analisis *Time Series-Double Exponential Smoothing*

Berbagai proyek pembangunan infrastruktur strategis dan monumental Bali Era Baru telah mulai dikerjakan, dimana beberapa proyek telah selesai, dan sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Sehingga nilai proyek tersebut telah diperhitungkan dalam PDRB Bali. Dalam proses *forecasting* ini tidak dilakukan penambahan kembali nilai proyek karena akan menyebabkan *double accounting*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *forecasting* menggunakan metode peramalan *time series-double exponential smoothing* dengan *tools* minitab. Adapun *forecast* dengan *double exponential smoothing* dilakukan dengan rumus:

$$S_{t+m} = a_t + b_{tm}$$

m = jangka waktu *forecast* ke depan

$$a_t = 2S'_t - S''_t$$

$$b_t = \frac{\alpha}{1 - \alpha} (S'_t - S''_t)$$

8. Analisis SWOT

Dasar perumusan kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi Bali, dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal berupa potensi dan permasalahan (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) yang disajikan dalam bentuk uraian dan dikompilasi dalam bentuk matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Pembagian faktor-faktor strategis dalam analisis SWOT:

- a) Kekuatan; kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Organisasi memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.
- b) Kelemahan; keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.
- c) Peluang; berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi
- d) Ancaman; faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan organisasi dan jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi organisasi yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun di masa depan.

Analisis SWOT merupakan bentuk evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Melalui analisis ini dapat dilakukan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*), dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*).



Gambar 3.3
Diagram Analisis SWOT

Kuadran 1 : situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*).

Kuadran 2 : meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar). Berkaitan dengan organisasi pemerintahan maka dalam hal ini yang mungkin dilakukan adalah diversifikasi pelayanan.

Kuadran 3 : organisasi menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi organisasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang baik. Misalnya menggunakan strategi peninjauan kembali teknologi informasi yang berkaitan dengan kependudukan.

Kuadran 4 : ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal

Identifikasi faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dilakukan melalui kegiatan review dokumen perencanaan Provinsi Bali, kegiatan wawancara dan *focus group discussion* (FGD) dengan perangkat daerah dan *stakeholders* terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Bali.

3.4. Personil

Kualifikasi tenaga yang akan dilibatkan dalam kajian adalah sebagai berikut:

1. Ketua Tim/Tim *Leader*/Koordinator

Ketua tim/Tim *Leader*/Koordinator sebanyak 1 orang, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 4 (empat) tahun dengan Pendidikan sekurang-kurangnya S2 bidang ekonomi dan bisnis.

2. Tenaga Ahli

a) Tenaga Ahli Ekonomi dan Bisnis sebanyak 3 (tiga) orang, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan pendidikan S2/S3 di bidang ekonomi dan bisnis.

b) Tenaga Ahli Infrastruktur sebanyak 1 (satu) orang, memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan pendidikan S2/S3 di bidang teknik infrastruktur.

3. Tenaga Pembantu Ahli

a) Pencari Data/Surveyor

Pencari data/surveyor sebanyak 4 (empat) orang, memiliki pengalaman dalam pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan pendidikan S1 bidang perekonomian atau infrastruktur.

4. Tenaga Pendukung

a) Sekretaris Peneliti

Sekretariat peneliti sebanyak 1 (satu) orang, memiliki pengalaman dalam pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan pendidikan S1 bidang ekonomi dan bisnis.

Tabel 3.3
Personil Tenaga Ahli/Profesional

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. I Gede Putu Kawiana, SE., MM.	Tim Leader/Koordinator
2.	Dr. Putu Yudy Wijaya, SE., M.Si.	Tenaga Ahli Ekonomi dan Bisnis
3.	Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom., M.Kom.	Tenaga Ahli Ekonomi dan Bisnis
4.	Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si.	Tenaga Ahli Ekonomi dan Bisnis
5.	I Nyoman Suta Widnyana, ST., MT.	Tenaga Ahli Infrastruktur

3.5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama dua bulan pada bulan Mei - Juli 2023, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan												
	a Pembelian Bahan-bahan ATK	■											
	b Pembuatan Tim Kerja	■											
	c Rapat Tim Kerja	■											
	d Pembuatan Lembar Kerja Pengolahan	■											
	e Penulisan Konsep Definisi	■	■										
2	Pelaksanaan Kegiatan												
	a Inventarisasi Data Primer dan Sekunder	■	■	■									
	b Penentuan Target Bidang-Bidang Pembangunan sesuai Prioritas Daerah				■								
No	Uraian	Mei				Juni				Juli			
	c Pengolahan Data					■							
	d FGD 1					■							
	e Revisi dan penyempurnaan interpretasi hasil analisis data						■	■					
	f FGD2									■			

3	Penyusunan Dokumen												
	a Penyusunan Laporan Pendahuluan												
	b Penyusunan Laporan Akhir												
4	Pencetakan												

3.6. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang diusulkan untuk kegiatan penyusunan Dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi Bali sebesar Rp148.247.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratur Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Secara garis besar penggunaannya adalah untuk honorarium, belanja habis pakai (ATK), konsumsi kegiatan, hingga pencetakan dokumen. RAB disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023.
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas.

Adapun rincian RAB disajikan pada lampiran.

3.7. Pelaporan

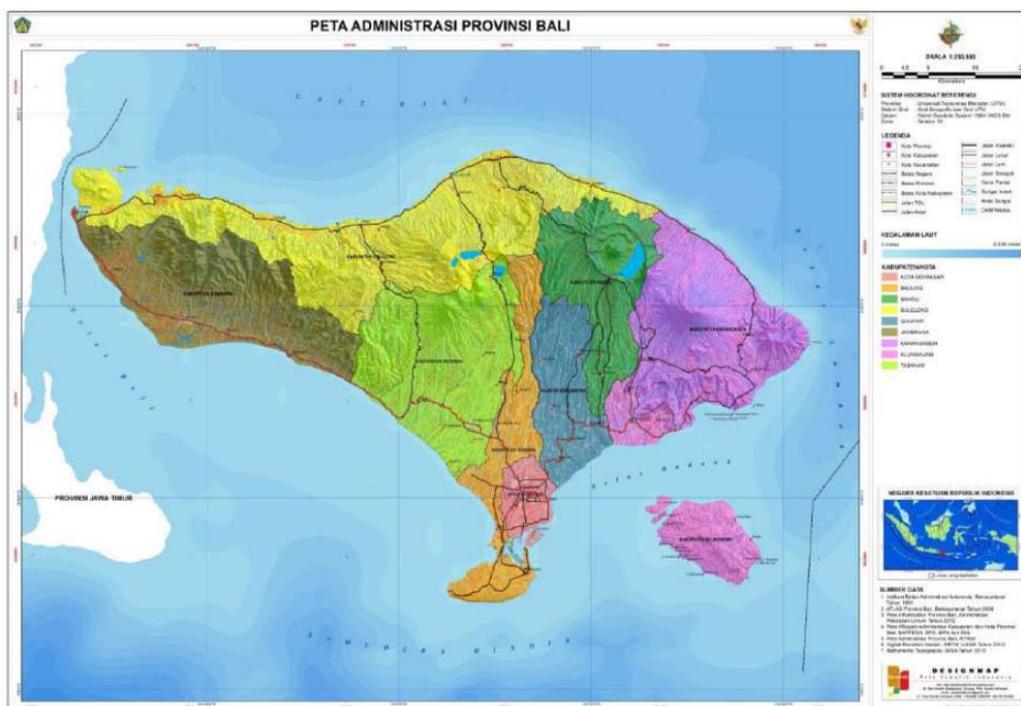
Pelaporan kegiatan dalam bentuk luaran kajian yaitu Dokumen Kajian Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Provinsi Bali.

BAB IV KONDISI UMUM PROVINSI BALI DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BALI ERA BARU

4.1. Gambaran Umum Kondisi Wilayah

Aspek Geografi dan Demografi

Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah barat, dan Selat Lombok di sebelah timur. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi 08003'40" – 08050'48" Lintang Selatan dan 114025'53" – 115042'40" Bujur Timur. Provinsi Bali memiliki beberapa pulau kecil, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Provinsi Bali berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut: (1) sebelah utara: Laut Jawa; (2) sebelah barat: Selat Bali dan Provinsi Jawa Timur; (3) sebelah selatan: Samudera Hindia; dan (4) sebelah timur: Selat Lombok dan Provinsi NTB.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Administratif Provinsi Bali

Sumber: RTRW Provinsi Bali

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km² atau 0,29 % dari luas kepulauan Indonesia, yang secara administratif dibagi menjadi delapan kabupaten,

1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.493 desa adat, 1.596 subak sawah, dan 1.130 subak abian dengan total 2.726 subak sawah/subak swah pda tahun 2018. Luas dan proporsi luas wilayah masing-masing kabupaten dan kota tersebut disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Dibandingkan dengan Luas Provinsi Bali (%)
1	Jembrana	841,80	14,93
2	Tabanan	839,33	14,89
3	Badung	418,52	7,42
4	Gianyar	368,00	6,53
5	Klungkung	315,00	5,59
6	Bangli	520,81	9,24
7	Karangasem	839,54	14,89
8	Buleleng	1.365,88	24,23
9	Denpasar	127,78	2,27
	Bali	5.636,66	100,00

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

Apabila ditinjau dari sisi demografi, diketahui bahwa jumlah penduduk di Provinsi Bali dari tahun 2018 sampai tahun 2023 (proyeksi) cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena adanya migrasi keluar ketika puncak periode pandemi Covid-19.



Gambar 4.2
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

Gambar 4.2 menunjukkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, dimana laju pertumbuhan penduduk juga cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2020 menurun signifikan (-1.02%), namun setelah itu cenderung mengalami peningkatan.

Secara lebih rinci, jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Bali disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023*

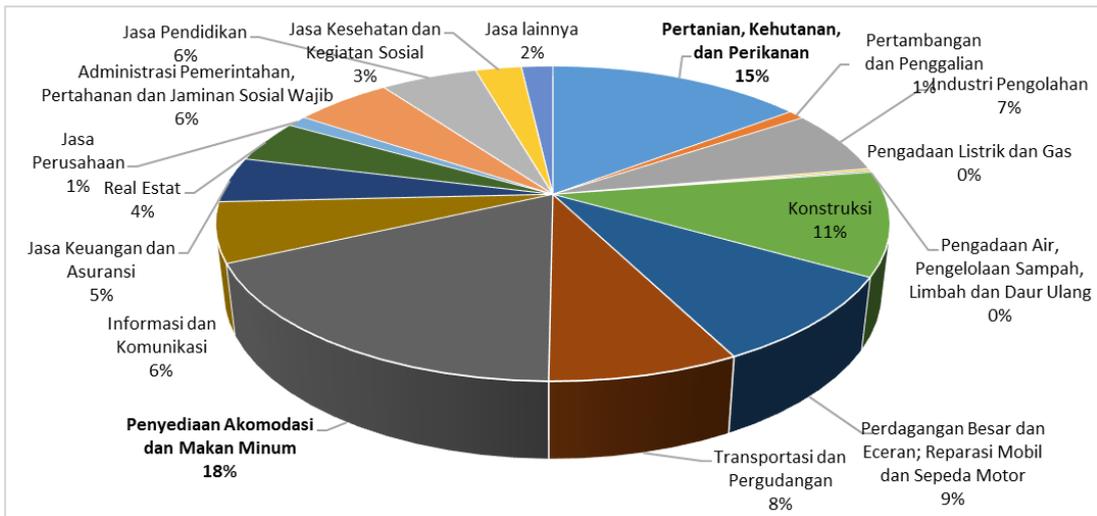
No	Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jembrana	278.7	317.1	321.9	327.9	333.8
2	Tabanan	446.7	461.6	465.3	469.3	473.3
3	Badung	678.9	548.2	549.3	549.5	549.7
4	Gianyar	514.3	515.3	519.5	524	528.4
5	Klungkung	179.1	206.9	210.1	214	217.9
6	Bangli	227.6	258.7	262.5	267.1	271.8
7	Karangasem	417	492.4	500.8	511.3	521.8
8	Buleleng	661.9	791.8	806.6	825.1	843.9
9	Denpasar	957.8	725.3	726.6	726.8	726.9
	Bali	4362.1	4317.4	4362.7	4415.1	4467.7

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Badung. Hal ini juga disebabkan adanya migrasi keluar penduduk di Kabupaten Badung. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Badung memiliki banyak penduduk yang bekerja di sektor pariwisata, sehingga ketika terjadi pandemi Covid-19, terjadi migrasi keluar Kabupaten Badung.

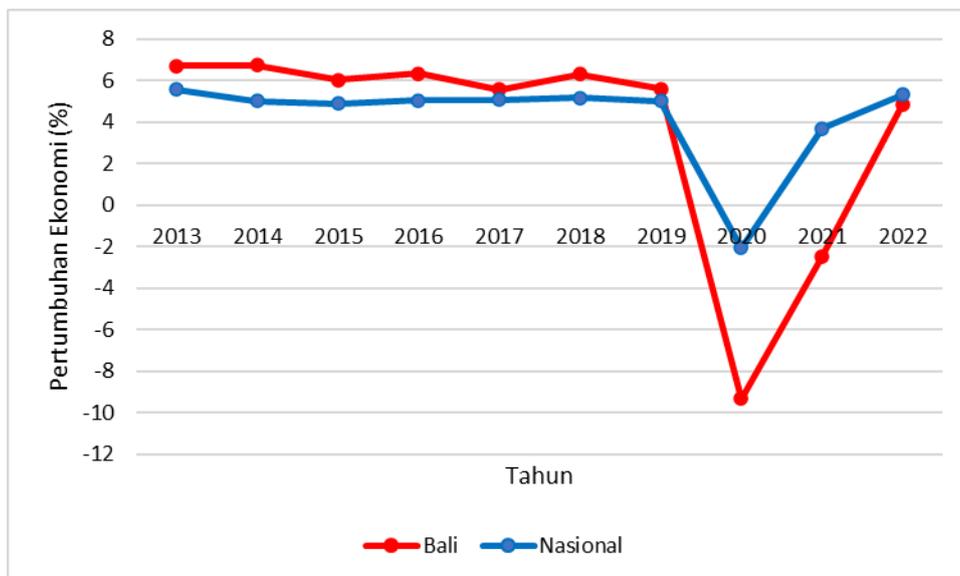
Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Bali digerakkan oleh sektor pariwisata dan pendukungnya, seperti pertanian dan jasa-jasa. Hal itu terbukti dari tingginya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Bali, yaitu sebesar 17,93%. Selain sektor pariwisata, sektor pertanian juga memiliki sumbangan besar terhadap perekonomian Bali (14,68%). Gambar 4.3 menyajikan kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha dalam membentuk PDRB Provinsi Bali tahun 2022.



Gambar 4.3
Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2022
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

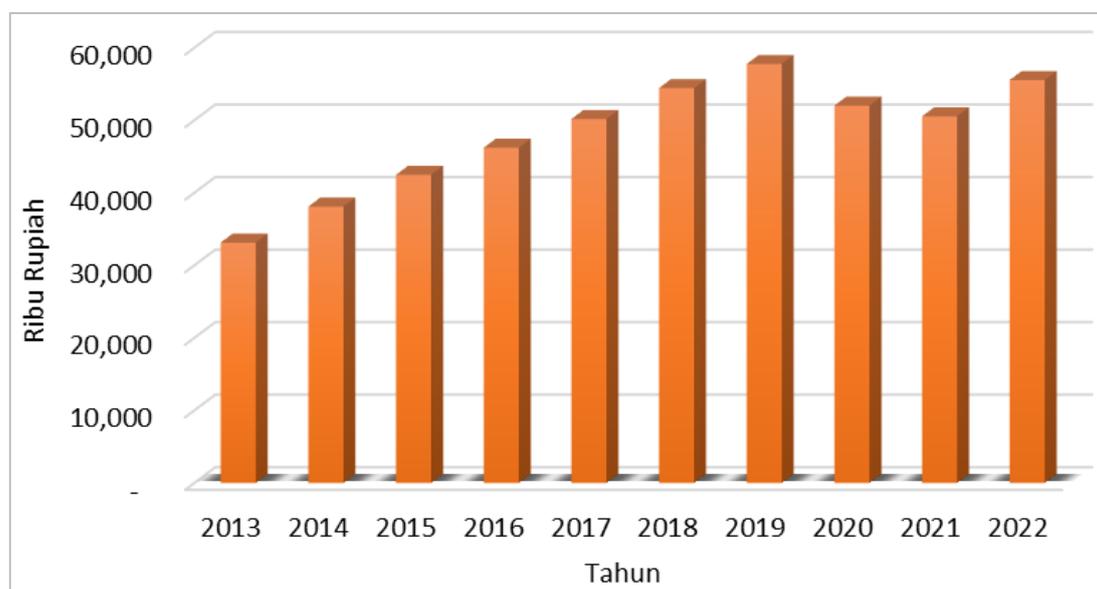
Kondisi perekonomian Bali cenderung fluktuatif selama beberapa tahun terakhir, terutama akibat pandemi Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bali selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada tahun 2020, perekonomian Bali mengalami kontraksi hingga 9,33% (yoy). Nilai tersebut paling dalam bila dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, dan bahkan kontraksi bagi Bali selama dua dekade terakhir. Gambar 4.4 berikut menunjukkan fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi Bali.



Gambar 4.4
Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali (yoy) Tahun 2013 - 2022
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

Kebijakan *travel restriction* akibat pandem Covid-19 berdampak terhadap perekonomian Bali yang ditopang sektor pariwisata. Namun pada periode *recovery*, ketika kegiatan pariwisata Bali mulai bergeliat kembali, pertumbuhan ekonomi Bali juga meningkat dan mendekati pertumbuhan ekonomi nasional di akhir tahun 2022.

Indikator kesejahteraan masyarakat secara agregat dapat dipotret dari PDRB perkapita, yang merupakan nilai PDRB suatu daerah dibagi jumlah penduduk daerah tersebut pada pertengahan tahun.



Gambar 4.5
PDRB Perkapita Provinsi Bali Tahun 2013 - 2022

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa PDRB perkapita masyarakat di Provinsi Bali cenderung meningkat, dan hanya mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19. Namun kondisi tersebut telah mengalami perbaikan di tahun 2022, dimana PDRB per kapita mulai mengalami peningkatan kembali.

Pengukuran kesejahteraan masyarakat saat ini tidak hanya ditinjau dari sisi ekonomi (terutama pendapatan per kapita), karena makna kesejahteraan sendiri tidak terbatas pada tambahan pendapatan atau konsumsi saja (Basofi dan Santoso, 2017). Salah satu indeks kesejahteraan yang saat ini sedang menjadi perhatian *stakeholders* adalah indeks kebahagiaan (*happiness index*) (Rositawati dan

Budiantara, 2019). BPS sendiri telah melakukan survei untuk mengukur indeks kebahagiaan, yaitu tahun 2017 dan tahun 2021, dimana detail informasi untuk Provinsi Bali disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik Provinsi Bali, Tahun 2017 dan 2021

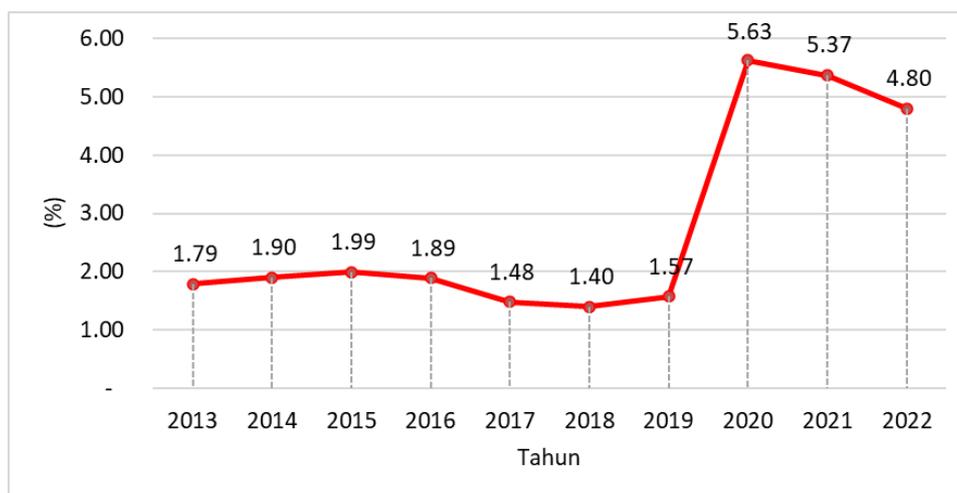
Karakteristik	Indeks Kebahagiaan		Penyusun Indeks Kebahagiaan															
			Indeks Dimensi Kepuasan Hidup						Indeks Dimensi Perasaan (<i>Affect</i>)		Indeks Dimensi Makna Hidup (<i>Eudaimonia</i>)							
			Personal		Sosial		Total											
	2017	2021	2017	2021	2017	2021	2017	2021	2017	2021	2017	2021						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
Klasifikasi Wilayah:																		
Perkotaan	74.04	72.55	▼	70.66	70.60	▼	76.72	80.51	▲	73.64	75.55	▲	73.47	67.55	▼	74.96	74.05	▼
Perdesaan	69.22	68.69	▼	63.91	67.75	▲	75.81	78.68	▲	69.79	73.21	▲	68.01	62.08	▼	69.73	70.11	▲
Jenis Kelamin:																		
Laki-Laki	73.12	72.87	▼	68.74	70.60	▲	76.72	80.73	▲	72.73	75.67	▲	72.11	68.29	▼	74.45	74.20	▼
Perempuan	71.67	69.31	▼	68.15	68.56	▲	75.81	78.87	▲	71.98	73.72	▲	71.20	62.54	▼	71.78	71.01	▼
Status Perkawinan:																		
Belum Menikah	73.30	69.23	▼	70.48	70.44	▼	75.13	76.27	▲	72.80	73.35	▲	71.26	62.21	▼	75.67	71.44	▼
Menikah	72.81	72.08	▼	68.76	70.26	▲	76.65	80.49	▲	72.70	75.38	▲	72.26	66.84	▼	73.43	73.50	▲
Cerai Hidup	69.84	67.06	▼	65.09	65.52	▲	73.89	74.97	▲	69.49	70.25	▲	68.75	60.66	▼	71.20	69.67	▼
Cerai Mati	68.00	65.75	▼	63.51	64.30	▲	74.12	77.05	▲	68.81	70.67	▲	66.03	58.64	▼	68.97	67.21	▼
Kelompok Umur:																		
≤ 24 Tahun	72.37	69.89	▼	69.01	73.59	▲	75.19	77.32	▲	72.10	75.46	▲	69.87	62.90	▼	74.93	70.59	▼
25-40 Tahun	73.26	72.52	▼	69.56	71.13	▲	76.48	80.02	▲	73.02	75.58	▲	72.18	66.95	▼	74.49	74.51	▲
41-64 Tahun	72.34	71.42	▼	68.26	69.53	▲	76.39	80.38	▲	72.32	74.95	▲	71.69	65.89	▼	72.96	72.86	▼
≥ 65 Tahun	70.38	68.12	▼	65.22	65.57	▲	76.08	78.01	▲	70.65	71.79	▲	71.32	63.92	▼	69.25	68.22	▼
Kedudukan Dalam Rumah Tangga:																		
Kepala Rumah Tangga	72.53	72.09	▼	68.17	69.88	▲	76.27	80.34	▲	72.22	75.11	▲	71.48	67.07	▼	73.82	73.61	▼
Pasangan Kepala Rumah Tangga	72.37	69.96	▼	69.08	69.56	▲	76.41	79.17	▲	72.74	74.37	▲	72.16	63.54	▼	72.20	71.35	▼
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:																		
1 Orang	72.70	66.35	▼	69.91	67.27	▼	74.89	75.28	▲	72.40	71.28	▼	71.56	58.25	▼	74.03	68.74	▼
2 Orang	71.00	68.74	▼	65.66	67.50	▲	75.23	78.42	▲	70.45	72.96	▲	70.98	63.34	▼	71.57	69.38	▼
3 Orang	71.25	72.29	▲	66.47	69.76	▲	76.01	80.74	▲	71.24	75.25	▲	70.68	67.61	▼	71.79	73.54	▲
4 Orang	73.44	71.25	▼	70.19	69.81	▼	77.07	80.56	▲	73.63	75.18	▲	72.56	65.36	▼	74.06	72.63	▼
5 Orang atau Lebih	73.18	73.06	▼	69.32	71.17	▲	77.05	80.49	▲	73.19	75.83	▲	72.09	67.88	▼	74.17	74.96	▲

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan:																		
Tidak pernah sekolah	66.04	64.77	▼	58.72	60.93	▲	75.57	75.10	▼	67.14	68.01	▲	64.77	61.19	▼	66.07	64.73	▼
Tidak tamat SD/ sederajat	69.26	66.75	▼	63.42	63.81	▲	75.07	78.23	▲	69.25	71.02	▲	69.56	60.67	▼	69.00	67.96	▼
SD sederajat	69.70	68.48	▼	65.45	65.86	▲	75.06	78.84	▲	70.25	72.35	▲	68.98	62.34	▼	69.79	70.16	▲
SMP sederajat	71.42	70.10	▼	66.18	68.94	▲	76.08	80.40	▲	71.13	74.67	▲	70.86	62.62	▼	72.23	72.29	▲
SMA sederajat	74.17	72.47	▼	70.82	70.61	▼	77.03	80.37	▲	73.92	75.49	▲	72.85	67.43	▼	75.64	74.01	▼
Diploma I, II, III	77.02	72.27	▼	74.35	72.54	▼	76.62	77.64	▲	75.48	75.09	▼	77.28	66.26	▼	78.36	74.89	▼
Diploma IV/S1	78.41	77.08	▼	77.98	78.55	▲	78.40	80.96	▲	78.19	79.76	▲	77.66	72.45	▼	79.31	78.60	▼
S2, S3	81.73	89.69	▲	82.38	88.95	▲	77.51	93.87	▲	79.94	91.41	▲	80.52	90.28	▲	84.68	87.41	▲
Pendapatan Rumah Tangga:																		
Hingga Rp 1.800.000	65.66	65.32	▼	58.44	61.66	▲	74.53	76.31	▲	66.49	68.99	▲	63.20	59.06	▼	67.06	67.31	▲
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	70.32	68.81	▼	65.52	65.97	▲	76.59	79.48	▲	71.06	72.72	▲	68.99	61.99	▼	70.79	71.05	▲
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	72.92	70.78	▼	68.64	69.64	▲	75.49	80.04	▲	72.07	74.84	▲	72.79	64.62	▼	73.91	72.27	▼
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	75.53	74.21	▼	72.95	74.05	▲	77.35	79.41	▲	75.15	76.73	▲	75.50	70.11	▼	75.96	75.40	▼
Lebih Dari Rp. 7.200.000	78.24	82.70	▲	77.55	83.11	▲	78.02	86.17	▲	77.79	84.64	▲	77.94	81.05	▲	78.97	82.23	▲
Bali	72.48	71.44	▼	65,98	69.78	▼	68.48	79.98	▲	76.32	74.88	▼	72.40	65.98	▼	71.71	72.92	▲
Indonesia	70.69	71.49	▲															

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023 (data diolah)

Bila dibandingkan antara indeks kebahagiaan masyarakat Bali tahun 2017 dan tahun 2021, memang cenderung mengalami penurunan. Hal ini juga tidak lepas dari terjadinya pandemi Covid-19 yang memuncak di tahun 2020, dan masih berdampak hingga tahun 2021. Sedangkan bila ditinjau dari komponen penyusun indeks kebahagiaan, indeks dimensi kepuasan hidup (sosial) dan indeks dimensi makna hidup justru pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2017. Penggunaan indeks kebahagiaan untuk mengukur kesejahteraan memang masih menjadi perdebatan, salah satunya karena indeks kebahagiaan tidak seharusnya menafikan pentingnya pendapatan perkapita. Basofi dan Santoso (2017) menyebutkan implikasi risetnya bahwa aspirasi kebutuhan dasar untuk mencapai kata sejahtera di Indonesia yang utama ada pada pemenuhan kebutuhan pangan, akses kesehatan dan interaksi sosial.

Salah satu aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat adalah status pekerjaan masyarakat. Gambar 4.6 berikut menyajikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali Tahun 2013-2022.

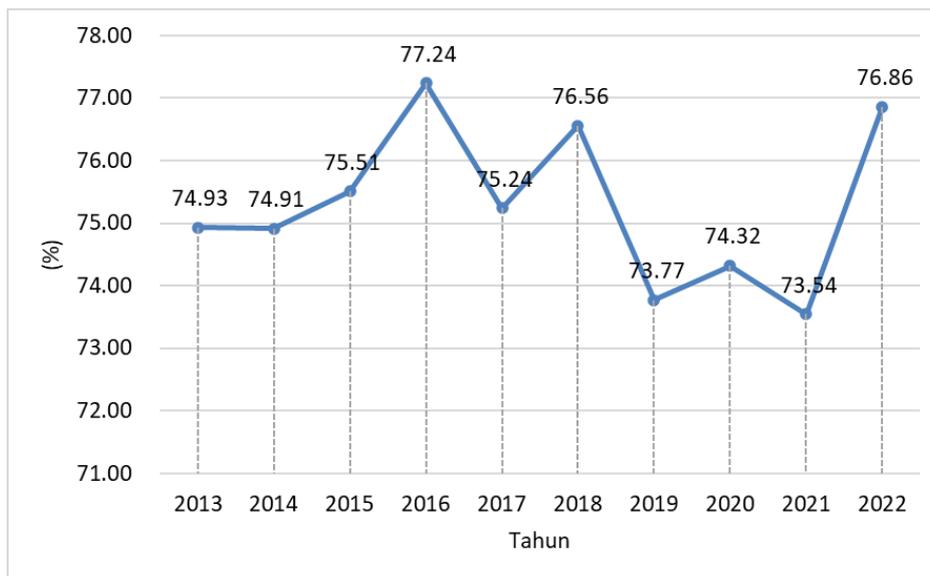


Gambar 4.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali Tahun 2013 - 2022

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan atas: (1) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (2) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (3) mereka yang tak punya pekerjaan dan (4) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Gambar

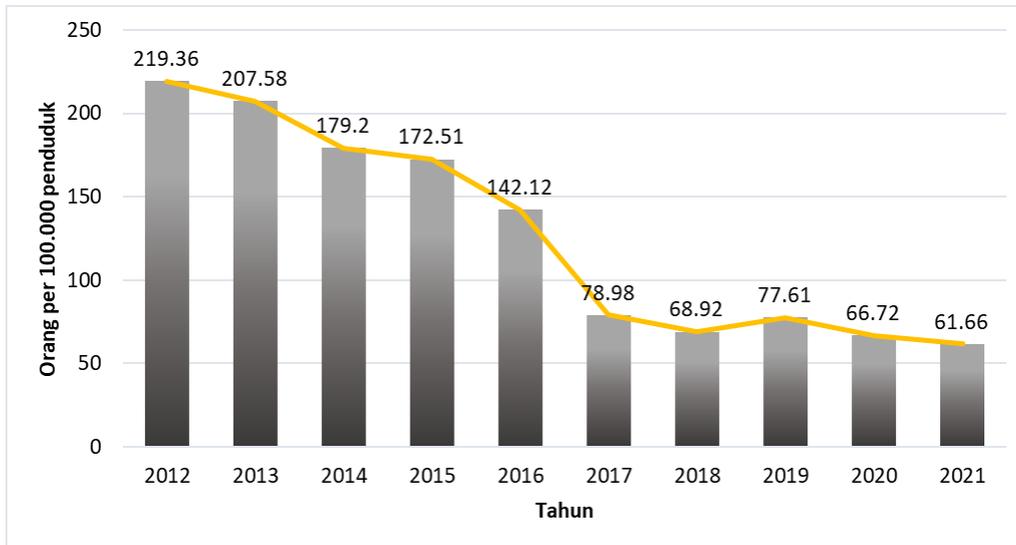
4.6 menunjukkan bahwa TPT di Provinsi Bali meningkat signifikan pada periode puncak pandemi Covid-19 (tahun 2020). Sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk Bali banyak yang bekerja di sektor usaha pariwisata, sedangkan sektor pariwisata sendiri adalah sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Namun TPT tersebut mulai melandai seiring dengan *recovery post* Covid-19. Selain itu, TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Provinsi Bali juga mengalami penurunan pada periode pandemic Covid-19 (Gambar 4.7). Namun TPAK Provinsi Bali tahun 2022 tercatat sebagai yang tertinggi selama sepuluh tahun terakhir.



Gambar 4.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Bali Tahun 2013 - 2022
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

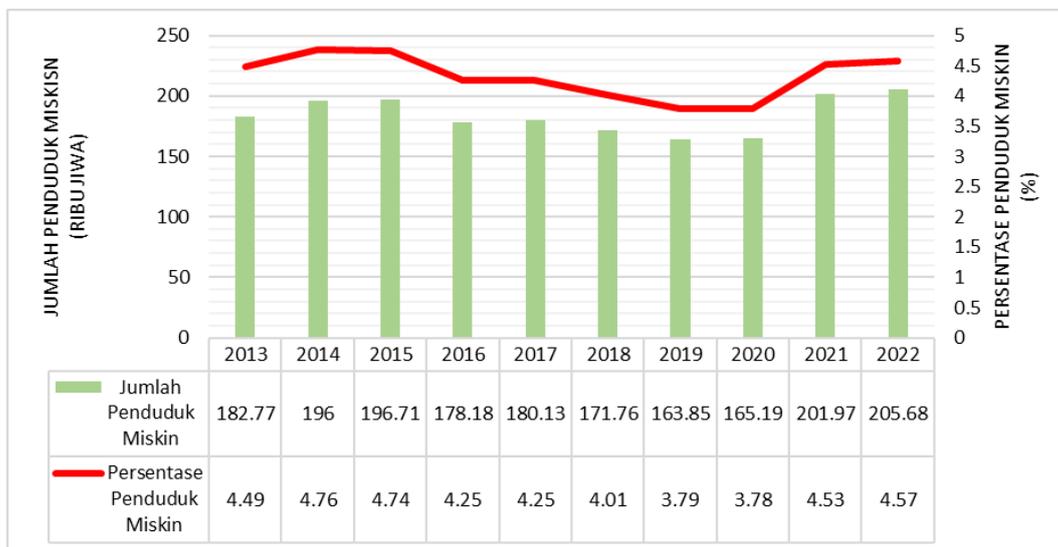
Pemenuhan kebutuhan masyarakat, hingga pengangguran diyakini juga dapat berdampak pada rendahnya kriminalitas, yang salah satunya diindikasikan dengan *crime rate*. Angka risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*) memberikan gambaran besarnya risiko kejadian tindak pidana yang kemungkinan akan dialami oleh masyarakat (Gambar 4.8). Gambar 4.8 menunjukkan bahwa secara umum sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, risiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) di Provinsi Bali cenderung memiliki pola menurun. Pada tahun 2012 tercatat risiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) di Bali sebesar 219,36 per seratus ribu penduduk. Angka ini terus menurun hingga pada capaian terendah tahun 2018 sebesar 68,92. Risiko penduduk terkena

tindak pidana mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 77,61, namun kembali menurun menjadi 66,72 per seratus ribu penduduk pada tahun 2020 dan 61,66 per seratus ribu penduduk pada tahun 2021.



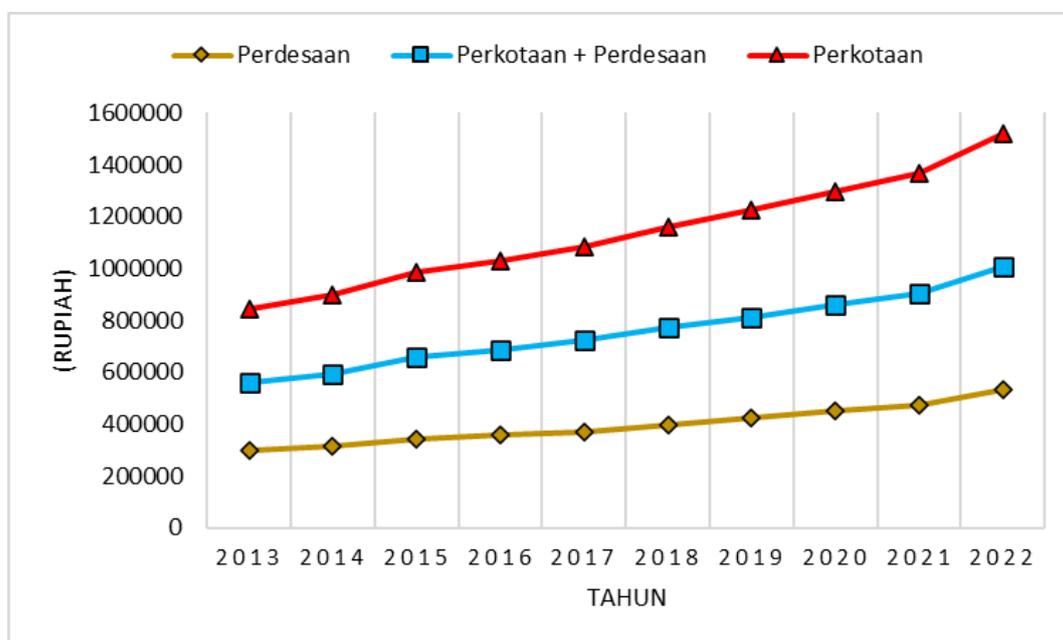
Gambar 4.8
Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Provinsi Bali, Tahun 2012 - 2021
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Selain masalah kriminalitas, masalah yang sering dihadapi negara berkembang adalah kemiskinan. Gambar 4.9 menyajikan data jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Provinsi Bali.



Gambar 4.9
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali, Tahun 2012 - 2021
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19, padahal sebelumnya telah menunjukkan trend menurun. Pemerintah memiliki tugas berat untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Di sisi lain, garis kemiskinan di Bali (baik perkotaan maupun pedesaan) terus mengalami peningkatan (Gambar 4.10). Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan perkotaan di Bali cenderung meningkat dengan lebih tajam dibandingkan dengan garis kemiskinan pedesaan, sehingga juga rentan memicu kemiskinan di perkotaan.



Gambar 4.10
Garis Kemiskinan Provinsi Bali, Tahun 2012 - 2021
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

4.2. Implementasi Pembangunan Bali Era Baru

4.2.1 Paradigma Pembangunan Bali Era Baru

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara *Genuine* Bali; kedua, bisa memenuhi

kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala dan Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

2) Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3) Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan. Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD

Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4) Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan

Wilayah Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai

tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

4.2.2 Implementasi Pembangunan Bali Era Baru

Implementasi nyata dari Visi Pembangunan Bali, yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, telah dipaparkan oleh Gubernur Bali pada Pidator Akhir Tahun 2022. Terdapat 44 tonggak peradaban penanda Bali Era Baru, yaitu:

- 1) Memuliakan Desa Adat;
- 2) Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
- 3) Perekonomian Adat Bali;
- 4) Sipandu Beradat;
- 5) Perlindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan;
- 6) *Tata-Titi* Kehidupan Berbasis Kearifan Lokal Sad Kerthi;
- 7) Memuliakan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali;
- 8) Menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali;
- 9) Menciptakan *Keyboard* Aksara Bali;
- 10) Memuliakan Keluhuran Warisan Budaya Bali;
- 11) Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
- 12) Pembaharuan Pesta Kesenian Bali;
- 13) Festival Seni Bali Jani;
- 14) Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut;
- 15) Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
- 16) Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
- 17) Bali Pulau Organik;
- 18) Pelestarian Tanaman Endemik Bali;
- 19) Gunitir Bali *Sudamala*;

- 20) Bali Mandiri Energi Dengan Energi Bersih;
- 21) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- 22) Ekonomi Kerthi Bali;
- 23) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah Bali;
- 24) Pariwisata Berbasis Budaya Berkualitas dan Bermartabat;
- 25) Bangga Produk Lokal Bali;
- 26) Harkat Arak Bali;
- 27) Cita Rasa Garam Bali;
- 28) Pesona *Endek* Bali;
- 29) Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul;
- 30) Bulan Bung Karno;
- 31) Perlindungan Karya Intelektual Bali;
- 32) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali;
- 33) Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali;
- 34) Bali Pulau Digital;
- 35) Bali *Digital Festival*;
- 36) Perlindungan Kawasan Suci Besakih;
- 37) Kawasan Pusat Kebudayaan Bali;
- 38) *Shortcut* Singaraja-Mengwitani;
- 39) Tol *Jagat Kerthi* Bali;
- 40) Pelabuhan Segitiga Sanur, Sampalan, dan Bias Munjul;
- 41) Bali *Maritime Tourism Hub*;
- 42) Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang;
- 43) *Turyapada Tower* KBS 6.0 Kerthi Bali;
- 44) Bali *Good Governance*.

4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Terhadap Pencapaian Pembangunan Bali Era Baru

4.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Bali Era Baru

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada

pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, bahwa dalam rangka mewujudkan visi **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”**, ditempuh melalui 22 misi pembangunan. Lebih jelasnya, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menyusun strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Bali tentunya melakukan upaya konkrit pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam arah kebijakan. Arah kebijakan didefinisikan sebagai suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Bali 2019-2023, tema fokus pembangunan dan perumusan arah kebijakan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Tema Fokus Pembangunan dan Perumusan Arah Kebijakan
Provinsi Bali Tahun 2019-2023

Tema Fokus Pembangunan				
2019	2020	2021	2022	2023
Memperkuat Sinergi Dalam Pertumbuhan Berkualitas, Merata Dan Berdaya Saing Menuju Pembangunan Berkelanjutan.	Peningkatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Bali Didukung Pemajuan Kebudayaan melalui Sinergi Kebijakan Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola	Percepatan Pembangunan Ekonomi Bali Didukung Pembangunan Infrastruktur dan Pemajuan Kebudayaan Menuju Pemerataan	Penyeimbangan Struktur dan Fundamental Perekonomian Bali: Pariwisata, Pertanian, Kelautan Perikanan, dan Industri	Penyeimbangan Struktur dan Fundamental Perekonomian Bali: Pariwisata, Pertanian, Kelautan Perikanan, dan Industri

Tema Fokus Pembangunan				
2019	2020	2021	2022	2023
1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali
2. Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Pariwisata, Industri Kreatif dan Jasa Produktif	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali
4. Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban serta Pelestarian Adat dan Budaya	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Berkualitas	5. Terwujudnya Ekosistem yang berkelanjutan			
	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola

Sumber: RPJMD Provinsi Bali Tahun 2019-2023

4.3.2. Indikator Sosial-Ekonomi Capaian Pembangunan Bali Era Baru

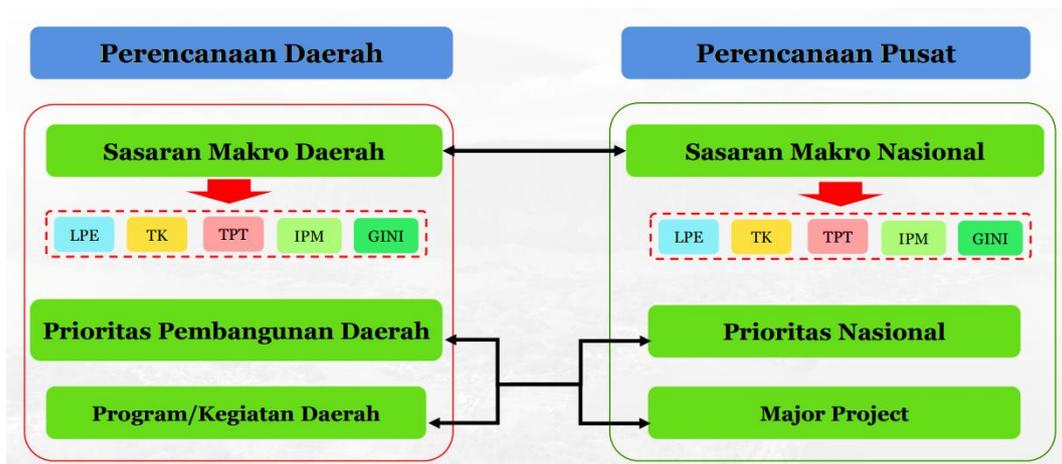
Dalam rangka menganalisis capaian pembangunan, tentunya perlu ditinjau dari berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Apabila mengacu pada periode perencanaan jangka menengah Provinsi Bali, maka arah kebijakan saat ini adalah untuk periode 2018-2023, dimana dalam periode tersebut terjadi kondisi *extraordinary* yaitu pandemi Covid-19.

Sebelum masa pandemi Covid-19, capaian makro Provinsi Bali selalu berada lebih baik diatas rata-rata Nasional. Pertumbuhan Ekonomi Bali terjaga pada angka 5-6% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada saat Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bali untuk pertama kalinya berkontraksi berada pada angka -9,3%. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum adanya Pandemi Covid-19 berada pada kisaran angka 1% lebih dan meroket pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,63%. Perekonomian Bali yang ditopang dari sektor Pariwisata sebagai sektor utama sangat rentan dengan adanya pandemi Covid-19. Penurunan pariwisata di Bali sangat berdampak pada sektor lainnya. Dengan adanya kondisi tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian target makro ekonomi bali sesuai dengan kondisi riil saat ini, namun juga tetap dengan semangat optimisme di tengah beratnya perekonomian yang terjadi.

RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 tentunya harus selaras dengan RPJMN 2020-2024, sebagaimana dipertegas dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2020-2024. Adapun substansi penyelarasan perencanaan dalam SEB tersebut disajikan pada Gambar 4.11.

Sebagaimana Gambar 4.11 dan mengingat bahwa kajian ini berfokus pada dampak pembangunan terhadap perekonomian, maka potret perekonomian sesuai dengan indikator capaian makro daerah dan capaian IKU pada indikator bidang perekonomian, namun beberapa indikator sosial juga penting untuk disajikan. Maka dapat disajikan analisis capaian target perekonomian dan beberapa indikator sosial sebagaimana Tabel 4.5.



Ket.: LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi; TK = Tingkat Kemiskinan; TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka; IPM = Indeks Pembangunan Manusia; GINI = Rasio Gini

Gambar 4.11

**Skema Substansi Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah
Dalam SEB Mendagri dan Menteri PPB/Kepala Bappenas**

Tabel 4.5
Indikator Capaian Pembangunan dan Sosial Ekonomi Provinsi Bali
(Perbandingan Realisasi dengan Target dan Revisi Target pada RPJMD Provinsi Bali 2019-2023)

No	Indikator Capaian	Satuan	Tahun												
			2019		2020		2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Semula	Target	Realisasi	Semula	Target	Realisasi	Semula	Target	Realisasi Sementara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.35 (6.20-6.40)	5.6	6.4 (6.20-6.60)	-9.34	6.60 (6.40-7.00)	3.00 (2.50-3.50)	-2.46	7.00 (6.80-7.20)	3.10 (2.70-3.50)	4.84	7.20 (7.00-7.50)	5 (4.60-5.40)	6.04*
2	Persentase Kemiskinan	%	3.85	3.79	3.59	3.78	2.95	3.75	4.53	1.9	4.25	4.57	1.5	3.75	n/a
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1.28	1.57	1.17	5.63	1.07	5.63	5.37	0.98	3.19	4.8	0.9	2.32	n/a
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75.07	75.38	75.31	75.5	75.61	75.51	75.69	78.25	76.93	76.44	80	77.78	n/a
5	Gini ratio	Point	n/a	0.3662	n/a	0.369	n/a	n/a	0.378	n/a	n/a	0.363	n/a	n/a	n/a
6	Tingkat Inflasi Bali	%	3.5 ± 1	2.37	3.0 ± 1	0.55	3.0 ± 1	3.0 ± 1	2.01	3.0 ± 1	3.0 ± 1	6.44	3.0 ± 1	3.0 ± 1	5.5*
7	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	16	13.45	17	15.09	20	20	15.77	22	22	14.68	25	25	13.72*
8	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	104.1	104.93	104.5	93.56	105	105	94.77	105.5	105.5	97.05	106	106	100.1**
9	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71.8	71.99	72	72.13	72.3	72.3	72.24	72.5	72.5	72.6	72.5	72.5	n/a
10	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10	8.84	10.28	8.95	10.56	10.56	9.06	10.84	10.84	9.39	11.4	11.4	n/a
11	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 tahun)	%	82.54	82.6	82.73	82.96	82.92	82.92	83.96	83.11	83.11	83.84	83.3	83.3	n/a
12	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.49	13.27	13.63	13.33	13.77	13.77	13.4	13.91	13.91	13.48	14.05	14.04	n/a

No	Indikator Capaian	Satuan	Tahun												
			2019		2020		2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Semula	Target	Realisasi	Semula	Target	Realisasi	Semula	Target	Realisasi Sementara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75.77	73.77	76.03	74.32	76.3	76.3	73.54	76.55	76.55	76.86	76.8	76.8	n/a
14	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	45	23.25	45	18.33	45	18.34	16.6	45	20.86	17.93	45	25.93	19.22*
15	Kontribusi KUMKM Terhadap Perekonomian Bali	%	11	47.85	11.5	45.16	12	12	44.35	12.5	12.5	44.88	13	13	45.72*
16	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	64.23	72.27	64.55	72.16	64.75	64.75	72.17	64.9	64.9	72.29	65	65	n/a

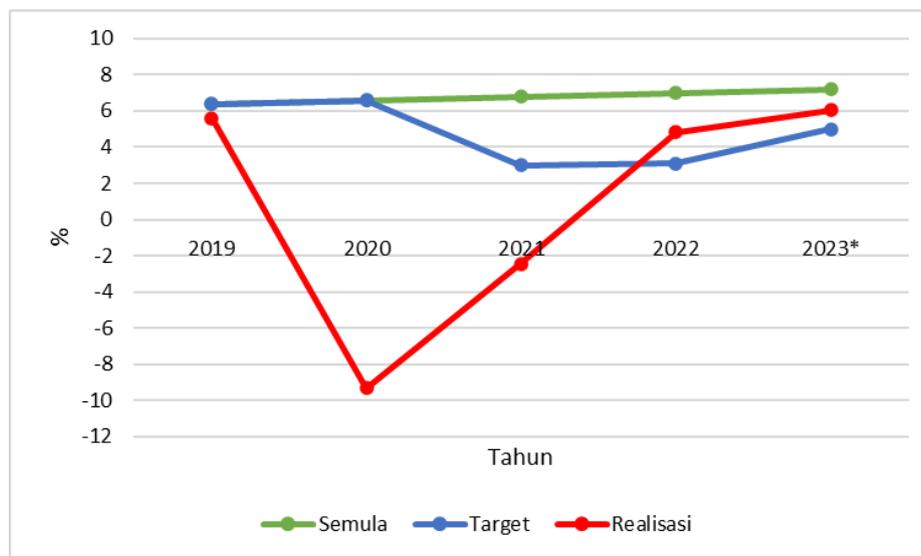
Ket.: *)Angka per Maret 2023; **)Angka per Juni 2023

Sumber: RPJMD Provinsi Bali Tahun 2019-2023 dan BPS Provinsi Bali (2023)

Mencermati Tabel 4.5, terdapat beberapa hal yang dapat dirangkum, baik dari sisi penyesuaian target, maupun capaian. Pertama, terkait dengan penyesuaian target, dimana tidak seluruh indikator makro ekonomi maupun sosial ekonomi yang dilakukan penyesuaian sebagai bentuk respons realistis atas pandemi Covid-19. Kedua, terdapat beberapa capaian indikator yang juga belum mencapai target yang telah disesuaikan. Beberapa capaian indikator makro ekonomi daerah serta kontribusi sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM terhadap perekonomian Bali diuraikan sebagai berikut.

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa laju pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi terdalam bila dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sehingga target laju pertumbuhan ekonomi Bali pada RPJMD Provinsi Bali selanjutnya disesuaikan sejak tahun 2021, dimana target tersebut kemudian diturunkan nilainya dari target semula (Gambar 4.12).



Ket.: *) angka sementara (Triwulan I)

Gambar 4.12

Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali

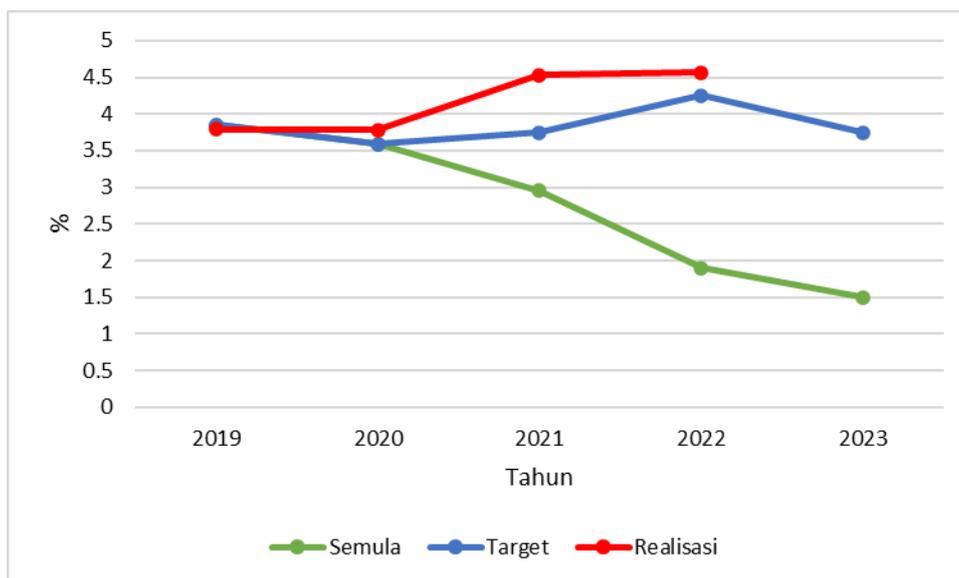
Sumber: RPJMD Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali (2023)

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa tahun 2019 realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tidak mencapai target, dan semakin parah di tahun 2020. Setelah target disesuaikan dan kondisi ekonomi mulai pulih, perlahan

disparitas antara target dan realisasi mulai menyempit. Bahkan di tahun 2022 dan 2023, realisasi laju pertumbuhan ekonomi mampu melampaui target RPJMD Provinsi Bali.

2) **Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan indikator makroekonomi penting yang juga menunjukkan keberhasilan pembangunan. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada persentase kemiskinan di Bali, sehingga target yang awalnya dirancang semakin menurun perlu dilakukan penyesuaian agar realistis.



Gambar 4.13

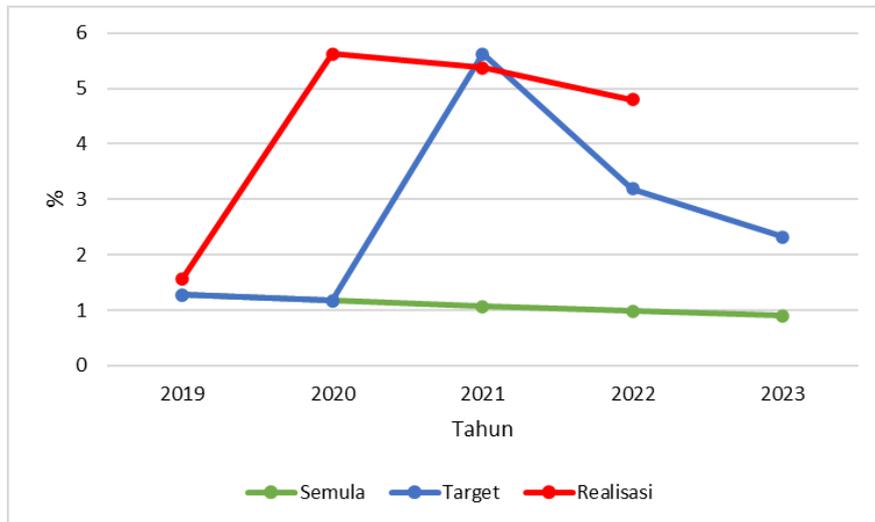
Target dan Capaian Indikator Persentase Kemiskinan Bali

Sumber: RPJMD Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali (2023)

Sebagaimana Gambar 4.13, target persentase kemiskinan telah dikoreksi (dinaikkan), namun hingga tahun 2022, target tersebut belum dapat tercapai.

3) **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Mengingat bahwa sektor pariwisata sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, maka tidak mengherankan bila tingkat pengangguran di Bali juga meningkat signifikan pada periode tersebut. Sehingga Pemerintah Provinsi Bali melakukan sejumlah koreksi atas target TPT.



Gambar 4.14

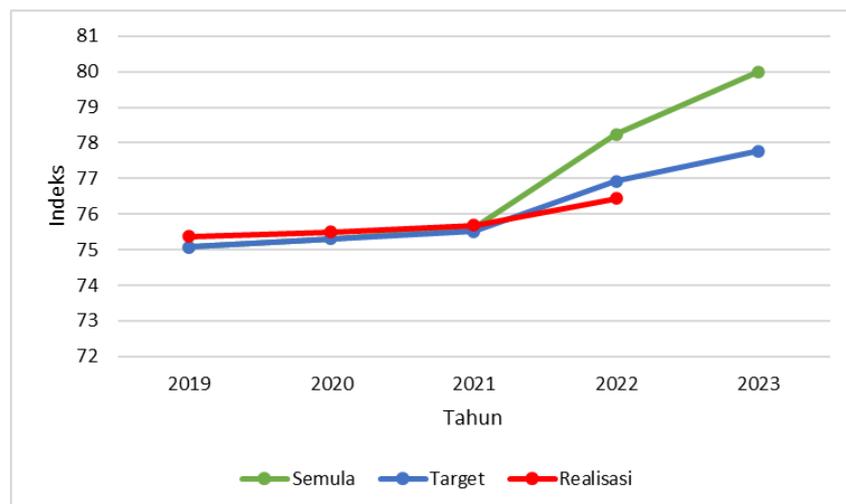
Target dan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Bali

Sumber: RPJMD Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali (2023)

Gambar 4.14 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi disparitas yang tinggi antara target dan realisasi TPT, karena angka TPT melonjak sangat tinggi. Namun pada tahun 2021, target yang telah direvisi mampu dicapai. Hal itu sebagai respon atas keberhasilan Upaya *recovery*, terutama di sektor pariwisata.

4) Indeks Pembangunan Manusia

Target IPM Bali juga perlu dikoreksi mengingat bahwa salah satu indikator IPM adalah terkait ekonomi dan standar hidup.



Gambar 4.15

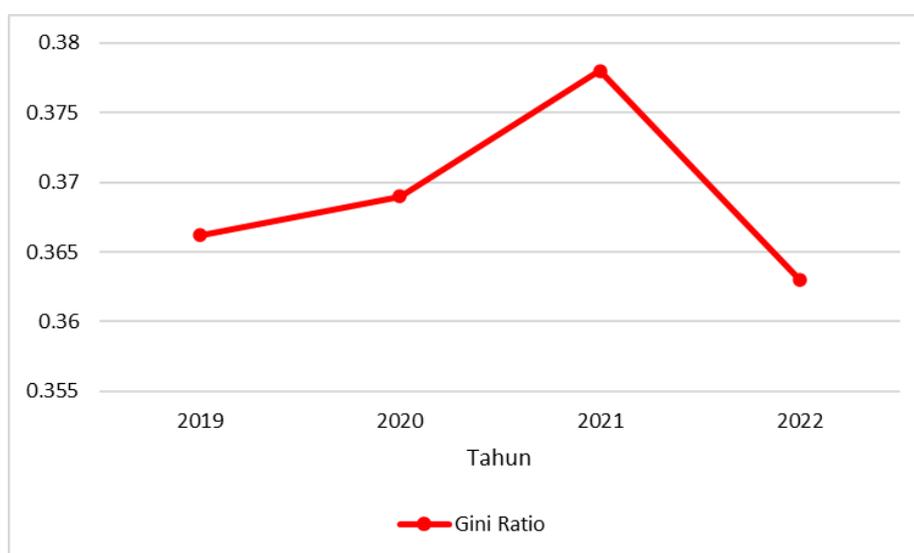
Target dan Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali

Sumber: RPJMD Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali (2023)

Gambar 4.15 menunjukkan bahwa pada tahun 2019, IPM Provinsi Bali masih di atas target, namun pada masa *recovery*, meskipun target telah disesuaikan, namun realisasinya belum dapat mencapai target.

5) **Gini Ratio**

Gini ratio merupakan suatu ukuran pemerataan, dimana secara sederhana dapat diartikan sebagai metode untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi melalui distribusi pendapatan. Indikator ini merupakan salah satu indikator makro ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam surat edaran tentang penyalarsan perencanaan pembangunan.



Gambar 4.16

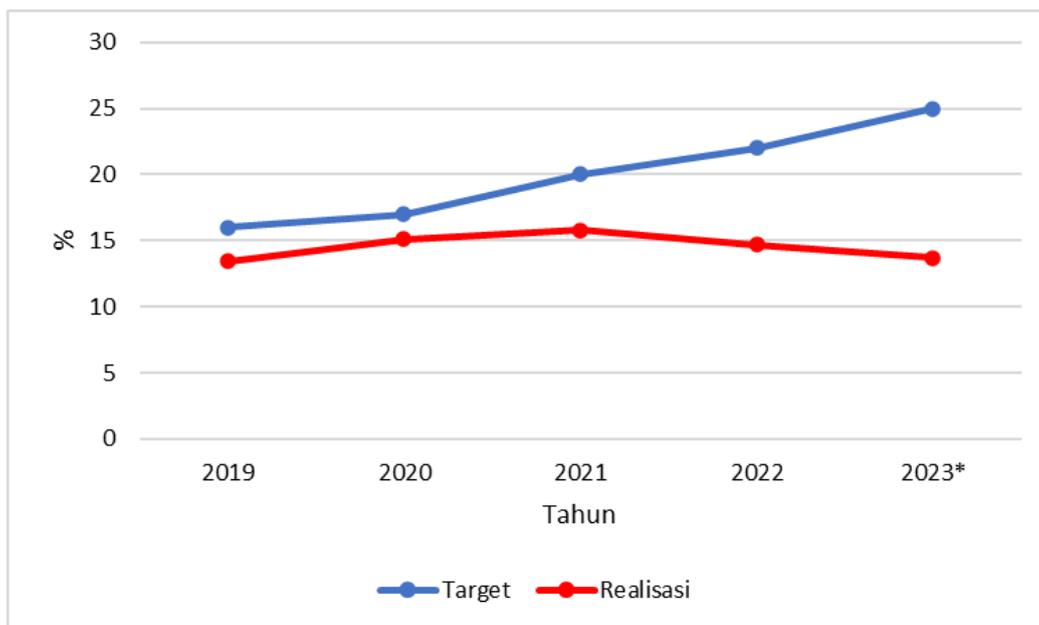
Target dan Capaian Indikator *Gini Ratio* Bali

Sumber: RPJMD Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali (2023)

Gambar 4.16 menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Bali meningkat sejak tahun 2019, dan semakin parah di 2021. Namun kemudian mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2022.

6) **Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Bali**

Transformasi ekonomi Bali salah satunya menempatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan Bali. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Bali juga perlu diperhitungkan.



Ket.: *) angka sementara (Triwulan I)

Gambar 4.17

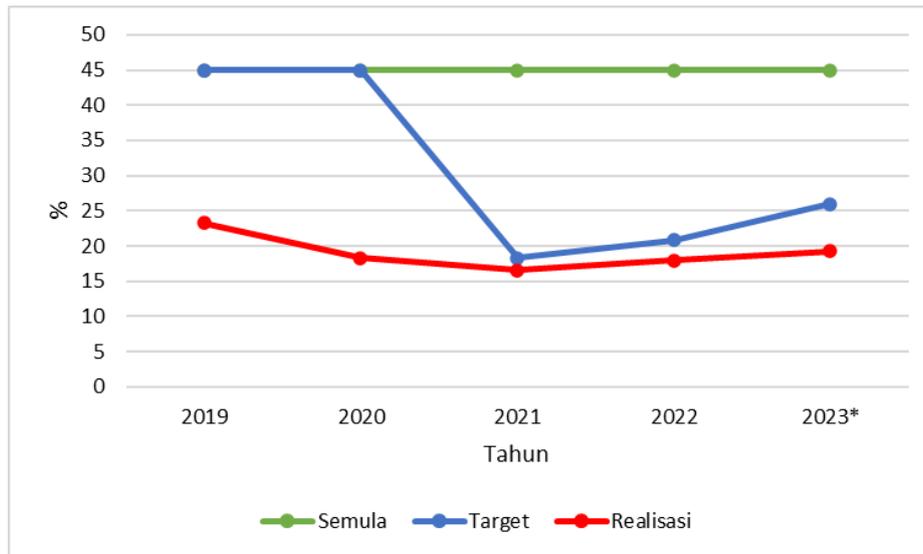
Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Bali

Sumber: RPJMD Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali (2023)

Sebagaimana Gambar 4.17 terlihat bahwa realisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Bali selama lima tahun terakhir belum pernah mencapai target. Disparitas antara realisasi dan target sempat mengecil di tahun 2020 seiring dengan melemahnya kontribusi sektor pariwisata. Namun tiga tahun terakhir justru kontribusi sektor pertanian semakin melebar.

7) Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Bali

Target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Bali juga dikoreksi sesuai dengan perkembangan aktivitas pariwisata Bali. Kontribusi sektor pariwisata di-proxy dengan PDRB sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum. Gambar 4.18 menunjukkan bahwa target kontribusi sektor pariwisata yang telah ditetapkan belum pernah tercapai selama lima tahun terakhir.



Ket.: *) angka sementara (Triwulan I)

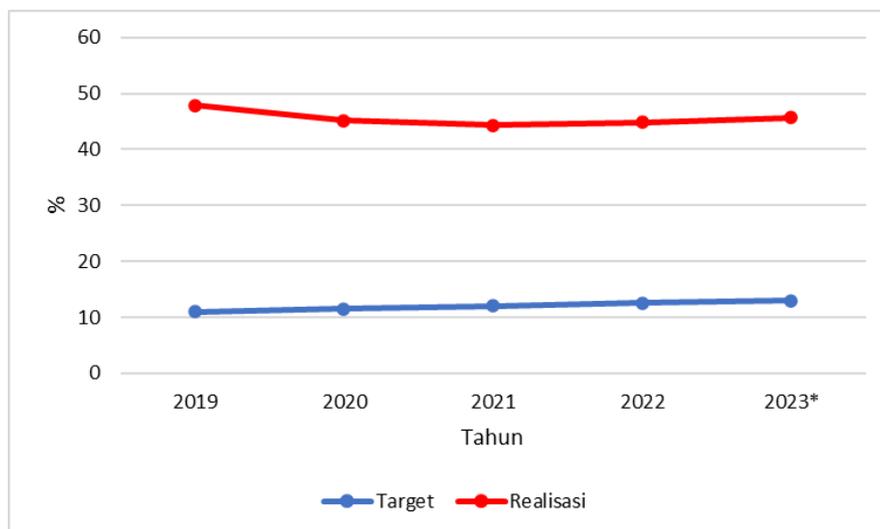
Gambar 4.18

Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Bali

Sumber: RPJMD Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali (2023)

8) Kontribusi Sektor KUMKM Terhadap Perekonomian Bali

Koperasi dan UMKM merupakan sektor riil yang terbukti mampu bertahan dari berbagai guncangan makro ekonomi. Di Indonesia maupun Bali, sektor KUMKM memiliki kontribusi yang tinggi pada perekonomian, yaitu pada kisaran 50% ± 10%.



Ket.: *) angka sementara (Triwulan I)

Gambar 4.19

Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor KUMKM Terhadap PDRB Bali

Sumber: RPJMD Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali (2023)

Sebagaimana Gambar 4.19, bahwa sektor KUMKM berkontribusi di atas 40% terhadap PDRB Bali. Realisasi ini ternyata jauh lebih tinggi daripada target yang ditetapkan (kisaran 10-20%). Oleh karena itu, target kontribusi KUMKM terhadap perekonomian Bali ini perlu ditinjau kembali, terutama kesesuaian sektor/lapangan usaha yang merupakan *proxy* dari sektor KUMKM.

BAB V

DAYA SAING DAERAH

5.1. Tinjauan Daya Saing Daerah (DSD) Provinsi

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah melakukan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) untuk mengukur daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengukuran IDSD 2022 menggunakan empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing.

Adapun rincian skor IDSD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali pada tahun 2022 disajikan pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Skor Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
Provinsi Bali	4,43	2,51	4,78	2,50	3,92	3,85	3,38	3,53	2,96	0,44	5,00	3,39	3,39
Jembrana	4,34	2,08	3,22	2,17	4,00	3,22	4,02	3,26	5,00	0,58	5,00	1,27	3,18
Tabanan	4,46	2,00	3,39	2,57	4,15	3,36	3,92	2,49	4,50	0,95	5,00	1,66	3,20
Badung	4,19	2,86	3,72	2,95	4,23	3,81	4,74	3,44	2,80	1,91	5,00	4,94	3,72
Gianyar	4,53	2,05	3,41	2,53	4,15	3,48	3,94	3,13	3,66	1,13	5,00	1,54	3,21
Klungkung	4,42	2,29	3,04	2,07	3,92	3,08	3,63	2,78	4,93	0,37	5,00	1,17	3,06
Bangli	4,50	2,10	3,09	1,95	3,92	2,73	3,53	2,40	5,00	0,29	5,00	1,27	2,98
Denpasar	4,62	1,99	4,20	2,83	3,92	2,76	5,00	3,03	5,00	0,69	5,00	4,58	3,64
Karangasem	4,41	2,18	3,21	2,39	4,00	3,15	1,83	3,45	2,23	1,43	5,00	1,23	2,88
Buleleng	4,47	2,94	3,73	2,42	4,23	3,76	2,73	4,22	2,19	2,13	5,00	3,29	3,43

Ket.:

Pilar 1: Institusi

Pilar 2: Infrastruktur

Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro

Pilar 5: Kesehatan

Pilar 6: Keterampilan

Pilar 7: Pasar produk

Pilar 8: Pasar tenaga kerja

Pilar 9: Sistem keuangan

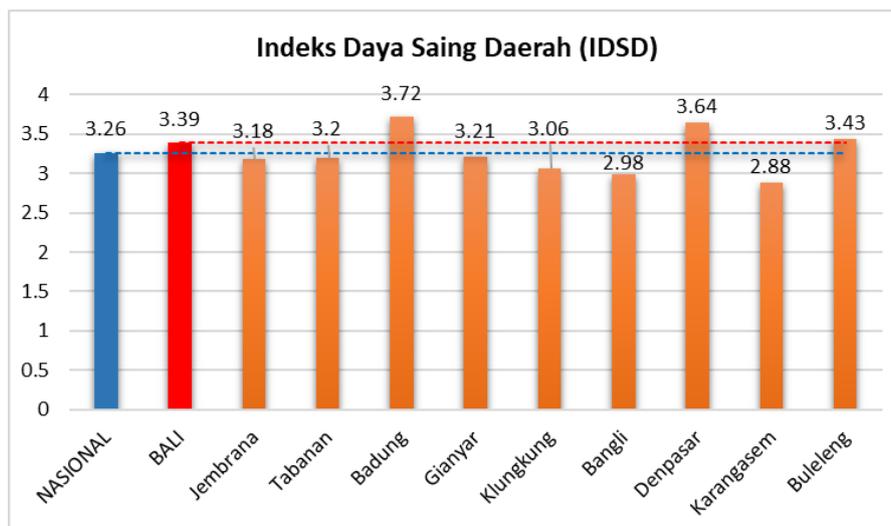
Pilar 10: Ukuran pasar

Pilar 11: Dinamisme bisnis

Pilar 12: Kapabilitas inovasi

Sumber: BRIN, 2023

Untuk memudahkan memotret dan membandingkan kondisi IDSD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali, dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1
Grafik Skor Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

IDSD Bali secara agregat lebih tinggi daripada IDSD nasional, yaitu 3,39. Apabila dilihat pada kabupaten/kota, terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki IDSD lebih tinggi dari Provinsi Bali maupun nasional, berturut-turut yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Buleleng. Sedangkan 6 (enam) kabupaten lainnya memiliki IDSD lebih rendah dari IDSD Provinsi Bali maupun nasional. Adapun kabupaten dengan IDSD terendah yaitu Kabupaten Karangasem.

Secara lebih lengkap, pada sub bab berikutnya diuraikan posisi daya saing Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali pada masing-masing komponen dan pilar.

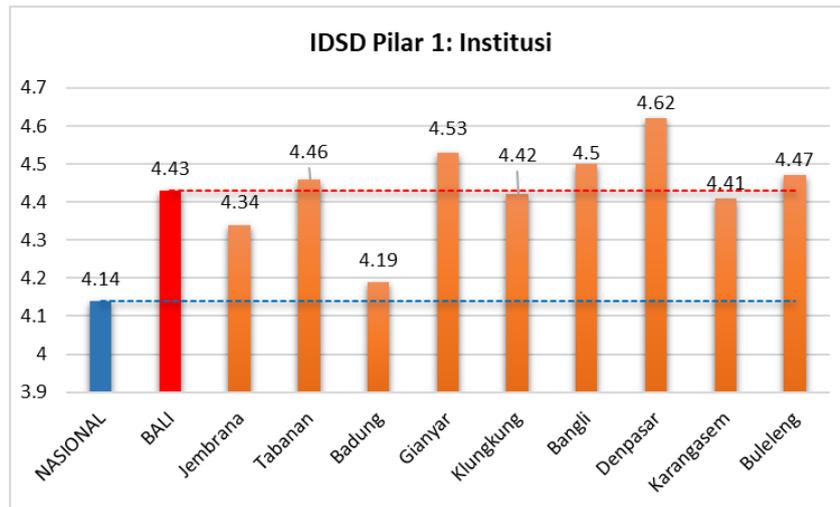
5.2. Tinjauan Pilar Daya Saing Daerah (DSD)

5.2.1. Komponen Lingkungan Pendukung

Terdapat 4 (empat) pilar pembentuk komponen lingkungan pendukung, yaitu institusi, infrastruktur, adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta stabilitas ekonomi makro.

1) Pilar 1: Institusi

Pelaku ekonomi akan berinvestasi di suatu daerah yang memiliki institusi yang membentuk iklim bisnis yang kondusif. Pilar institusi meliputi dimensi keamanan, modal sosial, *check & balances*, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.

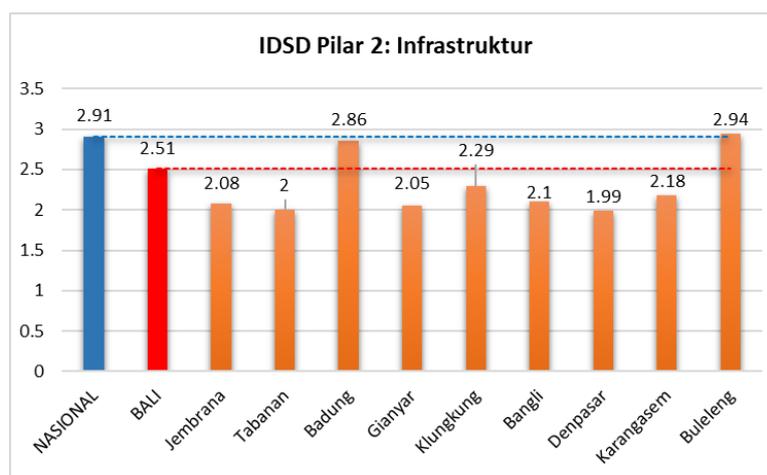


Gambar 5.2
Grafik Skor IDSD Pilar 1 (Institusi) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa skor Pilar Institusi Provinsi Bali berada di atas nilai nasional. Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang bahkan melebihi skor Pilar Institusi Provinsi Bali, dimana yang tertinggi adalah Kota Denpasar, dan terendah adalah Kabupaten Badung.

2) Pilar 2: Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien. Pilar Infrastruktur dibentuk dari dimensi infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur utilitas air minum.

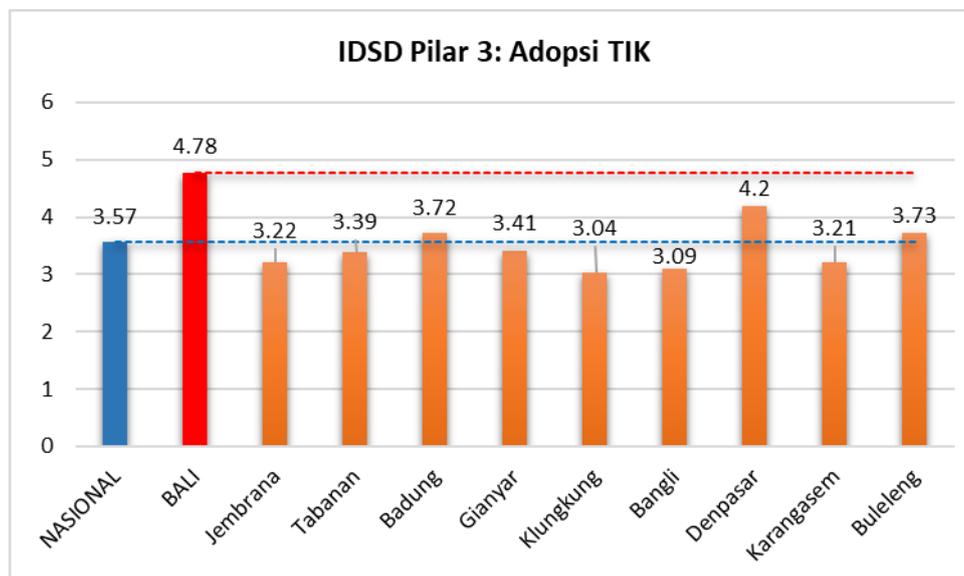


Gambar 5.3
Grafik Skor IDSD Pilar 2 (Infrastruktur) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Skor Pilar Infrastruktur Provinsi Bali masih di bawah skor nasional, sehingga tepat bila memang pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Bali. Hanya Kabupaten Buleleng yang memiliki skor lebih tinggi bila dibandingkan skor Provinsi Bali dan bahkan skor nasional. Disamping Kabupaten Badung yang juga memiliki skor lebih tinggi dari skor Provinsi Bali, namun masih di bawah skor nasional. Daerah dengan skor Pilar Infrastruktur terendah adalah Kota Denpasar. Hal ini tentu perlu diteliti lebih lanjut untuk mengidentifikasi point yang masih rendah dalam pilar ini.

3) Pilar 3: Adopsi TIK

TIK berperan penting dalam era globalisasi, dimana daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif. Sehingga Pilar Adopsi TIK sekaligus merupakan dimensinya, diukur dengan indikator terkait penggunaan telepon seluler dan internet, serta jangkauannya.



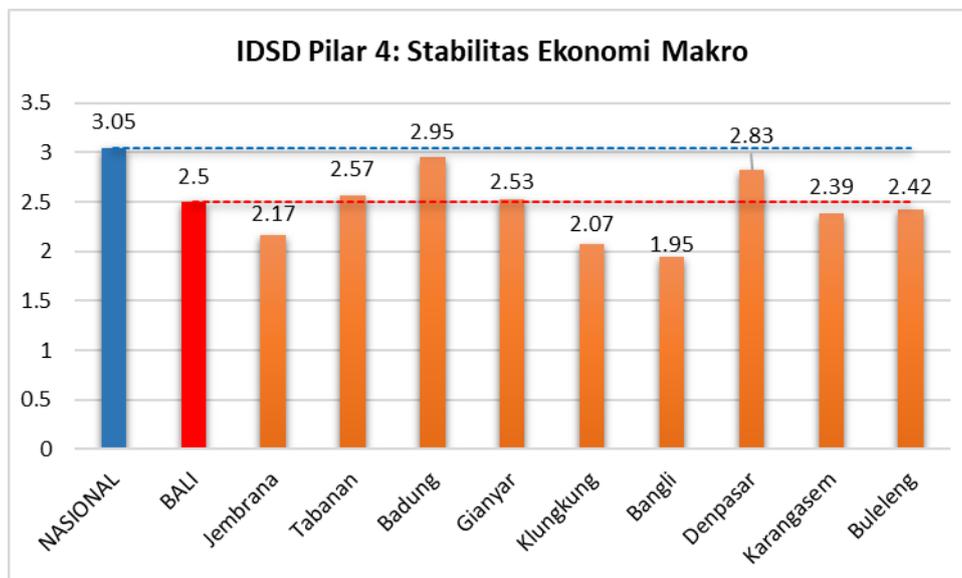
Gambar 5.4
Grafik Skor IDSD Pilar 3 (Adopsi TIK) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Gambar 5.4 menunjukkan bahwa skor Pilar Adopsi TIK Provinsi Bali berada di atas skor nasional, dan belum ada daerah (kabupaten/kota) di

Bali yang mampu menyamai skor Provinsi Bali. Meskipun terdapat tiga daerah yang memiliki skor di atas skor nasional, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Badung. Sedangkan daerah dengan skor Pilar Adopsi TIK terendah adalah Kabupaten Bangli.

4) **Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro**

Ekonomi makro yang stabil dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik lokal maupun mancanegara, untuk berinvestasi di suatu daerah. Indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur pilar ini meliputi kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Ketahanan Pangan, Nilai Investasi, dan PDRB per kapita. Selain itu digunakan juga indikator inflasi untuk mengukur kondisi ekonomi makro pada level provinsi.



Gambar 5.5
Grafik Skor IDSD Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)
Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Secara agregat, skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan skor nasional. Terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang memiliki skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro di atas skor Provinsi Bali, namun masih di bawah skor nasional, yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Gianyar.

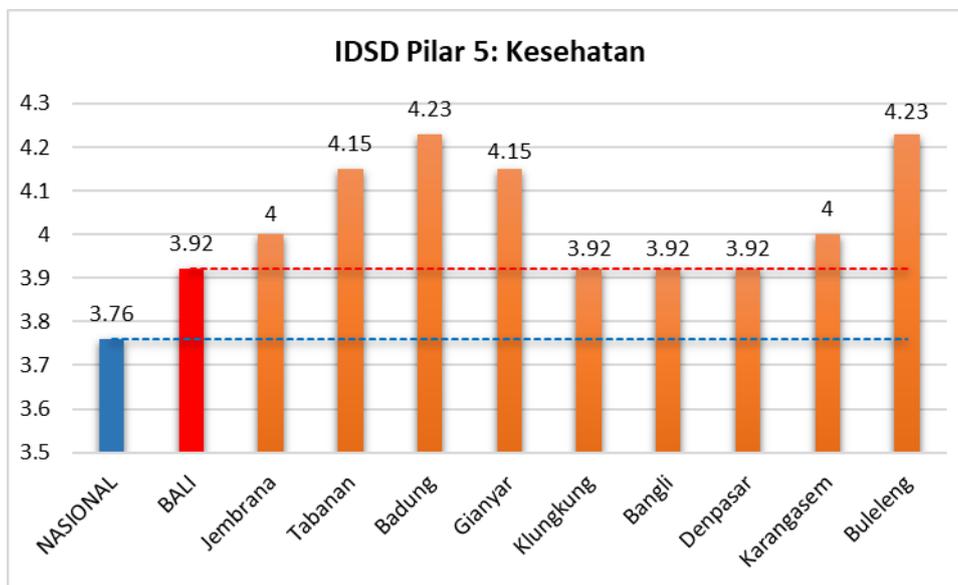
Sedangkan daerah dengan skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro terendah adalah Kabupaten Bangli.

5.2.2. Komponen Sumber Daya Manusia (SDM)

Komponen SDM dibentuk atas 2 (dua) pilar, yaitu pilar Kesehatan dan pilar keterampilan, dimana skornya dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pilar 5: Kesehatan

Penduduk yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dan kreatif. Pilar Kesehatan menggambarkan tahun hidup masyarakat melalui angka harapan hidup (AHH), sehingga pilar ini diukur dengan AHH.

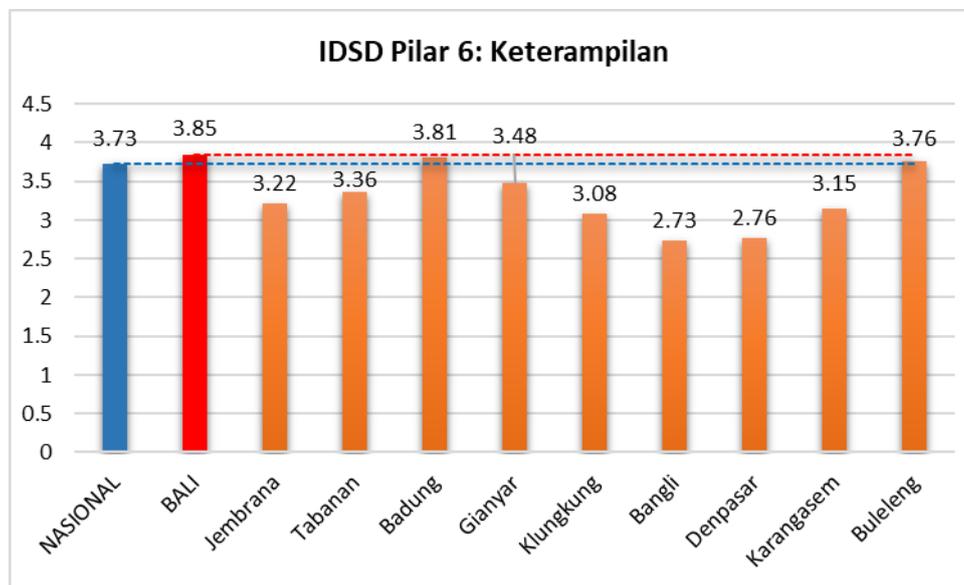


Gambar 5.6
Grafik Skor IDSD Pilar 5 (Kesehatan) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Sebagaimana Gambar 5.6, terlihat bahwa skor Pilar Kesehatan Provinsi Bali memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan skor nasional. Terdapat 6 (enam) kabupaten yang memiliki skor Pilar Kesehatan yang lebih tinggi dari skor Provinsi Bali, sedangkan 3 (tiga) daerah lagi memiliki skor yang sama dengan skor Pilar Kesehatan Provinsi Bali dan merupakan skor terendah, yaitu Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar. Adapun daerah dengan skor Pilar Kesehatan tertinggi yaitu Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng.

2) Pilar 6: Keterampilan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pilar keterampilan mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di suatu wilayah. Keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi sektor bisnis. Adapun dimensi dari Pilar Keterampilan adalah kondisi tenaga kerja saat ini, seperti rata-rata lama sekolah dan keterampilan lulusan, serta dimensi tenaga kerja di masa depan, yang meliputi kemudahan menemukan pekerjaan, angka harapan sekolah, hingga rasio murid-guru.



Gambar 5.7

Grafik Skor IDSD Pilar 6 (Keterampilan) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

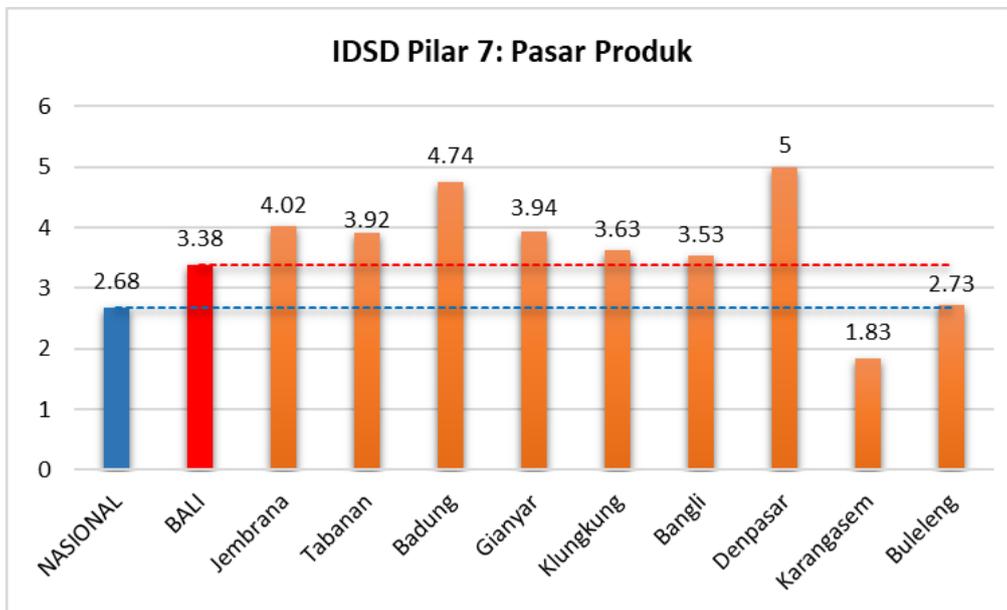
Gambar 5.7 menunjukkan bahwa Skor Pilar Keterampilan Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan skor nasional. Sedangkan skor Pilar Keterampilan seluruh kabupaten/kota di Bali masih di bawah skor Provinsi Bali. Adapun daerah dengan skor Pilar Keterampilan tertinggi adalah Kabupaten Badung, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bangli.

5.2.3. Komponen Pasar

Terdapat 4 (empat) pilar yang membentuk penilaian atas komponen pasar, meliputi pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar.

1) Pilar 7: Pasar produk

Pilar Pasar Produk menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya. Keterbukaan pasar produk akan meningkatkan daya saing sektor bisnis di suatu daerah. Pilar ini memiliki dimensi persaingan domestik, dengan indikator persaingan sektor jasa, ditambah dengan tingkat dominasi pasar untuk Pilar Pasar Produk di level provinsi.

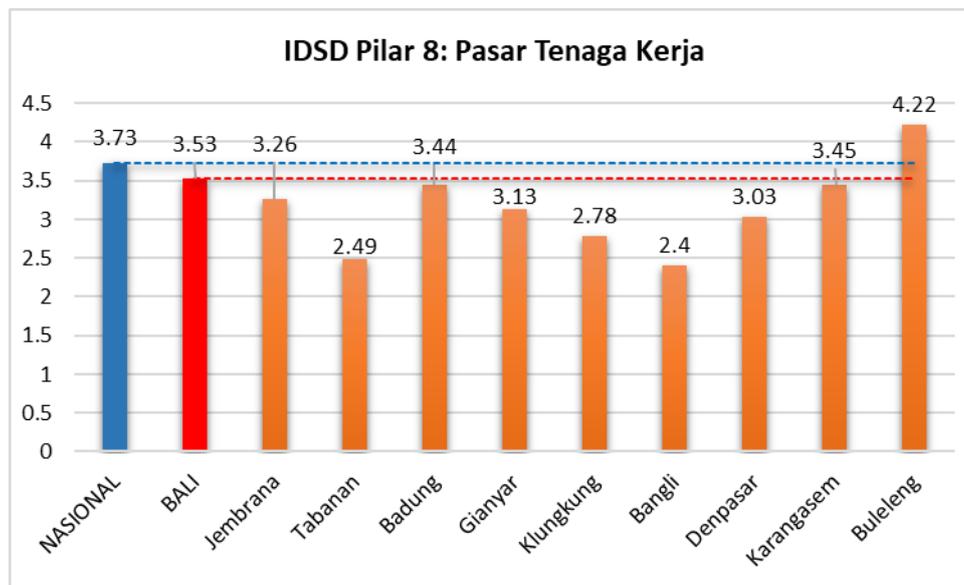


Gambar 5.8
Grafik Skor IDSD Pilar 7 (Pasar Produk) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 5.8 diketahui bahwa skor Pilar Pasar Produk Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan skor nasional. Bahkan terdapat 7 (tujuh) daerah yang memiliki skor Pilar Pasar Produk yang lebih tinggi dibandingkan skor Provinsi Bali. Sedangkan 2 (dua) daerah memiliki skor di bawah skor Provinsi Bali. Daerah dengan skor Pilar Pasar Produk tertinggi adalah Kota Denpasar, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Karangasem.

2) Pilar 8: Pasar tenaga kerja

Pasar tenaga kerja yang efisien ditunjukkan oleh terfasilitasinya kepentingan investor dan tenaga kerja sehingga mendorong produktivitas. Sehingga terdapat 2 (dua) dimensi dalam mengukur Pilar Pasar Tenaga Kerja, yaitu fleksibilitas serta meritokrasi dan insentif. Fleksibilitas diukur dengan kebijakan pasar tenaga kerja dan upah pekerja, sedangkan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki merupakan indikator meritokrasi dan insentif.



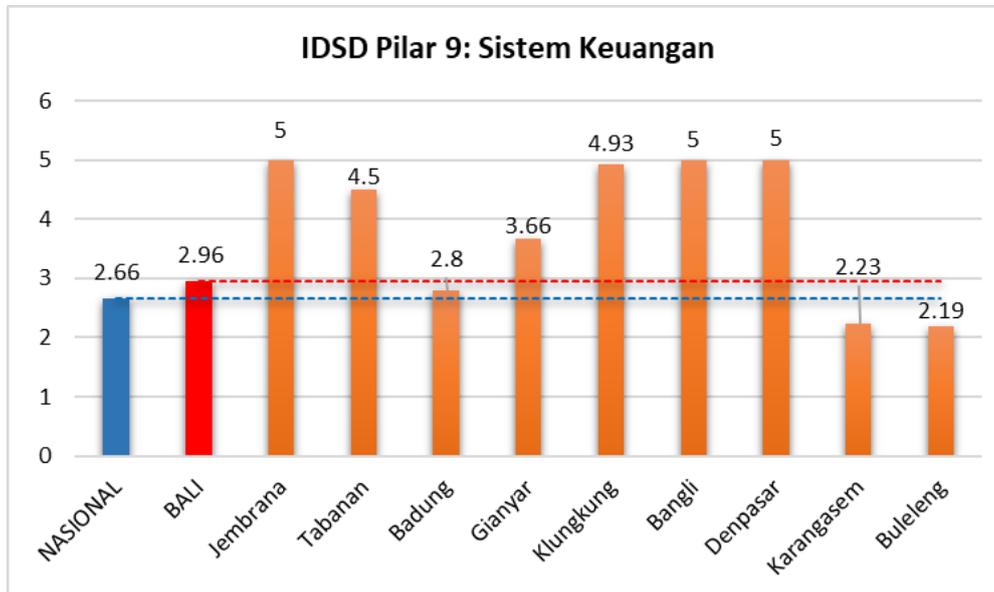
Gambar 5.9
Grafik Skor IDSD Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Gambar 5.9 menunjukkan bahwa Skor Pilar Pasar Tenaga Kerja Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan skor nasional. Hanya Kabupaten Buleleng yang memiliki skor Pilar Pasar Tenaga Kerja yang lebih tinggi dibandingkan skor Provinsi Bali, bahkan skor Nasional. Adapun daerah dengan skor Pilar Pasar Tenaga Kerja terendah adalah Kabupaten Bangli.

3) Pilar 9: Sistem keuangan

Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan efisiensi penggunaan dana, serta membantu lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran. Terdapat 2 (dua) dimensi dalam mengukur sistem keuangan, yaitu dimensi kedalaman (diukur dengan KUR per penduduk

dan pembiayaan Lembaga ventura pada UMKM/start-up untuk level provinsi), dan dimensi stabilitas (diukur dengan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman).

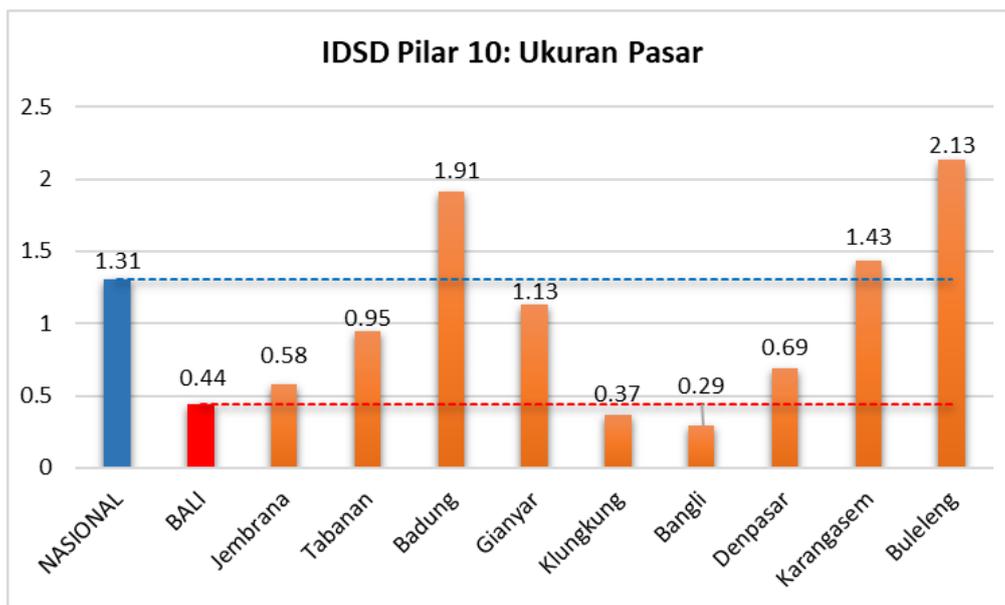


Gambar 5.10
Grafik Skor IDSD Pilar 9 (Sistem Keuangan) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Terkait Pilar Sistem Keuangan, skor Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan skor nasional. Terdapat 6 (enam) daerah dengan skor lebih tinggi dibandingkan skor Provinsi Bali, dan 3 (tiga) daerah lebih rendah dari skor Provinsi Bali, namun salah satunya lebih tinggi dari skor Nasional. Adapun daerah dengan Skor Pila Sistem Keuangan tertinggi yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar. Sedangkan daerah yang memiliki Skor Pilar Sistem Keuangan terendah adalah Kabupaten Buleleng.

4) **Pilar 10: Ukuran pasar**

Ukuran pasar tentunya akan berpeluang meningkatkan produktivitas bisnis dengan mengeksplorasi skala ekonomi. Indikator yang digunakan dalam mengukur pilar ini adalah PDRB dan rasio nilai impor terhadap PDRB (untuk level provinsi).



Gambar 5.11

Grafik Skor IDSD Pilar 10 (Ukuran Pasar) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

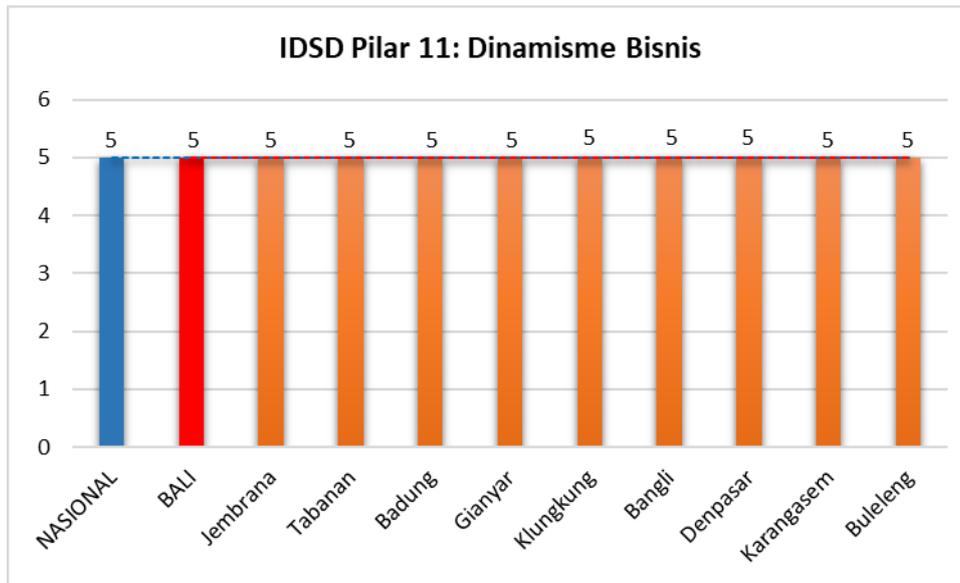
Skor Pilar Ukuran Pasar Provinsi Bali masih jauh di bawah skor nasional, namun di sisi lain beberapa daerah di Bali menunjukkan skor yang baik. Terdapat 7 (tujuh) daerah dengan skor di atas skor Provinsi Bali, bahkan 3 (tiga) diantaranya lebih tinggi dibandingkan skor Nasional, yaitu Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Karangasem. Sedangkan daerah dengan skor Ukuran Pasar terendah yang di bawah skor Provinsi Bali adalah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli.

5.2.4. Komponen Ekosistem Inovasi

Komponen ekosistem inovasi dibentuk atas 2 (dua) pilar yang tentunya terkait inovasi, yaitu pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

1) Pilar 11: Dinamisme bisnis

Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan melakukan bisnis yang dilihat melalui administrasi dan budaya kewirausahaan. Hingga saat ini, indikator yang digunakan untuk mengukur dinamisme bisnis adalah biaya dan waktu untuk memulai usaha.

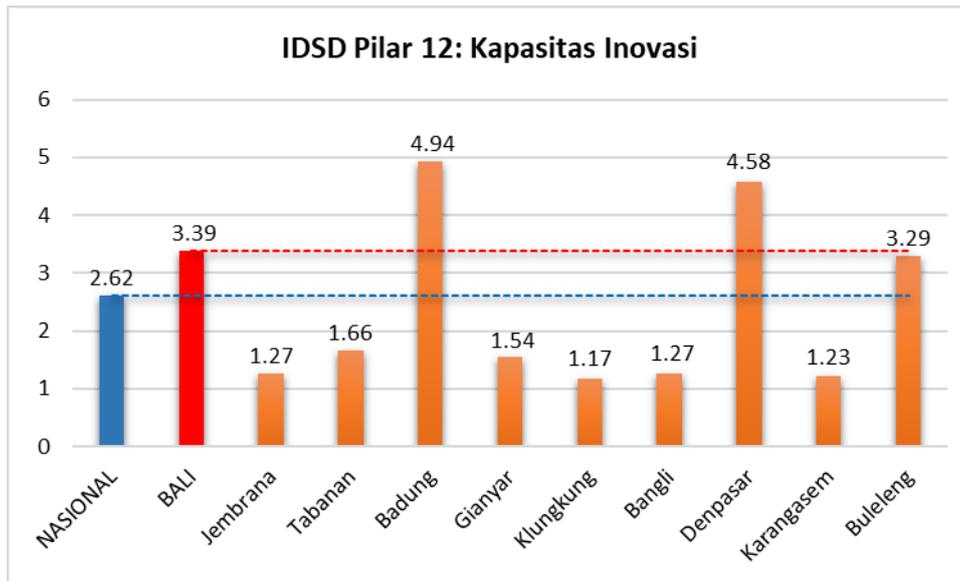


Gambar 5.12
Grafik Skor IDSD Pilar 11 (Dinamisme Bisnis) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Data terkait Pilar Dinamisme Bisnis menggunakan data dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), dimana biaya dan waktu memulai usaha menggunakan standar yang sama. Sehingga skor untuk Pilar Dinamisme Bisnis secara nasional, maupun di seluruh daerah adalah sama, yaitu 5 (lima).

2) **Pilar 12: Kapabilitas inovasi**

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal. Akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang rekombinasi pengetahuan yang menghasilkan ide-ide inovatif dan model bisnis baru. Terdapat tiga dimensi dalam penilaian kapabilitas inovasi, yaitu keanekaragaman dan kolaborasi, riset, serta komersialisasi.



Gambar 5.13
Grafik Skor IDSD Pilar 12 (Kapasitas Inovasi) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Gambar 5.13 menunjukkan bahwa skor Pilar Kapasitas Inovasi Provinsi Bali berada di atas skor Nasional. Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Buleleng adalah 3 (tiga) daerah dengan skor di atas skor Pilar Kapasitas Inovasi Provinsi Bali. Sedangkan 6 (enam) daerah lainnya memiliki skor di bawah skor Provinsi Bali dan skor Nasional, dimana yang terendah adalah Kabupaten Klungkung.

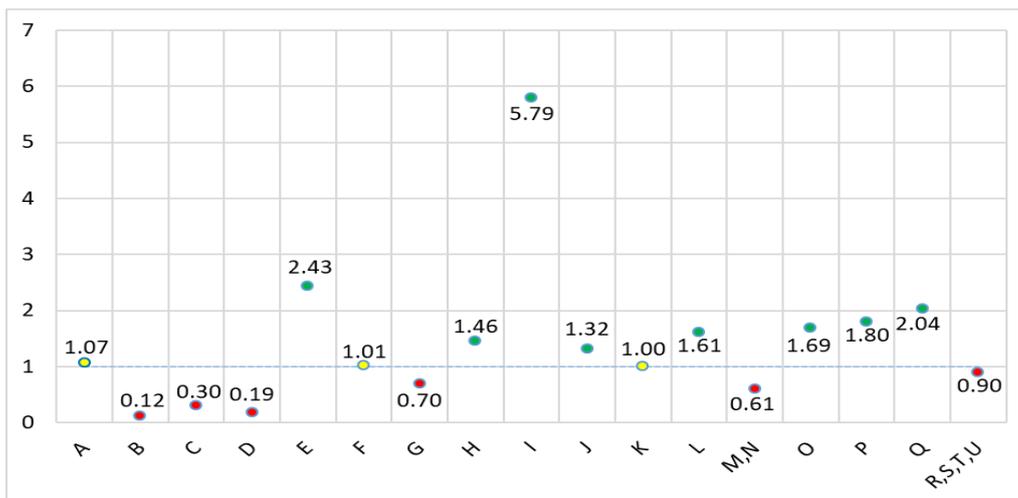
BAB VI

PEMETAAN POTENSI EKONOMI BALI

Penyusunan strategi pembangunan harus memanfaatkan potensi yang ada di suatu daerah. Potensi yang belum diketahui keunggulannya sulit untuk dikembangkan. Sehingga penting dilakukan analisis sektor ekonomi yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan spesialisasi untuk dikembangkan secara lebih cepat dalam Pembangunan ekonomi (Widyaningrum dan Cahyono, 2020). Pemetaan potensi ekonomi Bali dalam hal ini dilakukan dengan beberapa teknik analisis dan menggunakan data kondisi 10 tahun terakhir.

6.1. Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Provinsi Bali, digunakan alat analisis Location Quotient (LQ). Metode LQ adalah salah satu pendekatan umum yang digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Provinsi Bali yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Hasil analisis LQ Provinsi Bali disajikan pada Lampiran 4. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil analisis LQ diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori (yaitu $LQ > 1$, $LQ = 1$, atau $LQ < 1$). Adapun hasil analisis LQ dapat dipetakan pada Gambar 6.1.



Ket.: A s.d. U = 17 sektor lapangan usaha

Gambar 6.1
Peta Hasil Analisis LQ Provinsi Bali

Gambar 6.1 menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) sektor yang merupakan sektor basis ($LQ > 1$) dalam perekonomian Bali, berturut-turut yaitu sektor: (1) penyediaan akomodasi dan makan minum (I); (2) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (E); (3) jasa kesehatan dan kegiatan sosial (Q); (4) jasa pendidikan (P); (5) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial warga (O); (6) real estate (L); (7) transportasi dan perdagangan (H); dan (8) informasi dan komunikasi (J).

6.2. Peta Potensi Ekonomi dengan Tipologi Klassen

Sebelum melakukan analisis dengan pendekatan Tipologi Klassen, harus dilakukan perhitungan rata-rata pertumbuhan tiap sektor, dimana perbandingan nilai tersebut dengan nilai nasional akan memberikan informasi tentang potensi pendapatan tiap sektor.

Tabel 6.1
Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Bali dan Nasional
Tahun 2013-2022

Sektor Lapangan Usaha		Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektor	
		Bali (ri)	Nasional (r)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.24	3.29
B	Pertambangan dan Penggalian	-0.04	1.10
C	Industri Pengolahan	4.04	3.53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.29	3.83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.71	4.94
F	Konstruksi	4.54	4.49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.08	3.69
H	Transportasi dan Pergudangan	1.28	5.85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.45	4.45
J	Informasi dan Komunikasi	6.24	9.03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.93	5.40
L	Real Estate	4.34	4.00
MN	Jasa Perusahaan	5.09	6.42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.82	2.86
P	Jasa Pendidikan	6.11	4.28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.49	7.52
RSTU	Jasa lainnya	5.30	6.72

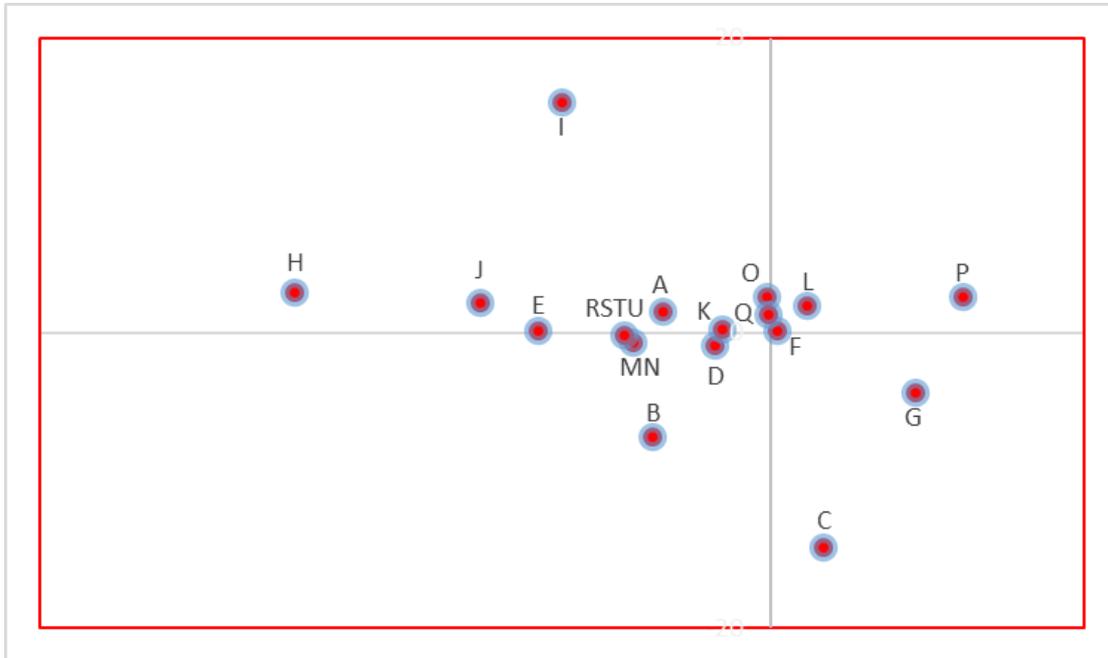
Selain itu, dalam melakukan analisis Tipologi Klassen juga perlu disiapkan data rata-rata kontribusi masing-masing sektor di Provinsi Bali. Adapun perbandingan nilai rata-rata kontribusi tiap sektor lapangan usaha di Provinsi Bali dibandingkan nilai nasional menunjukkan kemampuan mengelola potensi. Hasil perhitungan rata-rata kontribusi tiap sektor dibandingkan data nasional disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Rata-rata Laju Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Bali dan Nasional Terhadap PDRB/PDB Tahun 2013-2022

Sektor Lapangan Usaha		Rata-rata PDRB Sektor	
		Bali (yi)	Nasional (y)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.22	12.77
B	Pertambangan dan Penggalian	1.05	8.07
C	Industri Pengolahan	6.60	21.10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.21	1.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.22	0.08
F	Konstruksi	10.01	9.84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.24	13.28
H	Transportasi dan Pergudangan	6.70	3.94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.66	2.96
J	Informasi dan Komunikasi	7.32	5.27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.26	3.99
L	Real Estate	4.84	2.95
MN	Jasa Perusahaan	1.12	1.73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.88	3.37
P	Jasa Pendidikan	5.57	3.11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.45	1.18
RSTU	Jasa lainnya	1.64	1.72

Selanjutnya berdasarkan Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 dapat disusun posisi tiap sektor pada diagram *scatter* sebagaimana disajikan pada Gambar 6.2. Gambar 6.2 menyajikan *scatter plot* dengan berpatokan pada titik tengah nol, sehingga untuk memudahkan dapat disajikan sesuai dengan kuadran umum dalam Tipologi Klassen. Selaras dengan yang telah dijelaskan pada metodologi bahwa dengan

tipologi Klassen maka dapat dipetakan potensi sektor ekonomi untuk memperoleh gambaran sektor yang maju dan tumbuh pesat, sektor yang stagnan, sektor potensial, atau sektor yang relatif tertinggal.



Ket.: A s.d. U = 17 sektor lapangan usaha

Gambar 6.2
Diagram *Scatter* Analisis Tipologi Klassen Provinsi Bali

Berdasarkan data PDB Indonesia dan PDRB Provinsi Bali tahun 2018-2022 yang telah dihitung pertumbuhan dan kontribusinya tiap sektornya, sebagaimana Tabel 6.1, maka dapat disusun peta potensi dalam kuadran hasil analisis Tipologi Klassen disajikan dalam Gambar 6.3. Gambar 6.3 menyajikan berdasarkan 17 sektor lapangan usaha.

Berdasarkan hasil pemetaan potensi sektor dengan analisis Tipologi Klassen, diketahui bahwa sektor yang maju dan tumbuh pesat di Provinsi Bali adalah sektor konstruksi, real estate, dan jasa pendidikan. Sebagian besar sektor usaha berada pada *stagnant sector*, yaitu: (1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Sektor Transportasi dan Pergudangan; (4) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (5) Sektor Informasi dan Komunikasi; (6) Sektor Jasa Keuangan dan

Asuransi; (7) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (8) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Adapun sektor yang merupakan sektor potensial adalah industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran. Sektor yang termasuk *underdeveloped sector* yaitu: (1) Sektor Pertambangan dan Penggalian; (2) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Sektor Jasa Perusahaan; dan (4) Sektor Jasa lainnya.

Kuadran I Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat $r_i \geq r$ dan $y_i \geq y$ (Developed Sector)	Kuadran II Sektor maju tapi tertekan $r_i < r$ dan $y_i > y$ (Stagnant Sector)
F. Konstruksi L. Real Estate P. Jasa Pendidikan	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan dan Asuransi O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Kuadran III Sektor potensial/masih dapat berkembang $r_i > r$ dan $y_i < y$ (Developing Sector)	Kuadran IV Sektor 79relatif tertinggal $r_i < r$ dan $y_i < y$ (Underdeveloped Sector)
C. Industri Pengolahan G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	B. Pertambangan dan Penggalian D. Pengadaan Listrik dan Gas MN. Jasa Perusahaan RSTU. Jasa lainnya

Gambar 6.3
Klasifikasi Sektor PDRB Provinsi Bali Tahun 2018-2022
Hasil Analisis Tipologi Klassen

6.3. Pemetaan Sektor Berdasarkan *Forward Linkage* dan *Backward Linkage*

Keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) atau disebut juga daya penyebaran menunjukkan besarnya output domestik yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan 1 unit permintaan akhir dari suatu sektor tertentu. Semakin tinggi keterkaitan kebelakang suatu sektor berarti semakin tinggi kemampuan sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi indeks daya penyebaran (IBLj) suatu sektor ekonomi akan semakin besar pula pengaruh sektor tersebut terhadap pertumbuhan sektor-sektor lainnya, yang berarti pula bahwa keterkaitan/ketergantungan sektor tersebut terhadap sektor lainnya cukup besar.

Keterkaitan antar-sektor juga dapat dilihat dari besarnya output yang dihasilkan oleh suatu sektor sebagai akibat dari peningkatan permintaan akhir seluruh sektor ekonomi. Keterkaitan antar-sektor ini disebut dengan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) atau derajat kepekaan suatu sektor. Indeks derajat kepekaan (IFLj) merupakan ukuran total dampak terhadap output suatu sektor akibat penggunaan output sektor tersebut oleh sektor lainnya sebagai input. Semakin tinggi nilai indeks derajat berarti semakin tinggi pula daya kepekaan sektor tersebut karena pertumbuhan sektor-sektor lain yang menggunakan sektor tersebut untuk proses produksinya.

Hubungan kait mengkait antar-sektor dapat ditelaah melalui nilai IBLj dan IFLi. Kaidah umum untuk menentukan sektor kunci dalam perekonomian adalah dengan mensyaratkan nilai IBLj dan IFLi harus lebih besar daripada 1, dan nilai IFLi harus lebih besar daripada nilai IBLj.

Berdasarkan Tabel IO Provinsi Bali, maka dapat dipetakan posisi masing-masing sektor industri (berdasarkan 52 sektor industri) ke dalam kuadran tersebut diharapkan bisa menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Kuadran II (Indeks FL>1 dan Indeks BL<1)	Kuadran I (Indeks FL>1 dan Indeks BL>1)
I-01 Pertanian Tanaman Pangan I-04 Peternakan I-11 Pertambangan dan Penggalian Lainnya I-32 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya I-35 Angkutan Darat I-43 Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	I-17 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dsj I-28 Ketenagalistrikan I-33 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor I-38 Angkutan Udara I-40 Penyediaan Akomodasi I-41 Penyediaan Makan Minum I-42 Jasa Informasi dan Komunikasi I-47 Real Estate I-48 Jasa Perusahaan I-52 Jasa Lainnya
I-02 Pertanian Tanaman Holtikultura, Semusim, Holtikultura Tahunan, dan Lainnya I-03 Perkebunan Semusim dan Tahunan I-05 Jasa Pertanian dan Perburuan I-06 Kehutanan dan Penebangan Kayu I-07 Perikanan I-08 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi I-09 Pertambangan Batubara dan Lignit I-10 Pertambangan Bijih Logam I-12 Industri Batubara dan Pengilangan Migas I-14 Industri Pengolahan Tembakau I-18 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman I-20 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik I-22 Industri Logam Dasar I-23 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik I-24 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL I-34 Angkutan Rel I-44 Asuransi dan Dana Pensiun I-46 Jasa Penunjang Keuangan I-50 Jasa Pendidikan I-51 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	I-13 Industri Makanan dan Minuman I-15 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi I-16 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki I-19 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional I-21 Industri Barang Galan Bukan Logam I-25 Industri Alat Angkutan I-26 Industri Furnitur I-27 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan I-29 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang I-31 Konstruksi I-36 Angkutan Laut I-37 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan I-39 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos, dan Kurir I-45 Jasa Keuangan Lainnya I-49 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Kuadran III (Indeks FL<1 dan Indeks BL<1)	Kuadran IV (Indeks FL<1 dan Indeks BL>1)

Gambar 6.4
Identifikasi Industri Unggulan Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO

Gambar 6.4 menunjukkan bahwa terdapat 10 Industri yang termasuk ke dalam kuadran I. Ke-10 Industri pada kuadran I itu memiliki keterkaitan ke depan (forward Linkage) dan keterkaitan ke belakang (backward linkage) yang tinggi. Selanjutnya ada 6 industri yang termasuk ke dalam kuadran II, 20 Industri dalam kuadran III dan 16 Industri dalam kuadran IV.

BAB VII

NILAI TAMBAH PEMBANGUNAN EKONOMI BALI

Gambaran mengenai nilai tambah Pembangunan ekonomi Bali akan ditinjau melalui Nilai Tambah Bruto (NTB), serta membandingkannya dengan peranan output sektor. Data yang digunakan adalah berdasarkan Tabel Input-Output Provinsi Bali Tahun 2016, Tahun Anggaran 2021. Dalam klasifikasi Tabel Input-Output, terdapat 52 industri, yang dapat dikonkordasi dalam 17 lapangan usaha sebagaimana Lampiran 3.

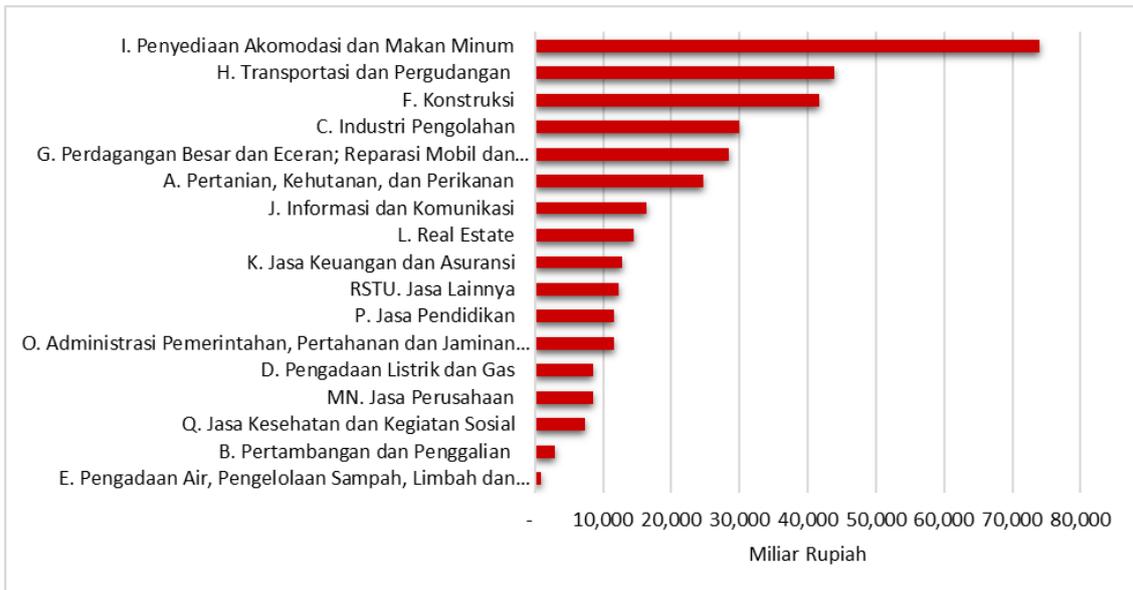
7.1. Struktur Output Perekonomian Provinsi Bali

Struktur output dapat menggambarkan peranan output perekonomian dalam perekonomian. Tabel 7.1 menyajikan output perekonomian Bali dalam 17 lapangan usaha.

Tabel 7.1
Struktur Output Perekonomian Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO

Lapangan Usaha	Output	
	Miliar Rupiah	Persentase
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,717	7.06
B. Pertambangan dan Penggalian	2,984	0.85
C. Industri Pengolahan	30,003	8.57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,521	2.43
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	866	0.25
F. Konstruksi	41,616	11.89
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,442	8.13
H. Transportasi dan Pergudangan	43,962	12.56
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73,925	21.12
J. Informasi dan Komunikasi	16,352	4.67
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	12,813	3.66
L. Real Estate	14,527	4.15
MN. Jasa Perusahaan	8,465	2.42
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,590	3.31
P. Jasa Pendidikan	11,619	3.32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,323	2.09
RSTU. Jasa Lainnya	12,323	3.52
Jumlah	350,047	100.00

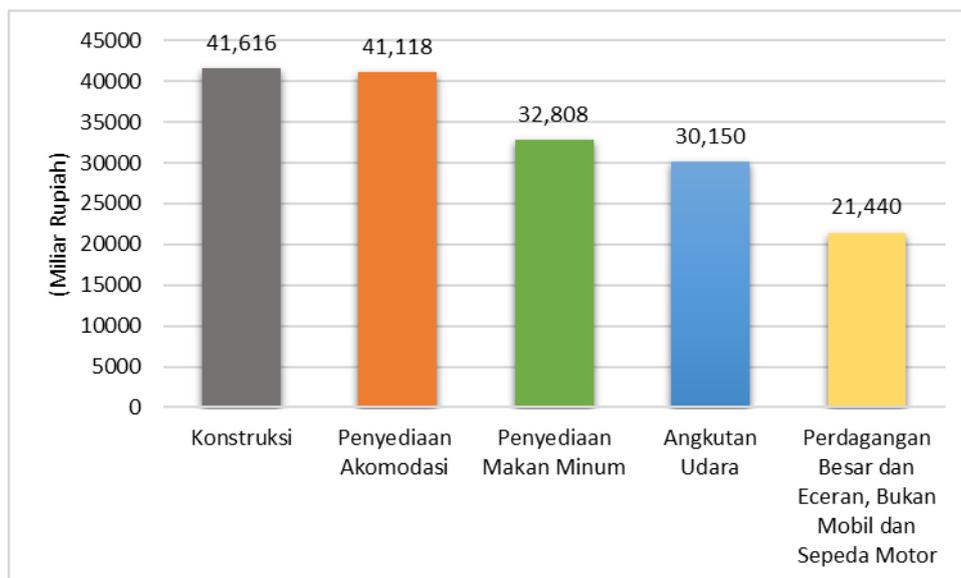
Lebih jelasnya, Gambar 7.1 berikut menyajikan grafik peringkat output perekonomian Bali berdasarkan 17 lapangan usaha.



Gambar 7.1
Peringkat Output Perekonomian Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO

Sebagaimana Tabel 7.1 maupun Gambar 7.1 terlihat bahwa penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki nilai output tertinggi, dengan distribusi sekitar 21,12% terhadap total output. Seperti kita ketahui bahwa motor penggerak perekonomian Bali adalah sektor pariwisata sehingga wajar bila output sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki nilai tertinggi. Hal ini juga menunjukkan pengeluaran wisatawan yang cukup besar, seperti konsumsi di restoran, di samping konsumsi oleh Masyarakat Bali sendiri. Lapangan usaha selanjutnya adalah sektor transportasi dan pergudangan (12,56%), serta konstruksi (11,89%).

Untuk memotret secara lebih detail berdasarkan 52 sektor industri, maka Gambar 7.2 berikut menyajikan 5 (lima) sektor industri dengan nilai output tertinggi pada perekonomian Bali. Gambar 7.2 menunjukkan bahwa bila ditinjau dari 52 sektor industri, maka sektor industri yang memberikan output utama adalah sektor konstruksi, diikuti oleh penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, angkutan udara, serta perdagangan besar dan eceran.



Gambar 7.2
Peringkat Output 5 (Lima) Sektor Industri Utama Provinsi Bali
Berdasarkan Tabel IO

7.2. Struktur Nilai Tambah Bruto (NTB) Provinsi Bali

Struktur Nilai Tambah Bruto (NTB), baik menurut lapangan usaha (sektor) maupun komponennya, berguna untuk melihat peranan masing-masing sektor dalam menciptakan nilai tambah (Sudarma dan Nursetyohadi, 2010). Berdasarkan Tabel Input-Output Provinsi Bali Tahun 2016 dapat diketahui bahwa total NTB seluruh sektor ekonomi mencapai 192.827 miliar rupiah.

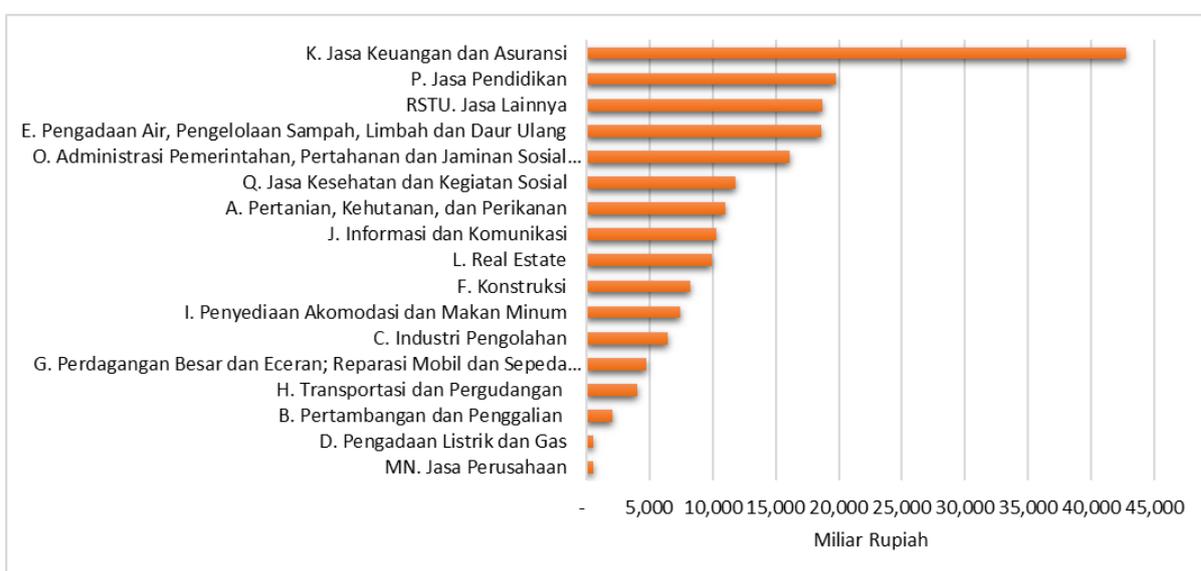
Tabel 7.2 menyajikan NTB Bali dalam 17 lapangan usaha.

Tabel 7.2
Nilai Tambah Bruto Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO

Lapangan Usaha	Nilai Tambah Bruto	
	Miliar Rupiah	Persentase
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,987	5.70
B. Pertambangan dan Penggalian	2,049	1.06
C. Industri Pengolahan	6,424	3.33
D. Pengadaan Listrik dan Gas	547	0.28
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,572	9.63
F. Konstruksi	8,193	4.25
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,728	2.45
H. Transportasi dan Pergudangan	4,015	2.08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,455	3.87

Lapangan Usaha	Nilai Tambah Bruto	
	Miliar Rupiah	Persentase
J. Informasi dan Komunikasi	10,327	5.36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	42,750	22.17
L. Real Estate	9,959	5.16
MN. Jasa Perusahaan	493	0.26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,128	8.36
P. Jasa Pendidikan	19,737	10.24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,806	6.12
RSTU. Jasa Lainnya	18,655	9.67
Jumlah	192,827	100.00

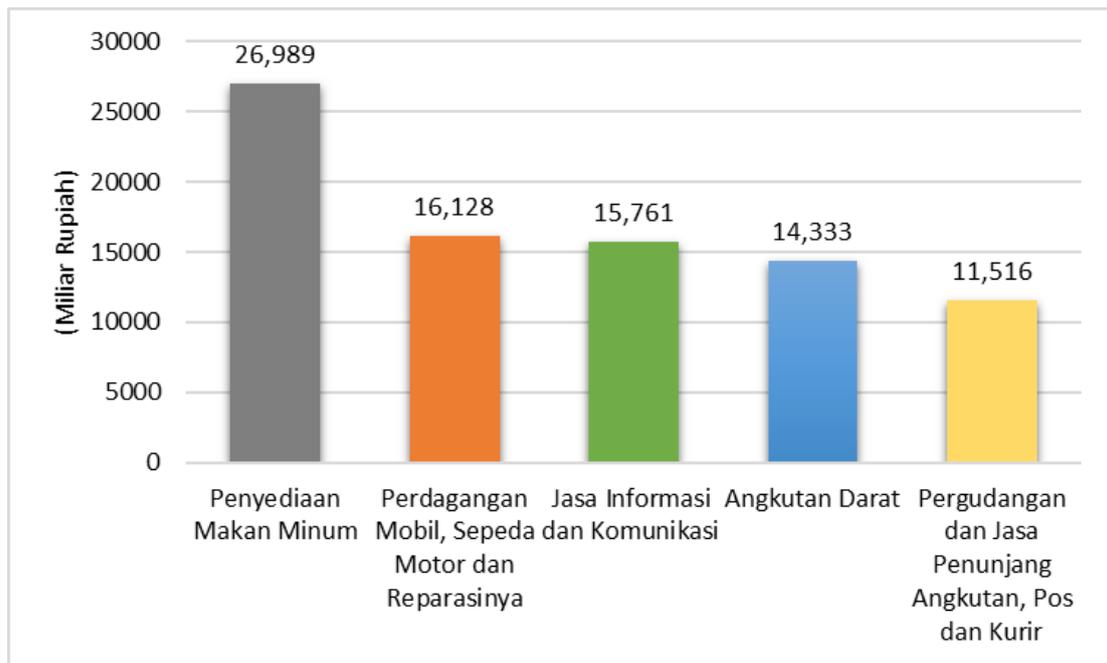
Untuk memotret peringkat tiap sektor, Gambar 7.3 berikut menyajikan grafik Nilai Tambah Bruto Provinsi Bali.



Gambar 7.3
Peringkat Nilai Tambah Bruto Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO

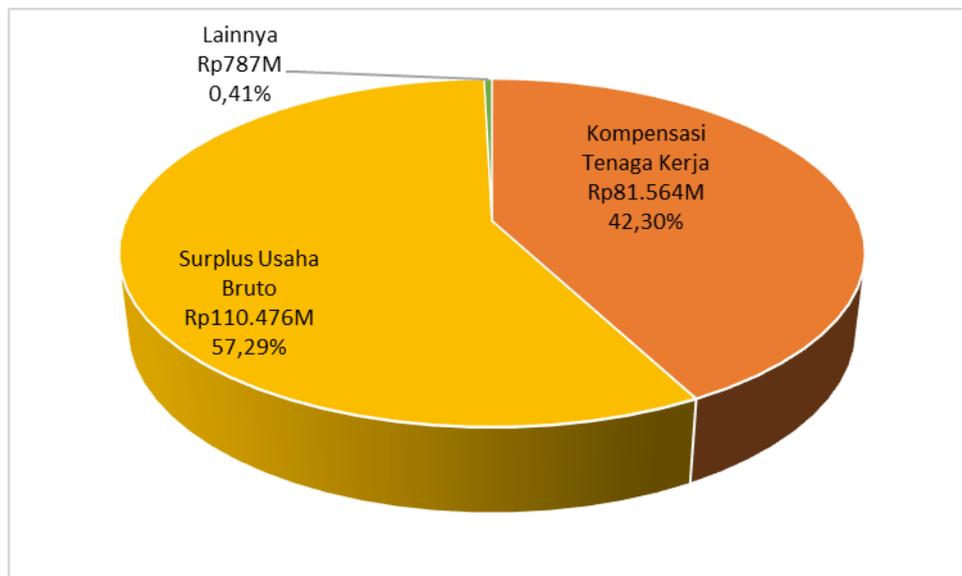
Tabel 7.2 maupun Gambar 7.3 terlihat bahwa nilai tambah tertinggi diberikan oleh sektor jasa keuangan dan asuransi (22,07%). Selain itu diikuti pula oleh sektor jasa pendidikan dengan share 10,24%. Selanjutnya perlu juga disajikan terkait lima sektor industri utama (diantara 52 sektor industr) yang memiliki nilai tambah bruto yang tinggi.

Gambar 7.4 menunjukkan bila ditinjau dari 52 sektor industri, maka nilai tambah tertinggi diberikan oleh sektor penyediaan makan minum, perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya, diikuti oleh jasa informasi dan komunikasi.



Gambar 7.4
Peringkat Nilai Tambah Bruto 5 (Lima) Sektor Industri Utama Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO

Terkait dengan komposisi nilai tambah tersebut, terdiri dari kompensasi tenaga kerja, surplus usaha, dan lainnya. Jika dijabarkan lebih rinci seperti ditampilkan pada Gambar 7.5.



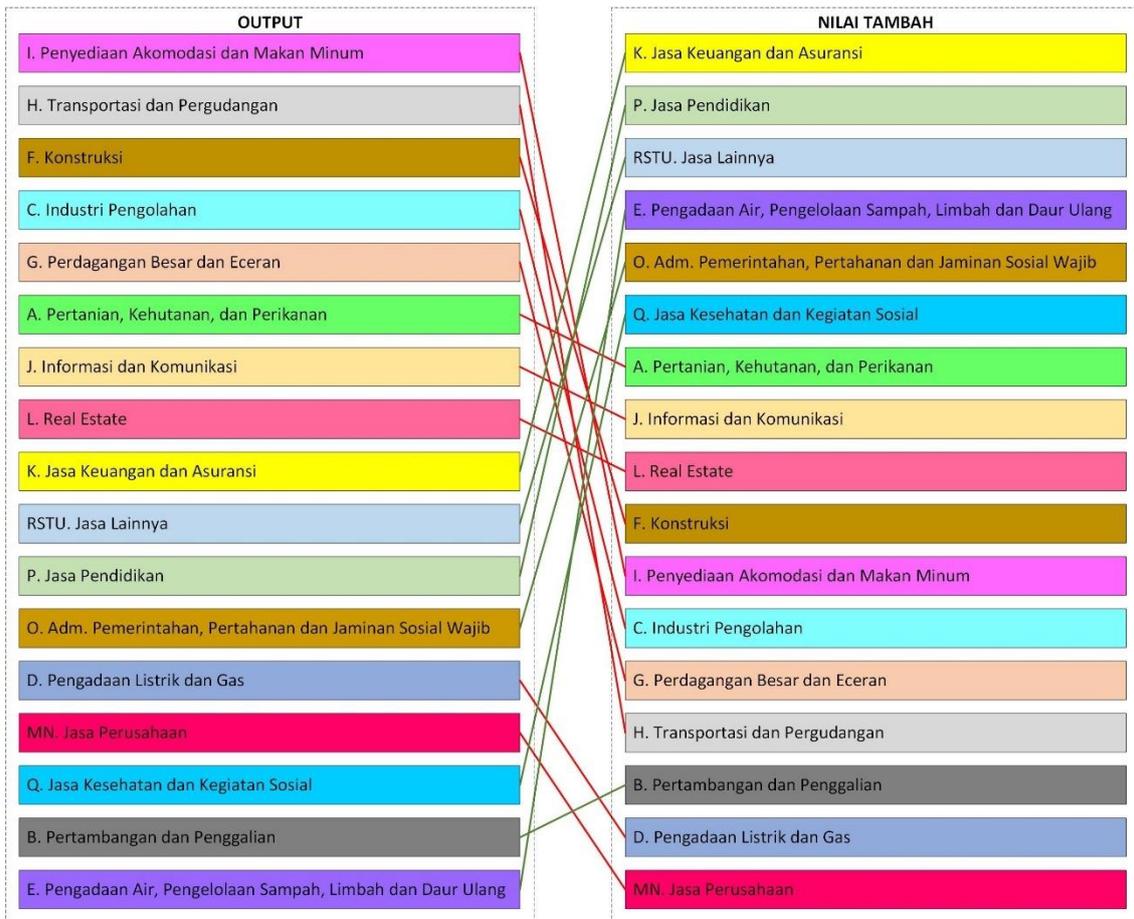
Gambar 7.5
Distribusi Nilai Tambah Bruto di Bali Berdasarkan Tabel IO

Nilai Tambah Bruto tersebut terdiri dari 81.564 miliar rupiah yang berupa kompensasi tenaga kerja, 110.476 miliar rupiah untuk surplus usaha bruto, serta sisanya 787 miliar rupiah untuk komponen nilai tambah lainnya. Besaran surplus usaha mendominasi komponen Nilai Tambah Bruto, yaitu mencapai 57,29 persen, sedangkan kompensasi tenaga kerja tercatat sebesar 42,30 persen, dan sekitar 0,41 persen yang merupakan komponen nilai tambah lainnya. Gambaran ini mencerminkan bahwa jumlah kewirausahaan (*entrepreneur*) di Provinsi Bali cukup banyak, terutama yang berskala menengah ke bawah, sehingga komponen surplus usaha secara keseluruhan lebih banyak dibandingkan dengan komponen upah/gaji.

7.3. Perbandingan Peringkat Output dan Nilai Tambah Bruto (NTB) Provinsi Bali

Sebagaimana yang telah disajikan pada tabel maupun grafik output dan nilai tambah sebelumnya, dapat diamati bahwa terdapat perbedaan peringkat output dan nilai tambah di Provinsi Bali. Berikut disajikan pemerincian output dan nilai tambah sebagaimana data sebelumnya.

Perbedaan peranan nilai tambah dengan peranan output sebagaimana disajikan pada Gambar 7.5 menunjukkan bahwa rasio biaya antara yang digunakan oleh setiap sektor produksi berbeda. Hal ini memungkinkan bahwa sektor yang secara output nilainya besar tetapi begitu dilihat nilai tambahnya kecil. Contoh yang cukup menonjol terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor konstruksi. Peranan output sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 21,12%, namun peran nilai tambahnya hanya 3,87%. Sedangkan untuk sektor konstruksi, peranan outputnya 11,89% dan peranan nilai tambahnya 4,25%.



Gambar 7.6
Komparasi Peringkat Peranan Output dan Nilai Tambah Bruto
Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO

BAB VIII

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DAN MONUMENTAL PENANDA BALI ERA BARU

8.1. Identifikasi Infratruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru

Dalam rangka mendukung tercapainya program prioritas pembangunan, maka Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mengoptimalkan kesediaan infrastruktur sebagai program pendukung. Sebagaimana telah disebutkan dalam 44 tonggak penanda Bali Era Baru, diantaranya merupakan infrastruktur yang dianggap strategis dan monumental. Selama tiga tahun kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Sukawati melakukan Pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana yang strategis serta monumental.

Data besarnya nilai investasi proyek infrastruktur Bali berasal dari instansi terkait, dan apabila data tidak tersedia maka diestimasi atau menggunakan sumber dari berbagai informasi yang dapat diakses secara online.

Tabel 8.1
Klasifikasi Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru dan Besarnya Biaya Pembangunan

No	Jenis Proyek Infrastruktur		Nilai Investasi (Milyar Rp)	Lokasi	Kuantitas	Satuan	
1	Pembangunan Infrastruktur Agama dan Kebudayaan	1.1	Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih	900	Kab. Karangasem	6800	Ha
		1.2	Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB)	2,500	Kab. Klungkung	334	Ha
2	Pembangunan Sarana Transportasi	2.1	Pembangunan Ruas Jalan <i>Shortcut</i> Singaraja-Mengwitani	968.26	Kab. Buleleng – Kab. Badung	12,79	km
		2.2	Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung	560			

No	Jenis Proyek Infrastruktur		Nilai Investasi (Milyar Rp)	Lokasi	Kuantitas	Satuan	
		-Pelabuhan Sanur		Kota Denpasar	7400	m2	
		-Pelabuhan Sampalan		Kab. Klungkung	9000	m2	
		-Pelabuhan Bias Munjul		Kab. Klungkung	4920	m2	
	2.3	Pengembangan Pelabuhan Benoa Menjadi <i>Bali Maritime Tourism Hub</i> , Denpasar	6,100	Kota Denpasar	128	Ha	
	2.4	Tol Jagat Kerthi Bali	24.6	Kab. Badung – Kab. Jembrana	96,84	km	
3	Pembangunan Fasilitas Olahraga	3.1	Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan 4 Lapangan Usaha	171	Kab. Gianyar	30000	m2
4	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	4.1	Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C	167	Kab. Gianyar	19308	m2
5	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai	5.1	Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali	363	Kab. Klungkung	230,92	km2
6	Penyediaan Air Baku	6.1	Pembangunan Bendungan Untuk Penyediaan Air Bersih				
		-Bendungan Sidan	1,735	Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Bangli	82,7	Ha	
		-Bendungan Tamblang	793.8	Kab. Buleleng	79	Ha	
7	Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.1	Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0	500	Kab. Buleleng	115	M
		Jumlah	14,782.66				

Total anggaran untuk seluruh Pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis dan monumental tersebut mencapai Rp14,7 Triliun, bersumber dari APBN Kementerian PUPR, APBN Kementerian Perhubungan, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan Badan Usaha PT. Pelindo III. Pembangunan tersebut mulai dilaksanakan pada Tahun 2019 dan untuk beberapa infrastruktur masih berlanjut hingga saat ini.

1) Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih

Gubernur Bali memfasilitasi Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, dimana penetapan lokasinya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali. Dimana pembiayaannya merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Bali, dengan total anggaran Rp900 Miliar. Dana yang bersumber dari Kementerian PUPR sebesar Rp500 Miliar, dan sisanya (Rp400 Miliar) bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Kontribusi pendanaan Pemerintah Provinsi Bali antara lain adalah untuk pembebasan lahan dan bangunan (Rp170 Miliar), serta Pembangunan fisik (Rp230 Miliar).



Sumber: <https://dispuprkim.baliprov.go.id/penataan-kawasan-suci-besakih/>

Gambar 8.1

Potret Infrastruktur Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih

Pembangunan dimulai tahun 2021, dan rampung pada tahun 2022. Beberapa restorasi dan pengembangan tempat suci yang dilakukan, serta Pembangunan fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih, diuraikan sebagai berikut.

- a) Restorasi dan pengembangan tempat suci;
- b) Tempat parkir Kedungdung (Asti Mandala);
- c) Gedung Parkir Area Manik Mas (Kreta Graha Kulon);
- d) Gedung Parkir Area Manik Mas (Rangga Graha Wetan);
- e) Pusat UMKM;

- f) Fasilitas pendukung lain (wantilan/pesandekan, Bale Gong, Wiyata Graha, ruang ganti, ruang laktasi, ATM Center, dan sebagainya).

2) Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB)

Tujuan Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung adalah untuk mewujudkan Kawasan Pengembangan Terpadu yang mengintegrasikan upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, melalui pengembangan kegiatan yang memberikan manfaat Edukasi, Konservasi, Rekreasi, ekonomi kreatif, yang ramah lingkungan berkelanjutan (Green Sustainable Development) dan berbasis IT (Smart Integrated Development). Pembiayaan Pembangunan kawasan PKB ini bukan hanya kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Bali, namun juga Badan Usaha. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibangun pada lahan seluas 334 hektare. Dari total luas lahan tersebut, 104 hektare di antaranya tidak perlu dibayarkan karena merupakan tanah milik negara. Kemudian 221 hektare tanah dalam proses pembebasan. Sampai saat ini, progresnya sudah mencapai 201 hektare (87 persen) yang dibebaskan, sisanya masih dalam proses.

Kawasan Pusat Kebudayaan Bali terdiri atas 3 (tiga) zona, yaitu:

a) Zona Inti

Pada zona inti akan berisi 15 Fasilitas Pentas Seni Tradisi dan Seni Modern; 12 Museum Tematik; Auditorium Bung Karno; Desa Difable; Bali International Convention Center; Bali Exhibition Center; Pusat Promosi Ekspor; Fasilitas Pariwisata; Pelabuhan Marina; dan Taman Rekreasi Ekologis. Termasuk panggung terbuka utama dengan kapasitas 15.000 orang. Ada pula panggung terbuka madya dengan kapasitas 4.000 orang dan panggung terbuka lain untuk kapasitas 3.000 sampai 3.500 orang, serta 12 Museum Tematik juga akan dibangun di Zona Inti. Total anggaran Pembangunan zona inti yaitu Rp1,5 Triliun, yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

b) Zona Penunjang

Di zona penunjang ada areal untuk hotel, apartemen, dan fasilitas usaha pariwisata.

c) Zona Penyangga

Zona penyangga memiliki hutan dan taman ekologis tematik seluas kurang lebih 70-90 hektare.



Sumber: <https://dispuprkim.baliprov.go.id/pkb-tahap-iii/>

Gambar 8.2

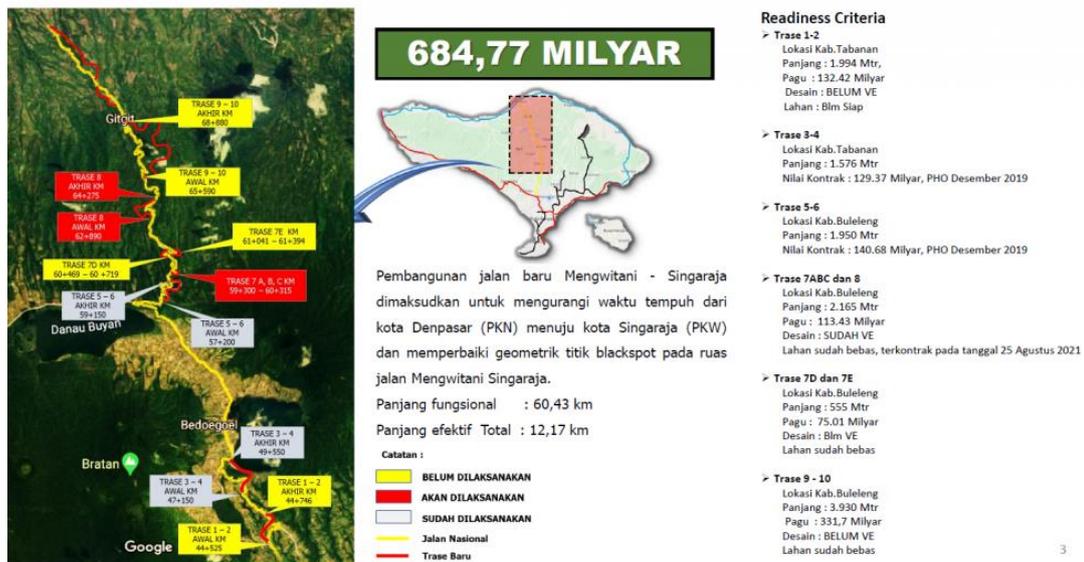
**Potret Rancangan Infrastruktur
Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali**

Kawasan ini betul-betul dibangun dengan mengimplementasikan keluhuran nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi yaitu enam sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, yang terdiri dari: upaya untuk menyucikan dan memuliakan jiwa/atman (Atma Kerthi), menyucikan dan memuliakan laut beserta 93elati (Segara Kerthi), menyucikan dan memuliakan sumber air (Danu Kerthi), menyucikan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan (Wana Kerthi),

menyucikan dan memuliakan manusia (Jana Kerthi), serta menyucikan dan memuliakan alam semesta (Jagat Kerthi).

3) Pembangunan Ruas Jalan *Shortcut* Singaraja-Mengwitani

Gubernur Bali juga telah memfasilitasi Pembangunan ruas jalan *shortcut* Singaraja-Mengwitani, yang dimaksudkan untuk mengurangi waktu tempuh dari kota Denpasar (Pusat Kegiatan Nasional/PKN) menuju kota Singaraja (Pusat Kegiatan Wilayah/PKW) dan memperbaiki geometrik titik blackspot pada ruas jalan Mengwitani Singaraja.



Sumber: <https://dispuprkim.baliprov.go.id/pembangunan-jalan-shortcut-mengwitani-singaraja/>

Gambar 8.3
Potret Infrastruktur Pembangunan Ruas Jalan
Shortcut Singaraja-Mengwitani

Selain untuk meratakan Pembangunan infrastruktur di Bali jalan shortcut ini juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan dikawasan wisata (Bedugul) pada hari libur dan hari keagamaan karena jalan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan antara Bali Utara dengan Bali 94relativ. Dengan keberadaan jalan shortcut ini dapat mengurangi jarak jarak tempuh dari Denpasar- Singaraja yang biasanya ditempuh dari waktu 3 jam menjadi 2 jam dengan mengurangi jumlah tikungan yang ada. Jalan shortcut Mengwitani – Singaraja memiliki 10 titik yang terbagi 6 titik di wilayah Kabupaten Buleleng dan 4 titik berada di Kabupaten Tabanan. Jalan shortcut tersebut memiliki

95relativ jalan mencapai 12,79 kilometer dan dengan ruas jalan yang dibangun dengan lebar 7 meter dan 2 meter untuk bahu jalan. Jalan shortcut Mengwitani – Singaraja juga dirancang lebih 95elati tingkat kemiringannya menjadi 6 derajat yang pada jalan sebelumnya mencapai 10-15 derajat untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan (PU-Net. 2020) Jalan Shortcut Mengwitani – Singaraja akan memudahkan bus-bus pariwisata untuk mengunjungis Bali Utara dengan demikian potensi wisata bisa diharapkan akan berkembang.

4) Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung

Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas mengkoneksikan Pelabuhan-pelabuhan di tiga pulau berbeda, yaitu Pelabuhan Sanur (Denpasar), Pelabuhan Sampalan (Nusa Penida), dan Pelabuhan Bias Munjul (Nusa Ceningan).



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 8.4
Potret Infrastruktur Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung

Pembangunan Pelabuhan Sampalan akan dibangun dua lantai seluas area kolam 9000 M2, kapasitas sandar 10 fast boat, dengan estimasi biaya Rp. 98 Milyar. Pelabuhan Bias Munjul dibangun untuk mengoneksikan antara fast boat dan kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) yaitu kapal yang berguna untuk penyeberangan selat dan pelayaran perairan pesisir yang mampu mengangkut kendaraan, barang, dan orang, dengan estimasi biaya Pelabuhan Bias Munjul sebesar Rp. 138 Milyar.

Disisi lain kondisi Sanur sebelumnya tidak memiliki dermaga sehingga para penumpang boat yang akan naik dan turun boat, mesti turun ke air di pinggir laut dengan kondisi basah sembari mengangkat celana dan sandalnya. Sehingga diharapkan adanya Pembangunan dermaga di Sanur tepatnya di Pantai Matahari Terbit Desa Sanur Kaja Denpasar, dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para penumpang boat. Pembangunan Pelabuhan Sanur diperkirakan menyedot anggaran terbesar mencapai Rp 376 Milyar.

5) Pembangunan Pelabuhan Benoa Menjadi *Bali Maritime Tourism Hub*, Denpasar

PT Pelindo Indonesia (Persero) mengembangkan kawasan industri pariwisata di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Adapun pembangunan kawasan sejak 2019 ini bernama Bali Maritime Tourism Hub merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Adapun pengembangan BHTH Ultimate akan menata Pelabuhan Benoa menjadi dua zona, yakni:

- a) Zona fasilitas pokok, seperti zona terminal, zona peti kemas dan general cargo, zona marina/ pariwisata, zona curah cair dan gas, dan zona terminal penumpang
- b) Zona fasilitas penunjang, yakni zona logistik, zona port associated industry (PAI), zona pemerintahan, dan lainnya.



Sumber: harianindonesia.id

Gambar 8.5
Potret Infrastruktur Pembangunan Pelabuhan Benoa
Menjadi *Bali Maritime Tourism Hub*, Denpasar

6) Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan Empat Lapangan Pendukung

Stadion Kapten I Wayan Dipta merupakan stadion markas Bali United. Dalam persiapan untuk menjadi salah satu lokasi pertandingan Piala Dunia U-20 2023, Stadion Dipta juga mendapat suntikan dana besar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menurut data Kementerian PUPR, dana Rp 17 miliar dianggarkan pada 2023 untuk menyempurnakan proses renovasi stadion, terutama untuk membenahi rumput. Jika menghitung dana akumulasi pembenahan stadion sejak 2020, pengerjaan renovasi Stadion Dipta dan empat lapangan 97relativ di Bali mencatat nilai kontrak proyek sekitar Rp 155 miliar. Empat lapangan tersebut yaitu Lapangan Kompyang Sujana, Stadion Ngurah Rai, Lapangan Gelora Tri Sakti Legian, dan Gelora Samudera Kuta.

Sebagaimana infografis Gambar 5.6, Stadion Kapten I Wayan Dipta di Kabupaten Gianyar memiliki fasilitas hiburan paling lengkap, dengan berkonsep “sportainment”.



Sumber: <https://www.kompas.id/baca/olahraga/2023/04/12/wujud-stadion-eropa-paripurna-di-wayan-dipta>

Gambar 8.6

Potret Infrastruktur Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan Empat Lapangan Pendukung

7) Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C

Revitalisasi dan pembangunan Pasar Seni Sukawati menjadi salah satu proyek yang dikedepankan oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR karena dapat kembali mendorong perekonomian Bali yang sempat lesu akibat pandemi.



Sumber: pu.go.id

Gambar 8.7

Potret Infrastruktur Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C

Pembangunan Blok A dan Blok B Pasar Seni Sukawati yang sudah rampung terlebih dahulu, dibangun seluas 9.493 m² dengan gedung bertingkat 4 lantai untuk Blok A dan 3 lantai Blok B dengan kapasitas 31 kios dan 779 los kering. Pada bagian *basement* Pasar Sukawati blok A, B, dan C sudah saling terintegrasi antara satu dengan lainnya yang memiliki fungsi sebagai area parkir kendaraan. Pasar Sukawati Blok C dibangun setinggi 4 lantai dan 1 lantai *basement* seluas 10.206,95 m². Pasar ini terdiri dari 529 unit los dan 64 unit kios dilengkapi dengan parkir kendaraan khusus difabel dan dapat menampung 279 unit kendaraan roda dua pada area *basement*.

Di samping kios dan los, pembangunan Pasar Sukawati Blok C dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum, seperti toilet, ruang menyusui, ruang kesehatan, dan ruang bermain anak. Pasar ini juga dilengkapi dengan lift untuk mempermudah akses pedagang dan pembeli.

8) Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali

Proyek normalisasi Tukad Unda bertujuan untuk pengendalian banjir dan melakukan perlindungan wilayah sepanjang daerah aliran Sungai Tukad Unda tersebut akan mampu menurunkan risiko bencana di wilayah Kabupaten Klungkung.



Sumber: <https://bali.bisnis.com/read/20211213/537/1476888/normalisasi-tukad-unda-dipercepat>

Gambar 8.8
Potret Infrastruktur Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi)
Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali

Anggaran pengerjaan normalisasi Tukad Unda terpisah dengan proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. Adapun anggarannya sebesar Rp 2,5 triliun yang merupakan pinjaman Pemerintah Provinsi Bali dari dana Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat.

9) Pembangunan Bendungan Untuk Penyediaan Air Bersih

a) Bendungan Sidan di Wilayah Badung, Gianyar, dan Bangli

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Bangli dan Gianyar, untuk mendukung ketersediaan air baku di Provinsi Bali sebagai destinasi wisata dunia, dengan kapasitas 3,82 juta meter kubik.

Pembangunan Bendungan Sidan yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Bali Penida tersebut akan memberikan manfaat bagi konservasi air, pariwisata, dan yang paling utama adalah penyediaan air baku sebesar 1,75 m³/detik untuk Kawasan Metropolitan Sarbagita, terutama Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan

Bendungan yang dibangun di atas lahan seluas 82,73 hektar tersebut juga memiliki potensi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) berkapasitas 0,65 MW.



Sumber: <https://www.pu.go.id/berita/kementerian-pupr-targetkan-bendungan-sidan-di-provinsi-bali-rampung-2023>

Gambar 8.9

**Potret Infrastruktur Pembangunan Bendungan Sidan
di Wilayah Badung, Gianyar, dan Bangli**

Bendungan Sidan adalah bendungan tipe Zonal dengan Inti Tegak memiliki Panjang puncak 185 meter serta lebar puncak 8,5 meter yang sumber airnya berasal dari Sungai Ayung. Bendungan berkapasitas tampung 3,82 juta meter kubik tersebut juga dilengkapi terowongan pengelak sepanjang 453 meter dengan diameter 5 meter yang berfungsi untuk pengendali banjir dari debit masuk sebesar 405,09 m/detik menjadi 138,20 m/detik debit keluar.

b) Bendungan Tamblang di Buleleng

Pembangunan bendungan Tamblang bertujuan untuk memenuhi misi ketahanan pangan dan ketersediaan air nasional, khususnya Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata internasional di Indonesia. Bendungan Tamblang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan untuk menambah tampungan air sehingga kontinuitas suplai air baku dan irigasi ke sawah terjaga.



Sumber: <https://www.pu.go.id/berita/kementerian-pupr-targetkan-bendungan-tamblang-di-provinsi-bali-selesai-2022>

Gambar 8.10
Potret Infrastruktur Pembangunan Bendungan Tamblang
di Buleleng

Bendungan Tamblang diproyeksi memiliki kapasitas tampungan sebesar 7,6 juta m³ untuk memenuhi kebutuhan air irigasi D.I Bungkulan dan D.I Bulian seluas 588 Hektar (Ha). Di samping itu, juga bermanfaat sebagai penyediaan air baku dengan debit 510 liter/detik, menambah cadangan listrik (PLTM) sebesar 0,54 MW, pengendalian banjir, kawasan konservasi, dan potensi pariwisata baru di Bali utara.

Pembangunan bendungan dikerjakan oleh kontraktor PT.PP-Adijaya (KSO) dengan nilai kontrak sebesar Rp 816 miliar. Saat ini Pembangunan konstruksinya mencapai 51.72% dan ditargetkan selesai pada 2022.

Bendungan Tamblang memiliki luas lahan 73 Ha dengan sumber air berasal dari Tukad Daya. Bendungan ini merupakan bendungan dengan tipe Rock Fill Dam dengan Inti Tegak puncak 260 meter dan lebar puncak 12 meter, dilengkapi terowongan pengelak tipe tunnel tapal kuda dengan diameter 4,50 meter.

Pembangunan bendungan tersebut akan menambah jumlah tampungan air di Provinsi Bali yang terkenal dengan sejumlah destinasi pariwisata bertaraf

internasional. Sebelumnya telah dibangun Bendungan Titab Kabupaten Buleleng (2011-2015) dengan kapasitas tampung 12,80 juta m³, Bendungan Benel Kabupaten Jembrana selesai 2010 kapasitas 1,9 juta m³, Bendungan Telaga tunjung Kabupaten Tabanan selesai 2007 dengan kapasitas 1,26 juta m³, Bendungan Grokgak Kabupaten Buleleng selesai 1997 dengan kapasitas 3,1 juta m³, dan Bendungan Palasari Kabupaten Jembrana selesai 1989 dengan kapasitas 8 juta m³.

10) Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali

Turyapada Tower akan menjadi tower ikonik pertama di Indonesia dan daya tarik pariwisata berkelas internasional. Turyapada Tower akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti puncak tower sebagai pemancar siaran tv digital, telekomunikasi seluler, dan internet, badan tower sebagai wahana edukasi berupa planetarium, *skywalk*, restoran putar 360 derajat, dan jembatan kaca. *Pedestrian tower* berfungsi sebagai penunjang seperti wisata konvensi, laboratorium pendidikan, dan Museum Keunggulan Kebudayaan Bali dalam berkomunikasi, memanfaatkan teknologi yang diciptakan dan di adopsi di masing-masing era peradaban.



Sumber: kompas.com

Gambar 8.11
Potret Infrastruktur Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali

Menara Turyapada digadang-gadang akan menjadi destinasi wisata terpadu baru di Bali dengan membawa konsep bangunan *green building* yang mencerminkan hubungan alam dan kebudayaan Bali serta terbagi atas 6 zona yang diantaranya zona edukasi, zona komunal, zona komersial (UMKM), zona rekreatif, zona pengelola, dan zona perkebunan. Selain menjadi ikon wisata, kehadiran Menara Turyapada juga akan mengoptimalkan siaran TV digital dengan jangkauan 80% wilayah Buleleng, Jembrana, hingga Karangasem. Lalu menjadi daya tarik pariwisata baru berkelas dunia, membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru daerah setempat.

11) Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi (Gilimanuk-Mengwi)

Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi berupa Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi (Gilimanuk-Mengwi) merupakan jalan tol kedua setelah Jalan Tol Bali Mandala di Provinsi Bali. Jalan Tol ini direncanakan memiliki panjang total 96,21 Km, Jalan Tol Jagat Kerthi Bali merupakan satu-satunya jalan Tol yang pertama dibangun di Indonesia dengan tambahan fasilitas jalur sepeda, dan Trase Jalan Tol ini akan melalui 3 Kabupaten, 13 Kecamatan, hingga 58 Desa, dengan estimasi biaya konstruksi sebesar Rp. 24 Triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama badan usaha jalan tol berencana memulai pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali pada pertengahan tahun 2022. Jalan tol yang diusulkan bernama Tol Jagat Kerthi Bali itu akan dilengkapi dengan jalur sepeda.

Pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan Proyek Jalan Tol dan Perjanjian Regres Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo serta Direktur Utama PT Tol Jagat Kerthi Bali Tito Sulistio.

Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi diharapkan dapat mengakomodir kendaraan dari Barat ke Timur dan sebaliknya serta menjadi jalur alternatif dari pelabuhan Gilimanuk ke arah ibu kota Provinsi Bali yaitu Denpasar. Selain itu, pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat mengantisipasi volume lalu lintas dengan terkoneksi kawasan-kawasan pembangunan strategis berdasarkan RTRW Bali 2009-2029 kedalam jaringan transportasi Jalan Tol Jagat Kerthi (Gilimanuk-Mengwi).



Sumber: kompas.com

Gambar 8.12
Potret Jalur Jalan Tol Jagat Kerthi (Gilimanuk-Mengwi)

Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi (Gilimanuk-Mengwi) Tol Jagat Kerthi Bali bermakna sebagai sarana dalam memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Bali, karena diyakini mampu memberi dampak positif baik bagi Pemerintah Daerah maupun krama Bali, baik dalam hal peningkatan investasi pembangunan, peningkatan lapangan pekerjaan, efisiensi jarak dan waktu tempuh logistik, bahkan akan menjadi pemicu tumbuhnya destinasi wisata baru, serta peluang berusaha bagi warga sekitar tol dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal yang ada.

8.2. Dampak Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Bali

8.2.1. Angka Pengganda (Multiplier) Sektor Konstruksi di Bali

Pengganda atau *multiplier* digunakan untuk menangkap dampak langsung dan tidak langsung atas perubahan output dikarenakan adanya perubahan permintaan akhir. Dalam kajian ini digunakan pengaruh total yang meliputi pengaruh peningkatan output dari sektor-sektor ekonomi yang merupakan penyusun input langsung dari sektor bersangkutan (pengaruh langsung) dan pengaruh peningkatan output dari sektor ekonomi yang lain (pengaruh tidak langsung).

Angka pengganda Pembangunan infrastruktur pada Tabel I-O Provinsi Bali, ditunjukkan oleh sektor konstruksi (kode sektor 31), dimana secara lebih jelas diketahui bahwa:

- Angka pengganda output sektor konstruksi sebesar 1,2828, artinya jika terjadi peningkatan permintaan akhir terhadap sektor konstruksi sebesar Rp1 juta, maka output diseluruh sektor perekonomian akan meningkat sebesar Rp1,282 juta.
- Angka pengganda pendapatan sektor konstruksi sebesar 0,3065, artinya jika terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar Rp1 juta di sektor konstruksi, maka akan meningkatkan pendapatan rumah tangga di seluruh sektor perekonomian sebesar Rp306,5 ribu.
- Angka pengganda nilai tambah bruto sektor konstruksi sebesar 0,6208, artinya jika terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar Rp1 juta di sektor konstruksi, maka akan meningkatkan nilai tambah bruto di seluruh sektor perekonomian sebesar Rp620,8 ribu.

8.2.2. Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Tabel IO

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat laju pertumbuhan PDRB. PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah barang dan jasa

akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian. Pada dasarnya Nilai Tambah Bruto (NTB) (kode sektor 2090) dalam tabel input output adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah sektoral dengan pajak penjualan impor dan bea masuk, sehingga perhitungannya ada beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dalam tabel input output besarnya PDRB menurut lapangan usaha ditunjukkan oleh Nilai Tambah Bruto (NTB).

Tabel 8.2
Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bali pada 10 Sektor Utama (Berdasarkan Klasifikasi 52 Sektor Industri)

No	Kode	Uraian Sektor	Total Infrastruktur			
			Sebelum ada Investasi (Milyar Rp)	Setelah ada Investasi (Milyar Rp)	Selisih	Pertumbuhan (%)
1	40	Penyediaan Akomodasi	26,989.29	27,023.88	34.59	0.13
2	31	Konstruksi	16,128.28	31,218.12	15,089.84	93.56
3	41	Penyediaan Makan Minum	15,760.62	15,813.39	52.77	0.33
4	33	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	14,333.35	14,426.92	93.57	0.65
5	38	Angkutan Udara	11,515.77	11,558.94	43.17	0.37
6	47	Real Estate	10,986.57	12,201.26	1,214.69	11.06
7	42	Jasa Informasi dan Komunikasi	9,959.17	10,004.55	45.38	0.46
8	43	Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	8,363.51	8,549.92	186.41	2.23
9	50	Jasa Pendidikan	8,193.06	8,284.72	91.65	1.12
10	52	Jasa Lainnya	7,455.17	7,576.83	121.66	1.63
		Sub Total	129,684.78	146,658.53	16,973.75	
		Lainnya	63,141.73	64,886.77	1,745.09	
		Jumlah Total	192,826.51	211,545.30	18,718.84	9.71
		Rata-rata Pertumbuhan Sektor				19.05

Dampak pembangunan infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru terhadap pertumbuhan ekonomi Bali dapat dilihat pada Tabel 2. Dengan rencana investasi yang nilainya merupakan total nilai proyek Pembangunan infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru, yaitu sebesar Rp14.782,66 Milyar, akan menghasilkan tambahan PDRB sebesar Rp18.718,84 Milyar atau dengan kata lain PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 9,71% dari kondisi tidak ada investasi. Sektor ekonomi yang merasakan dampak kenaikan terbesar yaitu sektor konstruksi mengalami kenaikan sebesar 93,56%, diikuti oleh sektor real estate sebesar (11,06%). Rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi sebesar 19,05% dari kondisi awal tidak ada investasi.

Dampak Pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian ditunjukkan oleh tambahan NTB (PDRB), dan peningkatan jumlah output perekonomian. Dampak Pembangunan infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru terhadap perekonomian Bali dapat dilihat pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3
Dampak Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru Terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB)

Jenis Proyek Infrastruktur			Nilai Investasi (Milyar Rp)	Tambahan NTB (Milyar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (% Perubahan)
Pembangunan Infrastruktur Agama dan Kebudayaan	1.1	Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih	900.00	1,139.64	0.59
	1.2	Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB)	2,500.00	3,165.68	1.64
Pembangunan Sarana Transportasi	2.1	Pembangunan Ruas Jalan <i>Shortcut</i> Singaraja-Mengwitani	968.26	1,226.08	0.64
	2.2	Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung	560.00	709.11	0.37
	2.3	Pengembangan Pelabuhan Benoa Menjadi <i>Bali Maritime Tourism Hub</i> , Denpasar	6,100.00	7,724.25	4.01
	2.4	Tol Jagat Kerthi Bali	24.60	31.15	0.02
Pembangunan Fasilitas Olahraga	3.1	Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan 4 Lapangan Usaha	171.00	216.53	0.11
Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	4.1	Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C	167.00	211.47	0.11
Pembangunan Pengendali Banjir Sungai	5.1	Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali	363.00	459.66	0.24
Penyediaan Air Baku	6.1	Pembangunan Bendungan Untuk Penyediaan Air Bersih		-	0.00
		-Bendungan Sidan	1,735.00	2,196.98	1.14
		-Bendungan Tamblang	793.80	1,005.17	0.52
Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.1	Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0	500.00	633.14	0.33
Jumlah			14,782.66	18,718.84	9.71

Tabel 3 memberi penjelasan tentang dampak Pembangunan infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru terhadap perekonomian Bali. Dengan rencana investasi sebesar **Rp14.782,66 Milyar** yang diinvestasikan pada 12 jenis

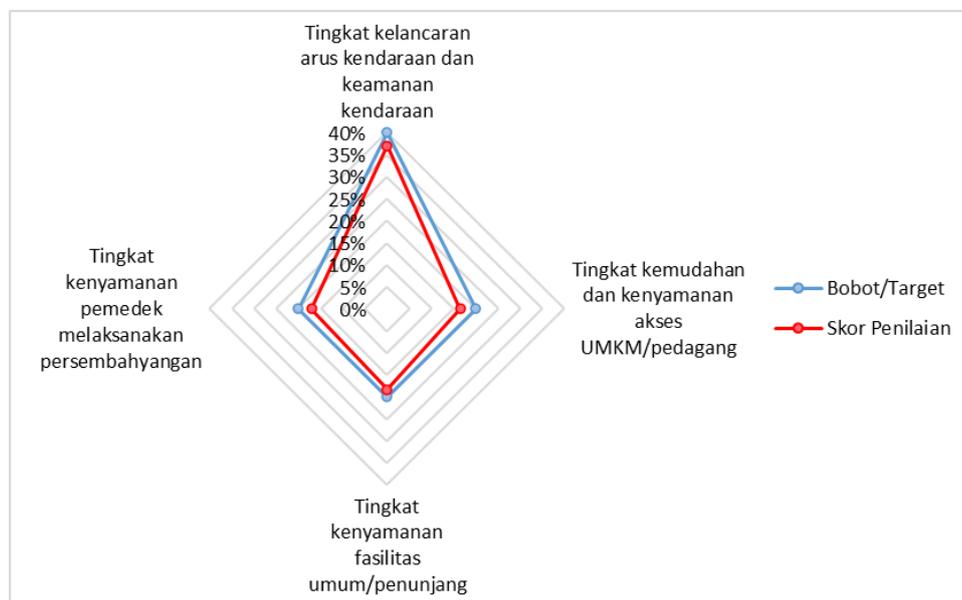
proyek infrastruktur akan berdampak **meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,71%** dari kondisi tidak ada investasi tersebut.

8.3. Analisis *Outcome* Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengukuran fungsi atau *performance* infrastruktur tidak hanya pada level output, tapi juga pada level *outcome*. Penyajian hasil analisis *outcome* kajian ini disusun dengan teknik yang disosialisasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan: Tantangan, Metode, dan Strategi”.

1) *Outcome* Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih

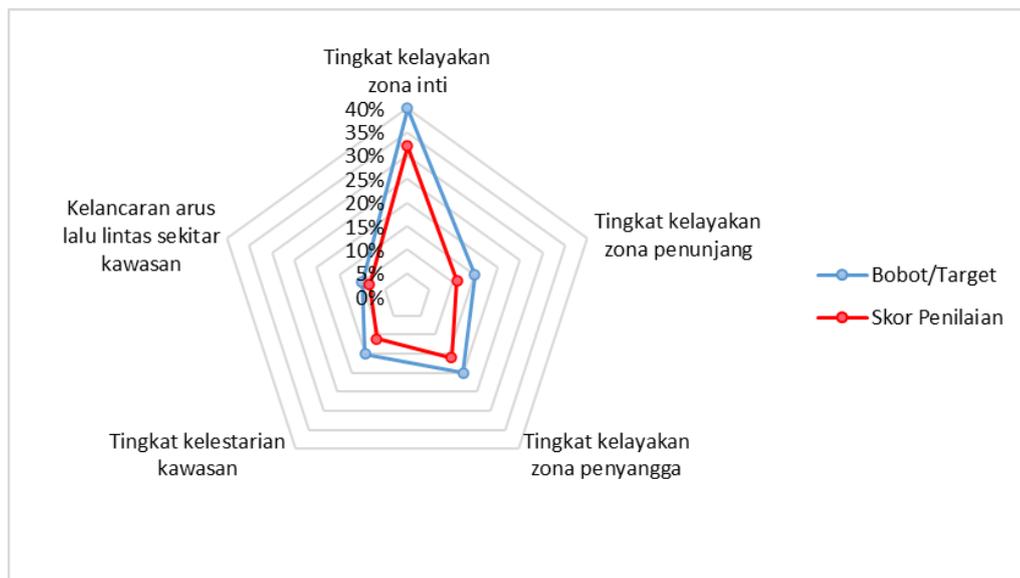
Pengukuran *outcome* Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih diukur dari 4 (empat) variabel yang terdiri dari 29 indikator. Rincian penilaian *outcome* disajikan pada Lampiran 2, dimana komparasi antara bobot/target dan penilaian pada tiap variabel disajikan pada Gambar 8.13.



Gambar 8.13
Persentase *Outcome* Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih

2) *Outcome* Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kawasan Pusat Kebudayaan Bali masih dalam proses pengerjaan, sehingga pengukurannya dilakukan berdasarkan kondisi existing dan perencanaan kawasan. Terdapat 5 (lima) variabel dalam pengukuran *outcome* Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang diuraikan lebih lanjut dalam 14 indikator. Adapun pemetaan capaian target tiap indikator disajikan secara rinci pada Lampiran 2, sedangkan capaian variabelnya disajikan pada Gambar 8.14 berikut.

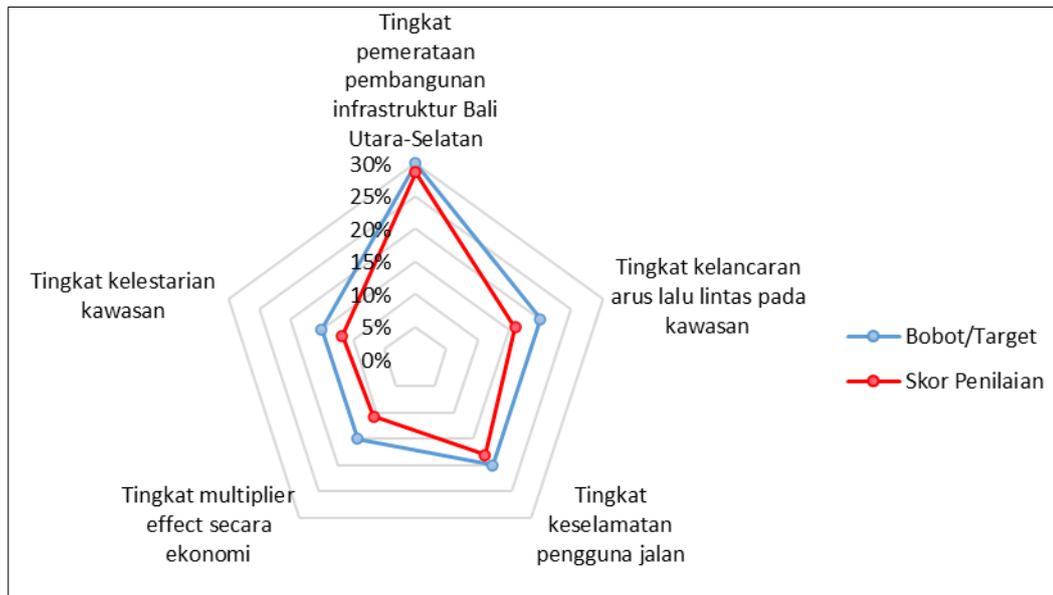


Gambar 8.14
Persentase *Outcome* Infrastruktur
Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali

Berdasarkan Gambar 8.14 terlihat penilaian optimis terkait kelancaran arus lalu lintas sekitar Kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Hal ini karena lokasinya berada di jalur by pass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang relatif lebar, dan jalan masuk kawasan telah diatur tidak terlalu dekat ke jalan raya utama. Terkait variabel lainnya, khususnya kelayakan masing-masing zona (inti, penunjang, maupun penyangga), juga dinilai cukup baik berdasarkan perancangan yang holistik dan berbasis lingkungan. Namun faktor kondisi alam terkait adanya kekhawatiran potensi aliran air maupun lahar dingin yang berlebihan perlu untuk diatensi.

3) *Outcome* Pembangunan Ruas Jalan *Shortcut* Singaraja-Mengwitani

Dijelaskan sebelumnya bahwa Pembangunan Jalan *Shortcut* Singaraja-Mengwitani bertujuan untuk mengurangi waktu tempuh ke Bali Utara, khususnya Singaraja. Dalam pengukuran *outcomenya* terdapat 5 (lima) variabel yang diuraikan dalam 12 indikator. Adapun pemetaan target dan penilaian pada setiap variabel disajikan pada Gambar 8.15.



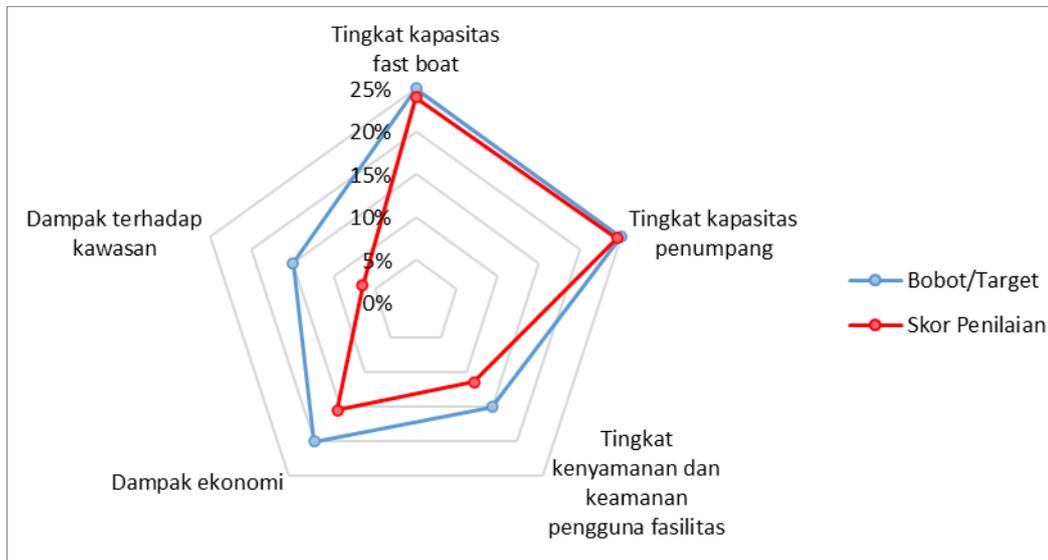
Gambar 8.15
Persentase *Outcome* Infrastruktur Pembangunan Ruas Jalan *Shortcut* Singaraja-Mengwitani

Berdasarkan Gambar 8.15 capaian penilaian *outcome* variabel tingkat pemerataan Pembangunan infrastruktur Bali Utara-Selatan sangat mendekati target. Selain itu, konstruksi dan kondisi *shortcut* juga diyakini memiliki tingkat keselamatan pengguna jalan karena sudah memperhitungkan dengan cermat mengenai kemiringan maupun tikungan. Namun memang tingkat *multiplier effect* secara ekonomi perlu dioptimalkan.

4) *Outcome* Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung

Pelabuhan dengan rute antara Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Penida memang memiliki peran penting, baik untuk pemerataan Pembangunan Bali, maupun untuk mendukung pariwisata. Terdapat 5 (lima) variabel *outcome* yang

dijabarkan dalam 13 indikator, dengan capaian penilaian variabel sebagaimana Gambar 8.16.



Gambar 8.16
Persentase *Outcome* Infrastruktur Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung

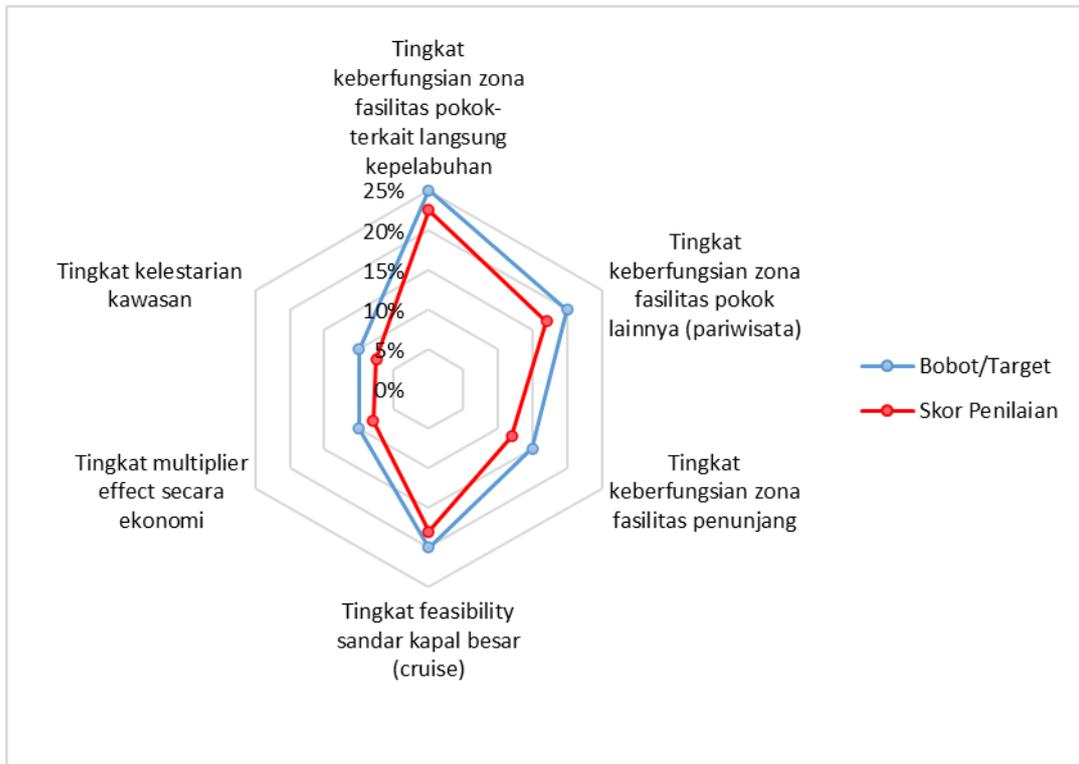
Gambar 8.16 menunjukkan bahwa keberadaan Pelabuhan Segitiga Emas telah mampu meningkatkan kapasitas *fast boat* (baik jumlah sandar dan rute), dan tentunya hal itu linear dengan peningkatan kapasitas penumpang. Namun keberadaan Pelabuhan Segitiga Emas ini menyisakan dampak kemacetan pada jalan masuk ke Pelabuhan Sanur (Pantai Matahari Terbit), yang terjadi menjelang waktu penyeberangan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar perlu segera merancang rekayasa lalu lintas untuk menanggulangi kondisi tersebut.

5) ***Outcome* Pembangunan Pelabuhan Benoa Menjadi *Bali Maritime Tourism Hub*, Denpasar**

Terdapat 6 (enam) variabel yang digunakan dalam penilaian *outcome* Pembangunan Pelabuhan Benoa menjadi *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH), dimana variabel tersebut terdiri dari 11 indikator.

Tujuan utama BMTH salah satunya agar kapal besar (*cruise*) dapat bersandar, dan penilaian atas *outcome* tersebut dinilai telah mendekati target. Rancangan atas zona fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang diwujudkan melalui

infrastruktur yang dibangun perlu dioptimalkan penggunaannya, sehingga dapat memperoleh penilaian yang mendekati target.

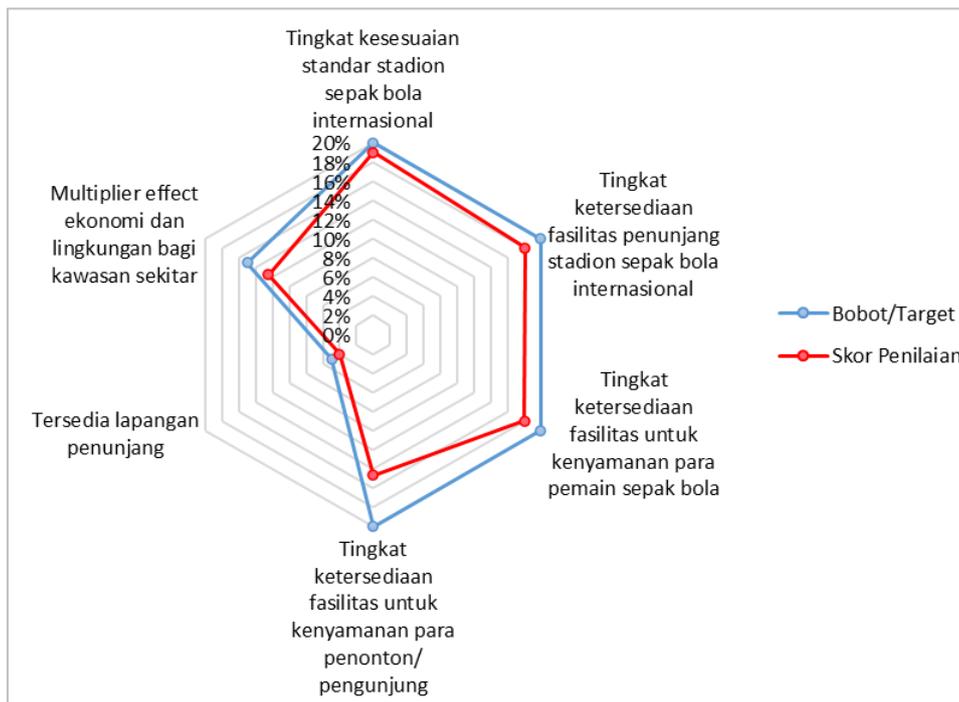


Gambar 8.17
Persentase *Outcome* Infrastruktur Pembangunan Pelabuhan Benoa Menjadi *Bali Maritime Tourism Hub*, Denpasar

6) *Outcome* Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan Empat Lapangan Pendukung

Stadion Kapten I Wayan Dipta dirancang sebagai stadion yang memiliki fasilitas serta standar stadion bola kelas dunia. Dimana *outcomenya* dinilai dalam 6 (enam) variabel yang dirinci dalam 20 indikator.

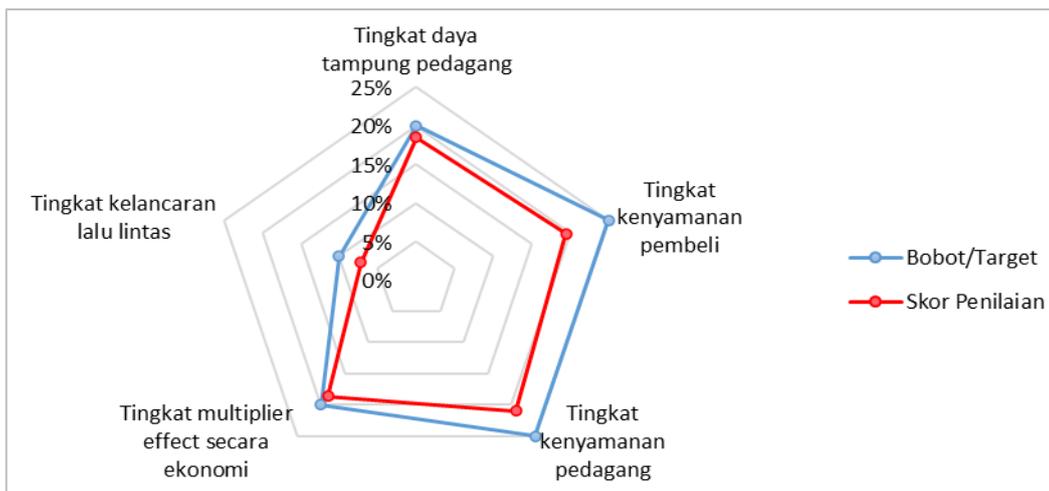
Fasilitas utama maupun fasilitas penunjang, terutama bagi para pemain dinilai telah memiliki standar yang baik. Apalagi pengembangan stadion ini juga didukung dengan 4 (empat) lapangan penunjang. Keberadaan stadion Dipta yang dapat menjadi *venue* pertandingan internasional juga memberikan *multiplier effect* ekonomi bagi daerah sekitarnya, seperti berkembangnya pembangunan sarana akomodasi. Namun memang fasilitas untuk pengunjung/penonton dinilai perlu dioptimalkan, seperti penambahan tribun penonton.



Gambar 8.18
Persentase *Outcome* Infrastruktur Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan Empat Lapangan Pendukung

7) *Outcome* Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C

Pasar Seni Sukawati memang merupakan ikon wisata belanja di Bali. Terdapat 5 (lima) variabel yang dirinci dalam 17 indikator dalam menilai *outcome* Pembangunan Pasar Sukawati (Blok A, B, dan C).

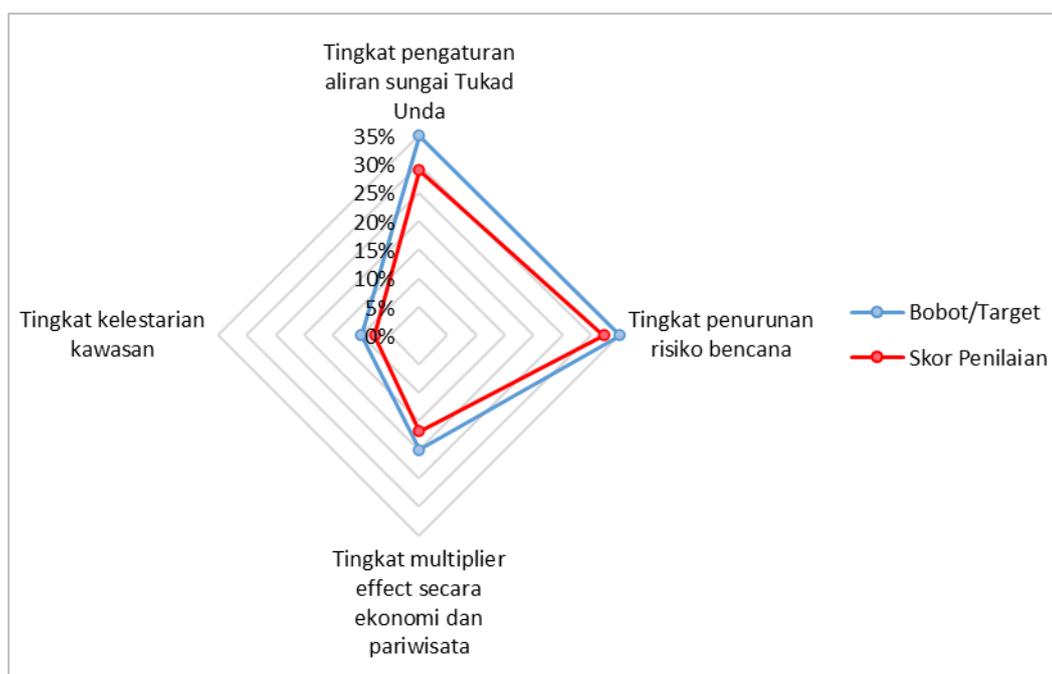


Gambar 8.19
Persentase *Outcome* Infrastruktur Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C

Pasar Sukawati sebelumnya terdiri dari dua blok utama, dan blok tambahan yang dibangun sebelumnya merupakan Pasar Umum Sukawati. Penambahan ini tentu saja menambah daya tampung pedagang, sehingga penilaian *outcome* untuk variabel ini termasuk tinggi.

8) **Outcome Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali**

Pembangunan sungai buatan, berupa normalisasi Tukad Unda menjadi penting untuk upaya mengurangi dampak bencana, sekaligus mendukung Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. Terdapat 4 (empat) variabel yang diuraikan dalam 10 indikator dalam mengukur *outcome* Pembangunan normalisasi Tukad Unda.



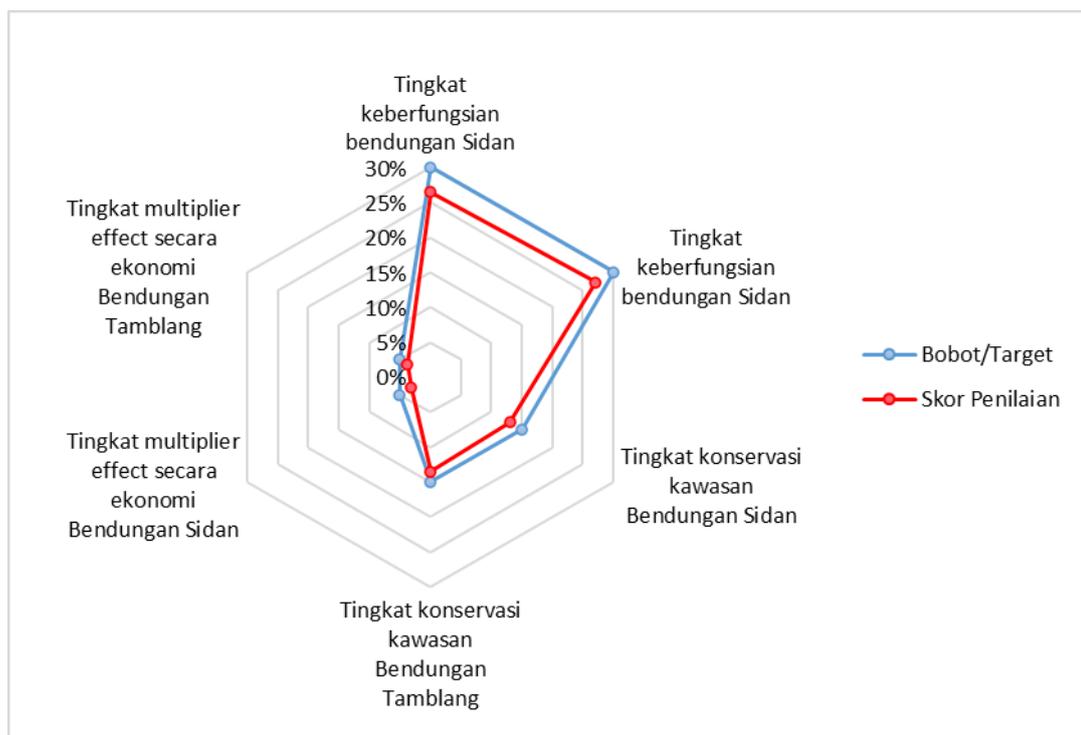
Gambar 8.20
Persentase *Outcome* Infrastruktur Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan ditunjukkan pada Gambar 8.20, normalisasi ini dinilai mampu menurunkan risiko bencana, terutama sebagai pendendali banjir (termasuk banjir lahar dingin), terutama di kawasan hilir. Namun masyarakat menilai bahwa pengendalian debit air masih merupakan hal

yang sulit, mengingat hal tersebut sangat bergantung pada faktor alam. Selain itu juga, perlu dilakukan penghijauan di sekitar kawasan normalisasi Tukad Unda.

9) **Outcome** Pembangunan Bendungan Untuk Penyediaan Air Bersih

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat dua bendungan yang dibangun sebagai infrastruktur strategis dan monumental, yaitu Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang. Terdapat 6 (enam) variabel yang diuraikan dalam 14 indikator untuk menilai *outcome* pembangunan kedua bendungan tersebut.

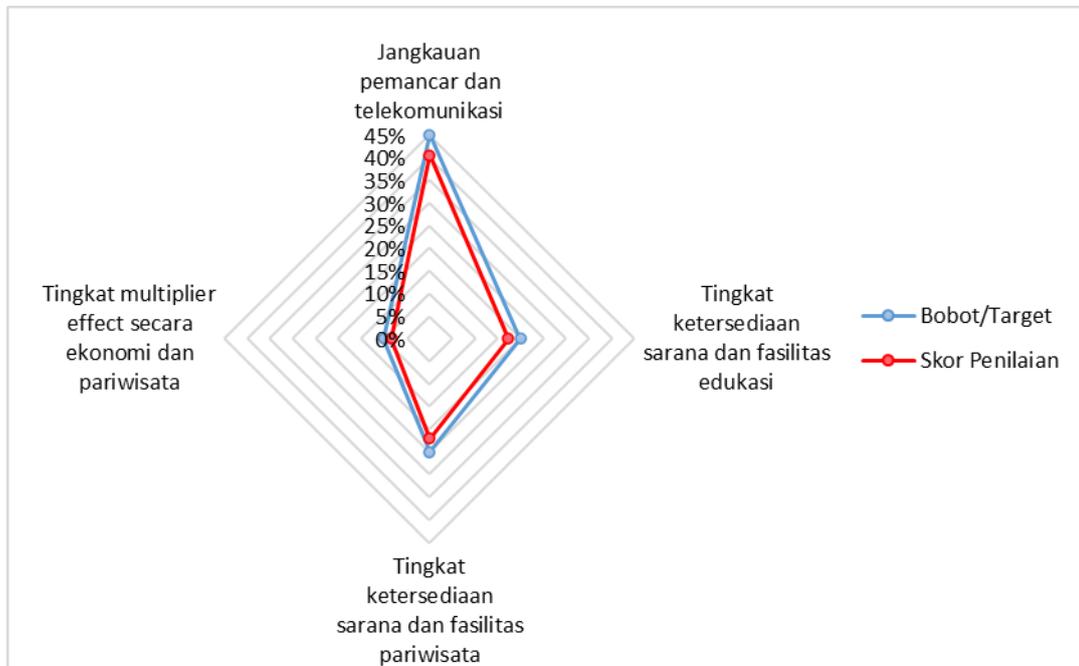


Gambar 8.21
Persentase *Outcome* Infrastruktur Pembangunan Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang

Fungsi utama bendungan tentunya sebagai penampung air, sehingga *outcome* terkait hal ini dinilai sangat baik. Namun warga sekitar kawasan menilai belum merasakan *multiplier effect* adanya bendungan, terutama terkait dampak ikutan, seperti pengembangan kawasan wisata maupun unit usaha/UMKM di sekitar kawasan bendungan, apalagi lokasi bendungan di daerah perdesaan yang sebelumnya memang belum berkembang sebagai daerah tujuan wisata.

10) **Outcome Pembangunan Turyapada Tower 6.0 KBS**

Turyapada Tower 6.0 KBS dibangun untuk meningkatkan jangkauan komunikasi dan penyiaran, terutama untuk wilayah Bali Utara. Terdapat 4 (empat) variabel yang diuraikan dalam 9 indikator untuk menilai *outcome* pembangunan tower tersebut.



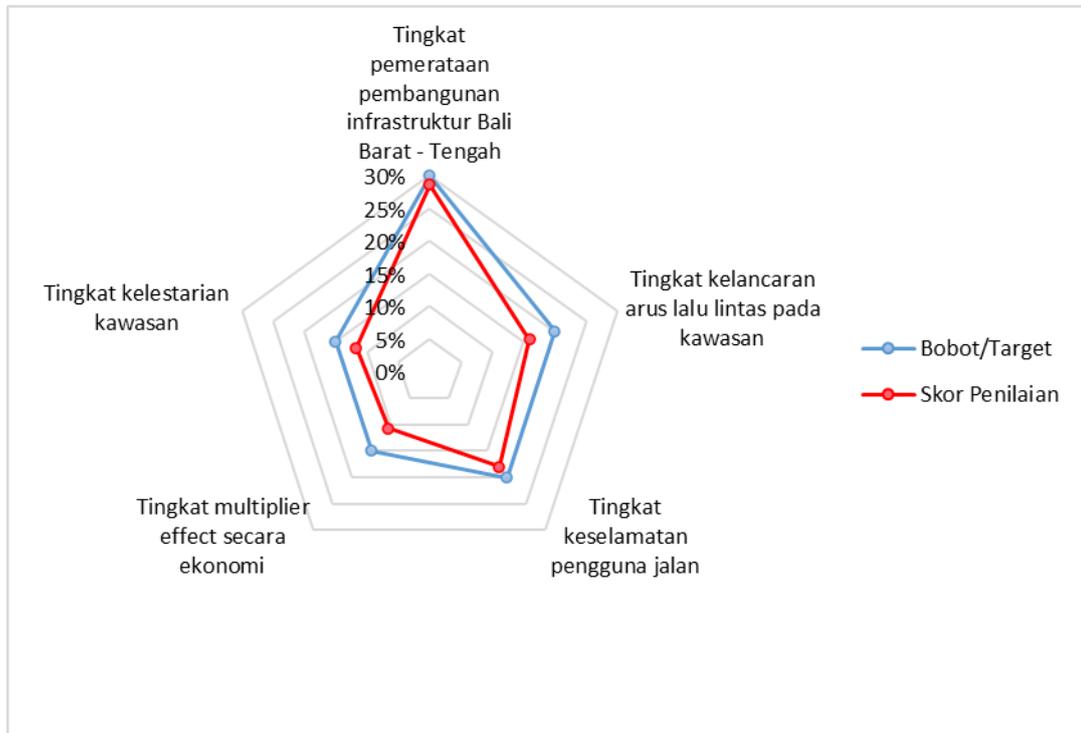
Gambar 8.22
Persentase *Outcome* Infrastruktur Pembangunan Turyapada Tower 6.0 KBS

Tower ini diyakini memiliki outcome utama dalam penyebaran jangkauan akses komunikasi bagi daerah Bali Utara. Apalagi akan ditunjang dengan fasilitas edukasi dan pariwisata.

11) **Outcome Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi (Gilimanuk-Mengwi)**

Tol Jagat Kerthi Bali akan menghubungkan Bali Barat (Gilimanuk) dan Bali Tengah (Mengwi), dimana selama ini dihubungkan melalui satu jalur utama. Seperti kita ketahui bahwa Gilimanuk adalah pintu gerbang Bali di bagian barat, sehingga arus distribusi barang menuju Pulau Jawa dilakukan melalui Gilimanuk. Tingginya arus kendaraan sering menyebabkan penumpukan kendaraan dan kemacetan, sehingga Pembangunan jalan tol dinilai penting.

Terdapat 5 variabel yang diuraikan dalam 12 indikator untuk menilai *outcome* pembangunan jalan tol tersebut.



Gambar 8.23
Persentase *Outcome* Infrastruktur Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi

Jalan tol ini juga merupakan bentuk pemerataan infrastruktur wilayah Bali, terutama wilayah Bali Barat. Selain itu juga akan berdampak besar dalam kelancaran arus lalu lintas kawasan.

BAB IX

STRATEGI PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI

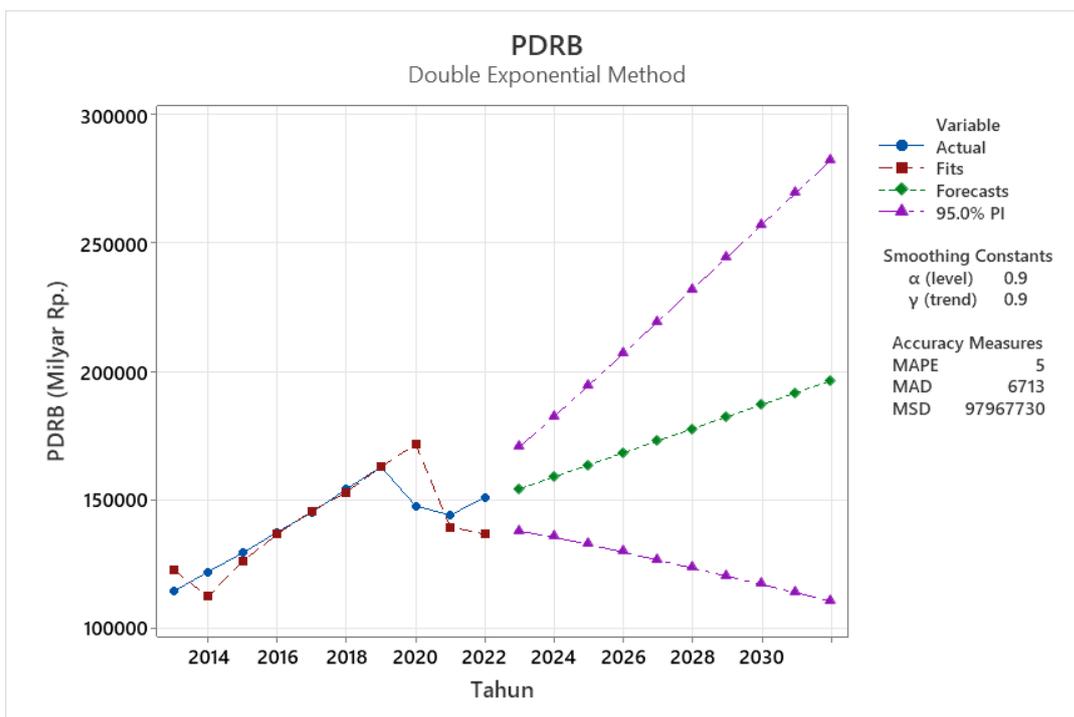
Strategi pembangunan yang dimaksud dalam kajian ini disusun dengan mempertimbangkan isu dan kondisi perekonomian saat ini. Sebelum penyusunan strategi, dilakukan identifikasi faktor strategis internal (*strengths* dan *weaknesses*) dan eksternal (*opportunities* dan *threats*) dalam Pembangunan Bali Era Baru. Selanjutnya adalah perhitungan skor dan posisi dalam matriks SWOT, sehingga pemilihan strategi dapat dilakukan. Namun sebelumnya dilakukan pula analisis peramalan kondisi indikator makro ekonomi Bali.

9.1. Peramalan Indikator Makro Ekonomi Bali

Data dasar untuk peramalan PDRB Provinsi Bali menggunakan PDRB selama 10 tahun (tahun 2013 s.d. 2022), dan peramalan dilakukan untuk waktu 10 tahun ke depan, dengan tiga skenario, yaitu *forecast*, optimis, dan pesimis. Adapun hasil peramalan disajikan pada Tabel 9.1 dan Gambar 9.1.

Tabel 9.1
Aktual dan Peramalan PDRB Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

PDRB Aktual (Milyar Rp)			PDRB Forecasting (Milyar Rp)				
Periode	Tahun	PDRB	Periode	Tahun	PDRB		
					Forecast	Optimis	Pesimis
1	2013	114,104	11	2023	154,085	170,533	137,637
2	2014	121,788	12	2024	158,781	182,303	135,260
3	2015	129,127	13	2025	163,478	194,514	132,442
4	2016	137,296	14	2026	168,174	206,910	129,438
5	2017	144,933	15	2027	172,870	219,399	126,342
6	2018	154,073	16	2028	177,567	231,941	123,192
7	2019	162,693	17	2029	182,263	244,516	120,010
8	2020	147,499	18	2030	186,959	257,114	116,805
9	2021	143,865	19	2031	191,656	269,726	113,585
10	2022	150,821	20	2032	196,352	282,350	110,354



Gambar 9.1
Grafik Aktual dan Peramalan PDRB Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

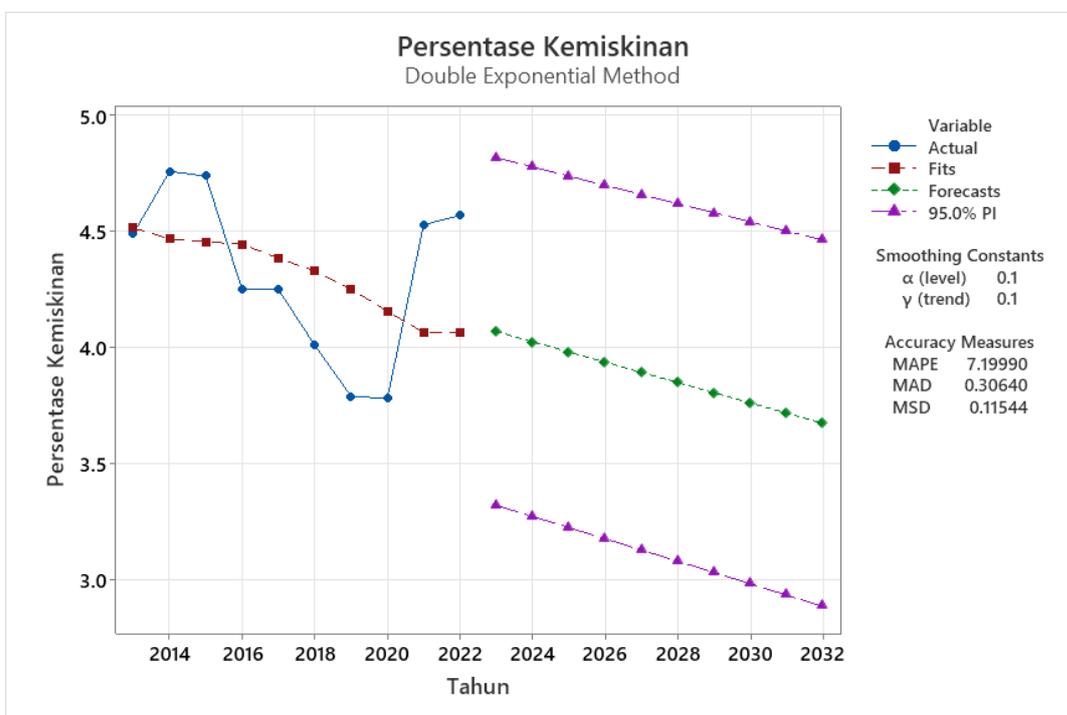
Hasil *forecast* PDRB Bali sebagaimana pada Tabel 9.1 maupun Gambar 9.1 menunjukkan bahwa PDRB Bali akan mengalami peningkatan. Peramalan ini juga telah dilakukan uji coba pada beberapa taraf α (yaitu 0,1; 0,5; dan 0,9) dimana hasil terbaik ditunjukkan pada $\alpha = 0,9$. Nilai MAPE pada Gambar 7 sebesar 5% (<10%) menunjukkan bahwa metode pendugaan mempunyai kemampuan peramalan yang sangat baik.

Peramalan Kemiskinan di Provinsi Bali

Data dasar untuk peramalan kemiskinan Provinsi Bali menggunakan persentase kemiskinan selama 10 tahun (tahun 2013 s.d. 2022), dan peramalan dilakukan untuk waktu 10 tahun ke depan, dengan tiga skenario, yaitu *forecast*, optimis, dan pesimis. Adapun hasil peramalan disajikan pada Tabel 9.2 dan Gambar 9.2.

Tabel 9.2
Aktual dan Peramalan Persentase Kemiskinan Provinsi Bali
Tahun 2013 s.d. 2032

Persentase Kemiskinan Aktual			Persentase Kemiskinan <i>Forecasting</i>				
Periode	Tahun	% Kemiskinan	Periode	Tahun	% Kemiskinan		
					Forecast	Optimis	Pesimis
1	2013	4.49	11	2023	4.07	3.32	4.82
2	2014	4.76	12	2024	4.03	3.27	4.78
3	2015	4.74	13	2025	3.98	3.22	4.74
4	2016	4.25	14	2026	3.94	3.17	4.70
5	2017	4.25	15	2027	3.89	3.13	4.66
6	2018	4.01	16	2028	3.85	3.08	4.62
7	2019	3.79	17	2029	3.81	3.03	4.58
8	2020	3.78	18	2030	3.76	2.98	4.54
9	2021	4.53	19	2031	3.72	2.93	4.50
10	2022	4.57	20	2032	3.67	2.88	4.46



Gambar 9.2
Grafik Aktual dan Peramalan Persentase Kemiskinan Provinsi Bali
Tahun 2013 s.d. 2032

Hasil *forecast* persentase kemiskinan Bali sebagaimana pada Tabel 9.2 maupun Gambar 9.2 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan Bali cenderung menurun. Peramalan ini juga menggunakan taraf $\alpha = 0,1$, dimana memberikan nilai

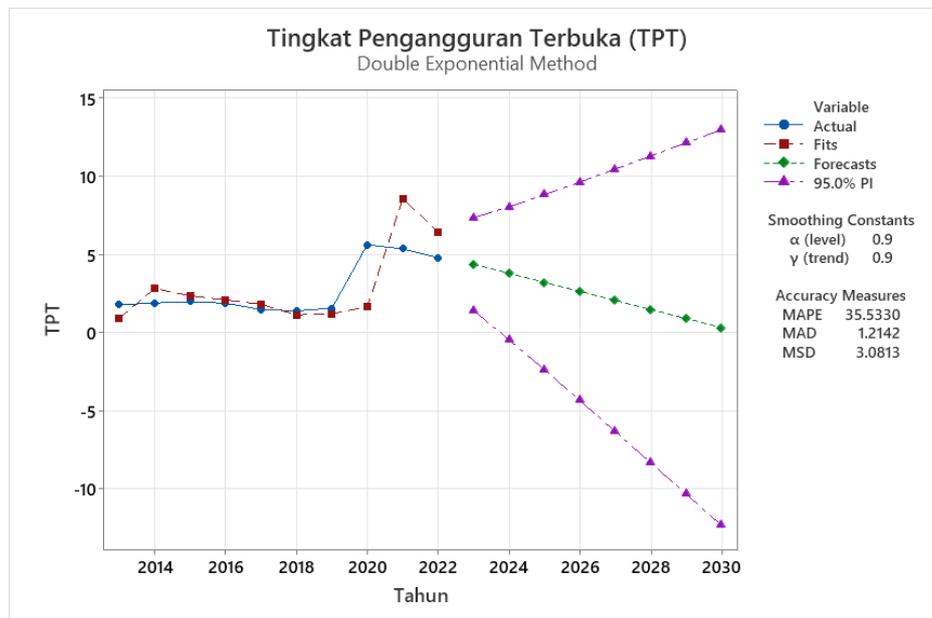
MAPE pada Gambar 9.2 sebesar 7,19% (<10%) menunjukkan bahwa metode pendugaan mempunyai kemampuan peramalan yang sangat baik.

Peramalan Pengangguran di Provinsi Bali

Data dasar untuk peramalan pengangguran Provinsi Bali menggunakan TPT selama 10 tahun (tahun 2013 s.d. 2022), dan peramalan dilakukan untuk waktu 8 tahun ke depan, dengan tiga skenario, yaitu *forecast*, optimis, dan pesimis. Adapun hasil peramalan disajikan pada Tabel 9.3 dan Gambar 9.3.

Tabel 9.3
Aktual dan Peramalan TPT Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2030

TPT Aktual			TPT Forecasting				
Periode	Tahun	% TPT	Periode	Tahun	% TPT		
					Forecast	Optimis	Pesimis
1	2013	1.79	11	2023	4.38	1.41	7.36
2	2014	1.9	12	2024	3.80	-	8.06
3	2015	1.99	13	2025	3.22	-	8.84
4	2016	1.89	14	2026	2.65	-	9.65
5	2017	1.48	15	2027	2.07	-	10.48
6	2018	1.4	16	2028	1.49	-	11.32
7	2019	1.57	17	2029	0.91	-	12.17
8	2020	5.63	18	2030	0.33	-	13.01
9	2021	5.37					
10	2022	4.8					



Gambar 9.3
Grafik Aktual dan Peramalan TPT Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2030

Forecast dilakukan hanya 8 (delapan) tahun karena setelahnya *forecast* cenderung negatif. Hasil *forecast* TPT Bali sebagaimana pada Tabel 6 maupun Gambar 9 menunjukkan bahwa TPT Bali diramalkan menurun. Peramalan ini juga telah dilakukan uji coba pada beberapa taraf α (yaitu 0,1; 0,5; dan 0,9) dimana hasil terbaik ditunjukkan pada $\alpha = 0,9$. Nilai MAPE pada Gambar 9 sebesar 35% ($20\% < \text{MAPE} < 50\%$) menunjukkan bahwa metode pendugaan mempunyai kemampuan peramalan yang masih layak.

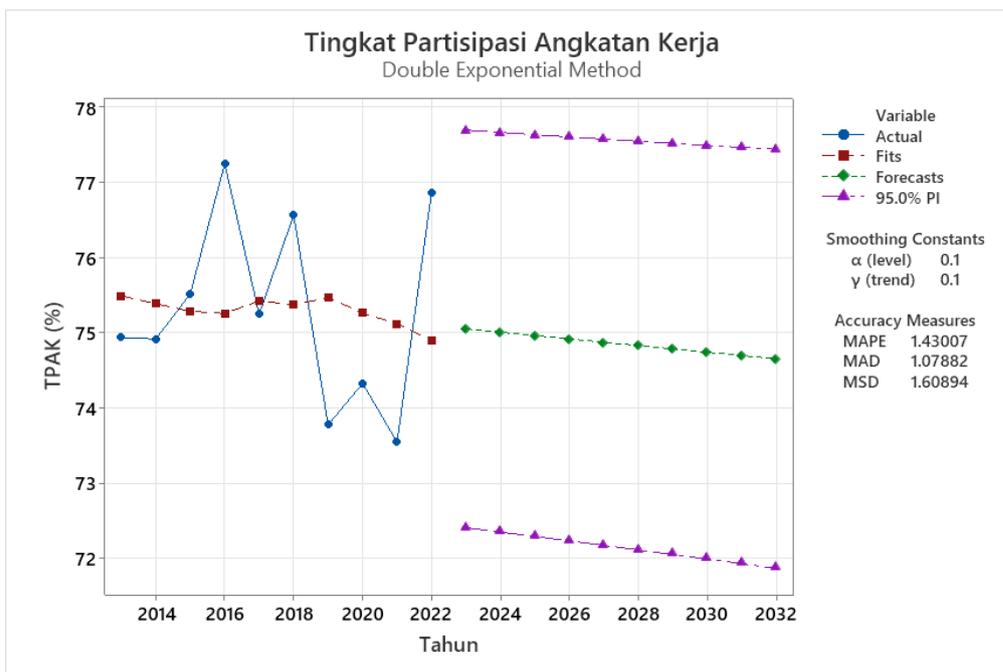
Peramalan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Bali

Data dasar untuk peramalan TPAK Provinsi Bali menggunakan TPAK selama 10 tahun (tahun 2013 s.d. 2022), dan peramalan dilakukan untuk waktu 10 tahun ke depan, dengan tiga skenario, yaitu *forecast*, optimis, dan pesimis. Adapun hasil peramalan disajikan pada Tabel 9.4 dan Gambar 9.4.

Tabel 9.4
Aktual dan Peramalan TPAK Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

TPAK Aktual			TPAK Forecasting				
Periode	Tahun	% TPAK	Periode	Tahun	% TPAK		
					Forecast	Optimis	Pesimis
1	2013	74.93	11	2023	75.04	77.69	72.40
2	2014	74.91	12	2024	75.00	77.66	72.34
3	2015	75.51	13	2025	74.96	77.63	72.29
4	2016	77.24	14	2026	74.91	77.60	72.23
5	2017	75.24	15	2027	74.87	77.57	72.17
6	2018	76.56	16	2028	74.82	77.54	72.11
7	2019	73.77	17	2029	74.78	77.51	72.05
8	2020	74.32	18	2030	74.74	77.49	71.99
9	2021	73.54	19	2031	74.69	77.46	71.92
10	2022	76.86	20	2032	74.65	77.43	71.86

Hasil *forecast* TPAK Bali sebagaimana pada Tabel 9.4 maupun Gambar 9.4 menunjukkan bahwa TPAK Bali diramalkan menurun. Peramalan ini juga telah dilakukan uji coba pada beberapa taraf α (yaitu 0,1; 0,5; dan 0,9) dimana hasil terbaik ditunjukkan pada $\alpha = 0,1$. Nilai MAPE pada Gambar 10 sebesar 1,43% ($< 10\%$) menunjukkan bahwa metode pendugaan mempunyai kemampuan peramalan yang sangat baik.



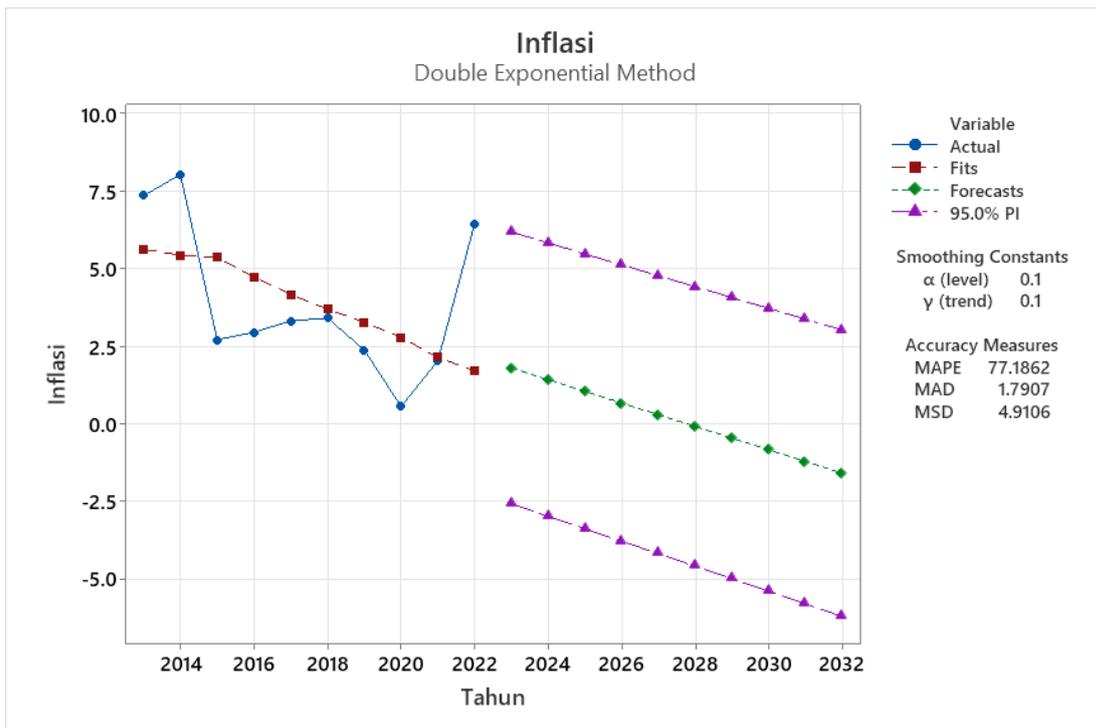
Gambar 9.4
Grafik Aktual dan Peramalan TPAK Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

Peramalan Inflasi di Provinsi Bali (Kota Denpasar)

Data dasar untuk peramalan inflasi Provinsi Bali menggunakan data inflasi selama 10 tahun (tahun 2013 s.d. 2022), yaitu inflasi Kota Denpasar, dan peramalan dilakukan untuk waktu 10 tahun ke depan, dengan tiga skenario, yaitu *forecast*, optimis, dan pesimis. Adapun hasil peramalan disajikan pada Tabel 8 dan Gambar 11.

Tabel 9.5
Aktual dan Peramalan Inflasi Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

Inflasi Aktual			Inflasi Forecasting				
Periode	Tahun	% Inflasi	Periode	Tahun	% Inflasi		
					Forecast	Optimis	Pesimis
1	2013	7.35	11	2023	1.79	-	6.18
2	2014	8.03	12	2024	1.41	-	5.82
3	2015	2.7	13	2025	1.04	-	5.47
4	2016	2.94	14	2026	0.66	-	5.12
5	2017	3.31	15	2027	0.28	-	4.76
6	2018	3.4	16	2028	-	-	4.41
7	2019	2.37	17	2029	-	-	4.06
8	2020	0.55	18	2030	-	-	3.71
9	2021	2.01	19	2031	-	-	3.36
10	2022	6.44	20	2032	-	-	3.02



Gambar 9.5
Grafik Aktual dan Peramalan Inflasi Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

Hasil *forecast* inflasi Bali sebagaimana pada Tabel 8 maupun Gambar 11 menunjukkan bahwa inflasi Bali diramalkan menurun. Peramalan ini juga telah dilakukan uji coba pada beberapa taraf α (yaitu 0,1; 0,5; dan 0,9) dimana hasil terbaik ditunjukkan pada $\alpha = 0,1$. Nilai MAPE pada Gambar 11 sebesar 77% (>50%) menunjukkan bahwa metode pendugaan mempunyai kemampuan kurang baik.

9.2. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Identifikasi faktor strategis berkaitan dengan Pembangunan Bali Era Baru, yaitu faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal.

9.2.1. Identifikasi Faktor Internal

Identifikasi faktor internal dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang dimiliki seperti potensi sektor basis perekonomian Bali, geografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana. Selanjutnya, dilakukan juga identifikasi terhadap berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Bali Era Baru.

1) Faktor-faktor Kekuatan (*Strengths*) Daerah

- a) Luas wilayah yang tidak terlalu besar sangat memungkinkan untuk pembangunan yang terintegrasi

Luas wilayah Provinsi Bali adalah secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km² atau 0,29% dari luas Kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota. Sehingga pengaturan wilayah dan perencanaan pembangunan sangat memungkinkan untuk dilakukan secara terintegrasi karena luas wilayah yang tidak terlalu besar.

- b) Letak wilayah strategis

Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, dimana pulau terbesar adalah Pulau Bali. Pulau Bali memiliki letak strategis lantaran menghubungkan lalu lintas laut dan darat antara Pulau Jawa dengan Nusa Tenggara.

- c) Bentang alam yang sangat mendukung sektor pariwisata

Provinsi Bali merupakan daerah tujuan wisata terdepan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran bentang alam Bali yang eksotik. Beragam bentang alam yang dimiliki Provinsi Bali, yakni gunung, pantai, laut, bukit, hingga sungai. Bahkan banyak pantai di Provinsi Bali yang dianggap sebagai pantai-pantai terindah di dunia.

- d) Sektor basis perekonomian Bali telah berkembang dengan baik

Hasil analisis menunjukkan bahwa Bali memiliki beberapa sektor basis, terutama sektor pariwisata yang diproyeksi dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

- e) Keberadaan Desa Adat yang berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya dan kearifan lokal Bali sekaligus ujung tombak Pembangunan di Bali. Terdapat dua jenis desa di Bali, yaitu Desa (Desa Dinas) dan Desa Adat, dimana Desa Dinas berkaitan dengan pemerintahan, sedangkan Desa Adat menangani tentang adat dan keagamaan Hindu Bali. Desa Adat di Bali tetap eksis dan semakin kuat sehingga juga menjadi ujung tombak Pembangunan di Bali. Integritas budaya Bali adalah aspek yang tak tergantikan dari daya tariknya bagi para wisatawan.

- f) Diterbitkannya berbagai regulasi, serta pembentukan dan penataan kelembagaan yang mendukung genuine Bali
- Adat istiadat dan kearifan lokal Bali tercermin dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali menyadari pentingnya regulasi dalam menjaganya, sehingga terbit berbagai regulasi berkaitan dengan adat maupun kearifan lokal Bali. Beberapa diantaranya terkait Desa Adat, penggunaan pakaian adat Bali, buah lokal Bali, arak bali, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga membentuk dan memperkuat kelembagaan adat di Bali, seperti pembentukan Majelis Desa Adat dan organisasi seperti PAKIS Bali (Paiketan Krama Istri).

2) Faktor-faktor Kelemahan (*Weaknesses*) Daerah

- a) Pendidikan penduduk bekerja masih relatif rendah
- Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2022, penduduk bekerja di Provinsi Bali masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 30,98%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (Universitas) sebesar 12,68%.
- b) Terbatasnya minat generasi muda untuk menjadi petani, diikuti dengan ancama alih fungsi lahan pertanian
- Pertanian merupakan *way of life* Masyarakat Bali, namun rata-rata usia petani di Bali saat ini sudah di atas 50 tahun, dan di sisi lain minat generasi muda menjadi petani semakin rendah (mediaindonesia.com). Selain itu, masifnya alih fungsi lahan pertanian di Bali untuk industri dan permukiman juga menjadi ancaman terhadap eksistensi subak dan sektor pertanian di Bali. Apalagi secara ekonomi, pekerjaan menjadi petani belum menjanjikan keuntungan, dimana pada akhir 2022 tercatat bahwa pengeluaran petani tercatat masih lebih tinggi dibandingkan penerimaan petani (djkn.kemenkeu.go.id).
- c) Keterbatasan anggaran dan kondisi PAD Pemerintah Daerah di Bali yang terdampak pandemi Covid-19

Sumber utama PAD kabupaten/kota di Bali adalah dari sektor pariwisata, sehingga ketika terjadi pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan PAD, terutama tahun 2020 dan 2021. Namun upaya recovery ekonomi memang telah memberikan sinyal positif bagi sektor pariwisata. Selain itu memang untuk pembangunan, terutama infrastruktur, diperlukan anggaran yang tidak sedikit.

d) Ketimpangan pembangunan Bali Utara, Bali Selatan, dan Bali Timur

Selama ini akselerasi pembangunan di wilayah Bali Utara, Bali Selatan, dan Bali Timur cenderung timpang. Wakil Gubernur Bali Tjorkorda Oka Artha Ardana Sukawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Bali Selatan selama ini jauh lebih cepat dibandingkan Bali utara maupun Bali Timur. Dimana Bali Selatan lebih banyak tersentuh oleh pembangunan, terutama akibat masifnya perkembangan pariwisata di Bali Selatan.

e) Keterbatasan sarana transportasi publik dan kemacetan pada daerah pariwisata

Menurut Ketua MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Bali, perkiraan Masyarakat Bali menggunakan transportasi publik di bawah 5 persen, meskipun mulai ada peningkatan seiring banyaknya pilihan moda transportasi, termasuk melalui platform online. Jumlah tersebut tentunya masih belum sesuai harapan, dimana Masyarakat Bali lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi (terutama sepeda motor) dalam mobilitas (radarbali.jawapos.com). Kondisi lalu lintas diperparah dengan kemacetan yang terjadi terutama pada daerah-daerah pariwisata.

f) Belum adanya solusi masalah lingkungan, seperti sampah dan abrasi.

Pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah di Bali, bukan hanya sampah di darat, namun juga sampah di wilayah laut. Apalagi pada musim-musim tertentu, volume sampah kiriman di daerah Pantai (yang juga destinasi wisata) meningkat sangat signifikan. Selain itu, adanya abrasi Pantai juga menjadi isu lingkungan yang perlu dipikirkan dengan serius.

9.2.2. Identifikasi Faktor Eksternal

Identifikasi faktor eksternal dilakukan untuk mengetahui dan mengelompokkan peluang-peluang (*opportunities*) yang tersedia dan ancaman-ancaman (*threats*) yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Bali Era Baru.

Faktor-faktor eksternal yang jika dikelola dapat mendatangkan keuntungan atau manfaat yang besar dimasa yang akan datang dikategorikan sebagai *opportunity* (peluang). Sebaliknya jika faktor eksternal yang dinilai tidak mendatangkan manfaat, menjadi penghalang atau menghambat dalam pencapaian visi dan misi, dikategorikan sebagai *threat* (ancaman). Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan

1) Faktor-faktor Peluang (*Opportunities*) Daerah

- a) Tingginya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali.

Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Bali, PMA mencapai Rp2,66 Triliun pada kuartal I 2023, sementara PMDN hanya Rp1,41 Triliun.

- b) Akselerasi pemulihan sektor pariwisata seiring dengan masih tingginya minat wisatawan ke Bali, bertambahnya *direct flight* ke Bali, serta berbagai MICE event berskala nasional dan internasional yang diselenggarakan di Bali.

Bali memang dikenal sebagai salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Berlanjutnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur terkait pariwisata, dengan tetap terjaganya antusiasme wisman untuk kembali berkunjung ke Bali khususnya wisatawan asal Tiongkok, serta sejumlah maskapai penerbangan internasional yang terus membuka penerbangan langsung dan meningkatkan frekuensi penerbangan ke Bali akan menjadi katalis peningkatan kunjungan wisman. Peningkatan kunjungan wisatawan juga didukung oleh penyelenggaraan MICE event berskala nasional maupun internasional sehingga turut mendorong meningkatnya kunjungan wisman ke Bali. Minat berwisata ke Bali masih tinggi tercermin dari hasil pengolahan

big data Google trend yang menunjukkan tren pencarian destinasi wisata Bali yang tetap tinggi meski sedikit melandai pada triwulan I 2023 (djkn.kemenkeu.go.id).

- c) Alokasi dana pusat untuk program pembangunan di Bali
Pemerintah memiliki alokasi anggaran yang dapat ditransfer kepada daerah atau direalisasikan untuk kegiatan Pembangunan di daerah, termasuk di Bali. Selama era pemerintahan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, telah banyak alokasi anggaran Pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Pembangunan infrastruktur di Bali.
- d) Adanya kebijakan dan regulasi KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dalam penyediaan infrastruktur
Pemerintah daerah dimungkinkan untuk melakukan Kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini merupakan suatu peluang dalam rangka akselerasi Pembangunan infrastruktur di Bali.
- e) Penetapan dua kawasan di Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus
KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama pengembangan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemertaan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kehadiran KEK diharapkan membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri- industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai. Hingga tahun 2023 terdapat 20 KEK di Indonesia, dimana dua diantaranya berlokasi di Bali, yaitu KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali (kek.go.id).

2) Faktor-faktor Ancaman (*Threats*) Daerah

- a) Investasi sektor pariwisata di Bali lebih didominasi asing.

Dominasi asing dalam investasi sektor pariwisata menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat lokal hanya sebagai penonton. Masuknya bisnis dan investor asing, bersama dengan komodifikasi budaya lokal, telah menyebabkan perpindahan dan marginalisasi komunitas lokal. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, penanaman modal dalam negeri di Pulau Dewata selama 2020 mencapai Rp5.432,7 miliar untuk 2.513 proyek dan penanaman modal asing (PMA) pada periode sama senilai US\$293,3 juta untuk 3.967 proyek. Porsi PMA ke sektor hotel dan restoran mencapai 52 persen, dengan nilai US\$152,516 juta atau Rp2,19 triliun. Porsi PMDN ke sektor hotel dan restoran adalah sebesar 45 persen atau senilai Rp2.444,7 miliar. Artinya, dari segi nilai, investasi sektor hotel dan restoran pada 2020 memang didominasi oleh penanaman modal asing (bisnisbali.com).

b) Ancaman eksternalitas gentrifikasi pada daerah-daerah pusat pariwisata baru

Menurut Lees et.al (2007), gentrifikasi merupakan sebuah proses transformasi kelas sosial atau sebidang lahan kosong di kawasan perkotaan yang tadinya dihuni oleh masyarakat kelas bawah menjadi kawasan kelompok kelas menengah yang biasanya diperuntukkan sebagai kawasan komersial. Gentrifikasi juga sering dimaknai sebagai keberhasilan Pembangunan oleh pemerintah, namun tak jarang justru mengakibatkan penduduk asli menjual lahannya dan memilih tempat baru untuk tinggal. Hal ini juga dapat mengancam Bali, terutama pada kawasan-kawasan yang pembangunan akomodasi dan permukiman berkembang dengan pesat dan simultan.

c) Kemungkinan persaingan dengan destinasi wisata lain di luar Bali

Program “10 Bali Baru”, termasuk 5 Destinasi Super Prioritas dapat menjadi pesaing bagi pariwisata Bali. Hal ini tentunya dapat terjadi bila Bali tidak mampu mempertahankan daya tarik wisatanya.

d) Adanya konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan ancaman resesi global

Terjadinya konflik geopolitik Rusia-Ukraina telah menyebabkan menyebabkan naiknya jumlah penduduk asal Rusia dan Ukraina yang berkunjung ke Bali untuk menghindari konflik dan mencari suasana yang lebih kondusif. Tidak jarang dengan visa wisata, mereka juga bekerja, sehingga akan terjadi persaingan dengan warga lokal. Selain itu, ancaman resesi global juga dikhawatirkan berdampak pada *recovery* ekonomi Bali.

e) Pengaruh kebudayaan luar yang masuk ke Bali.

Tantangan terberat bagi pemimpin umat Hindu di Bali adalah dampak negatif globalisasi. Terutama berkembangnya paham hedonisme yang menonjolkan kepuasan material belaka (nasional.tempo.co.id).

9.3. Strategi Pembangunan Perekonomian Dalam Rangka Akselerasi Mewujudkan Bali Era Baru

Hasil analisis SWOT di atas dapat dikembangkan secara kuantitatif untuk mengetahui posisi Provinsi Bali dalam diagram matriks SWOT, dimana tahap ini dipisahkan antara analisis faktor strategis internal dan eksternal. Analisis Faktor Strategis Internal (IFAS – *Internal Strategic Factors Analysis Summary*), didapatkan hasil sebagaimana Tabel 9.6.

Tabel 9.6
Analisis Faktor Strategis Internal

Kekuatan (<i>Strengths</i>)		Bobot	Rating	Skor
1	Luas wilayah yang tidak terlalu besar, sangat memungkinkan untuk pembangunan yang terintegrasi	0.11	5	0.55
2	Letak wilayah strategis	0.08	4	0.32
3	Bentang alam yang sangat mendukung sektor pariwisata	0.08	4	0.32
Kekuatan (<i>Strengths</i>)		Bobot	Rating	Skor
4	Sektor basis perekonomian Bali telah berkembang dengan baik	0.09	3	0.27
5	Keberadaan Desa Adat yang berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya dan kearifan lokal Bali sekaligus ujung tombak Pembangunan di Bali	0.09	5	0.45

6	Diterbitkannya berbagai regulasi, serta pembentukan dan penataan kelembagaan yang mendukung genuine Bali	0.08	3	0.24
Sub Total Kekuatan (<i>Strengths</i>)		0.53		2.15
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)				
1	Pendidikan penduduk bekerja masih relatif rendah	0.07	4	0.28
2	Terbatasnya minat generasi muda untuk menjadi petani, diikuti dengan ancama alih fungsi lahan pertanian	0.08	3	0.24
3	Keterbatasan anggaran dan kondisi PAD Pemerintah Daerah di Bali yang terdampak pandemi Covid-19	0.08	5	0.4
4	Ketimpangan pembangunan Bali Utara, Bali Selatan, dan Bali Timur	0.05	3	0.15
5	Keterbatasan sarana transportasi publik dan kemacetan pada daerah pariwisata	0.09	5	0.45
6	Belum adanya solusi masalah lingkungan, seperti sampah dan abrasi	0.1	4	0.4
Sub Total Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)		0.47		1.92
Total Faktor Internal		1		4.07

Sedangkan dalam Analisis Faktor Strategis Eksternal (EFAS – *External Strategic Factors Analysis Summary*), diperoleh hasil sebagaimana disajikan dalam Tabel 9.7.

Tabel 9.7
Analisis Faktor Strategis Eksternal

Peluang (<i>Opportunities</i>)		Bobot	Rating	Skor
1	Tingginya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali	0.12	4	0.48
2	Akselerasi pemulihan sektor pariwisata seiring dengan masih tingginya minat wisatawan ke Bali, bertambahnya direct flight ke Bali, serta berbagai MICE event berskala nasional dan internasional yang diselenggarakan di Bali	0.08	4	0.32
Peluang (<i>Opportunities</i>)		Bobot	Rating	Skor
3	Alokasi dana pusat untuk program pembangunan di Bali	0.15	5	0.75

4	Adanya kebijakan dan regulasi KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dalam penyediaan infrastruktur	0.11	4	0.44
5	Penetapan dua kawasan di Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	0.12	4	0.48
Sub Total Peluang (Opportunities)		0.58		2.47
Ancaman (Threats)				
1	Investasi sektor pariwisata di Bali lebih didominasi asing	0.1	4	0.4
2	Ancaman eksternalitas gentrifikasi pada daerah-daerah pusat pariwisata baru	0.12	5	0.6
3	Kemungkinan persaingan dengan destinasi wisata lain di luar Bali	0.1	4	0.4
4	Adanya konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan ancaman resesi global	0.05	3	0.15
5	Pengaruh kebudayaan luar yang masuk ke Bali	0.05	3	0.15
Sub Total Ancaman (Threats)		0.42		1.7
Total Faktor Eksternal		1		4.17

Berdasarkan Tabel 9.6 dan Tabel 9.7 diperoleh hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 9.8.

Tabel 9.8
Hasil Analisis Faktor Strategis Internal dan Eksternal

IFAS	Nilai
Sub Total Analisis Kekuatan (a)	2,15
Sub Total Analisis Kelemahan (b)	1,92
Nilai (a) dikurangi (b)	0,23
EFAS	
Sub Total Analisis Peluang (c)	2,47
Sub Total Analisis Ancaman (d)	1,70
Nilai (c) dikurangi (d)	0,77
Koordinat Posisi dalam Diagram Matriks SWOT	(0,23 ; 0,77)

Sesuai dengan Tabel 9.8 tersebut, maka dapat diketahui bahwa Provinsi Bali berada pada kuadran I, mengingat nilai koordinat IFAS dan EFAS sama-sama memiliki nilai positif.

Dari hasil ini, ditarik kesimpulan bahwa Provinsi Bali merupakan daerah yang kuat dan memiliki banyak peluang yang harus dioptimalkan. Strategi pembangunan yang perlu dikembangkan, menurut Teori Matriks SWOT, adalah Strategi progresif, yakni meneruskan pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, dengan kebijakan dan program yang lebih kreatif guna meraih kemajuan pembangunan secara maksimal.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, dapat diketahui bahwa Pembangunan Bali Era Baru memiliki potensi dan kesempatan yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Krama Bali. Namun, kekuatan dan kesempatan besar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena Provinsi Bali masih memiliki kelemahan serta ancaman eksternal yang sulit dikelola dan dikendalikan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu disusun strategi pembangunan daerah berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagaimana dijabarkan di atas. Strategi ini mencakup empat strategi utama sebagai berikut.

Pertama adalah strategi S – O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua adalah strategi W – O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga adalah strategi S – T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Keempat, strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Secara lebih lengkap, strategi tersebut disajikan dalam Tabel 9.9.

Tabel 9.9
Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan Analisis SWOT

		Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Eksternal	Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas wilayah yang tidak terlalu besar sangat memungkinkan untuk pembangunan yang terintegrasi. 2. Letak wilayah strategis. 3. Bentang alam yang sangat mendukung sektor pariwisata. 4. Sektor basis perekonomian Bali telah berkembang dengan baik. 5. Keberadaan Desa Adat yang berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya dan kearifan lokal Bali sekaligus ujung tombak Pembangunan di Bali. 6. Diterbitkannya berbagai regulasi, serta pembentukan dan penataan kelembagaan yang mendukung genuine Bali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan penduduk bekerja masih relatif rendah. 2. Terbatasnya minat generasi muda untuk menjadi petani, diikuti dengan ancaman alih fungsi lahan pertanian. 3. Keterbatasan anggaran dan kondisi PAD Pemerintah Daerah di Bali yang terdampak pandemi Covid-19. 4. Ketimpangan pembangunan Bali Utara, Bali Selatan, dan Bali Timur. 5. Keterbatasan sarana transportasi publik dan kemacetan pada daerah pariwisata. 6. Belum adanya solusi masalah lingkungan, seperti sampah dan abrasi.
	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi S - O	Strategi W - O
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali. 2. Akselerasi pemulihan sektor pariwisata seiring dengan masih tingginya minat wisatawan ke Bali, bertambahnya <i>direct flight</i> ke Bali, serta berbagai MICE event berskala nasional dan internasional yang diselenggarakan di Bali. 3. Alokasi dana pusat untuk program pembangunan di Bali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi, termasuk dengan upaya pemerataan investasi PMA di Bali. 2. Promosi pariwisata dan kerjasama untuk meningkatkan penyelenggaraan MICE event di Bali, dimana event dapat diselenggarakan tidak hanya di kawasan perhotelan, namun juga kawasan wisata alam dan perdesaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM <i>krama</i> Bali, agar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan permintaan pasar dan lapangan usaha yang mendukung investasi maupun KEK. 2. Pemerataan program pembangunan, terutama infrastruktur, yang menyasar kawasan Bali Utara dan Bali Timur, termasuk dengan skema KPBU. 3. Merancang rekayasa lalu lintas untuk mengatasi dan mencegah kemacetan

<p>4. Adanya kebijakan dan regulasi KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dalam penyediaan infrastruktur.</p> <p>5. Penetapan dua kawasan di Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).</p>	<p>3. Mengupayakan agar dana pusat dapat dialokasikan untuk Pembangunan Bali secara merata.</p> <p>4. Pelibatan Desa Adat dalam akselerasi berbagai program Pembangunan.</p>	<p>pada kawasan pariwisata, kawasan pusat aktivitas, serta jalur-jalur utama.</p> <p>4. Mengoptimalkan penanganan sampah berbasis sumber, serta melakukan upaya memperoleh alokasi dana pusat serta CSR untuk pengelolaan sampah dan abrasi.</p>
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi S - T	Strategi W - T
<p>1. Investasi sektor pariwisata di Bali lebih didominasi asing.</p> <p>2. Ancaman eksternalitas gentrifikasi pada daerah-daerah pusat pariwisata baru.</p> <p>3. Kemungkinan persaingan dengan destinasi wisata lain di luar Bali.</p> <p>4. Adanya konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan ancaman resesi global.</p> <p>5. Pengaruh kebudayaan luar yang masuk ke Bali.</p>	<p>1. Realisasi investasi asing agar tetap dimonitoring dan dievaluasi, sehingga berdampak nyata bagi Masyarakat lokal.</p> <p>2. Penguatan peran Desa Adat untuk ikut mencegah eksternalitas gentrifikasi serta penguatan karakter Krama Bali untuk mencegah diadopsinya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Bali.</p> <p>3. Penguatan regulasi dan kelembagaan terkait wisatawan asing, serta upaya pengawasannya dengan melibatkan Desa Adat.</p> <p>4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor basis perekonomian, terutama sektor primer, sehingga impor dapat dikurangi, dan inflasi dapat dikendalikan.</p>	<p>1. Investasi asing agar diarahkan pada sektor-sektor yang berpeluang untuk SDM krama Bali, di samping upaya peningkatan pendidikan dan <i>skill</i> krama Bali.</p> <p>2. Pemerataan pengembangan pariwisata di Bali Utara dan Bali Timur yang berbasis CBT, sehingga mampu menjadi daya tarik wisata baru.</p> <p>3. Edukasi bagi krama Bali di daerah rawan gentrifikasi untuk mampu mengelola potensi dan aset yang dimiliki, tentunya dengan melibatkan Desa Adat.</p> <p>4. CSR yang bersumber dari asing agar diarahkan juga untuk menangani permasalahan lingkungan yang ada di Bali, seperti sampah dan abrasi.</p>

BAB X

SIMPULAN DAN SARAN

10.1. Simpulan

Pembangunan Bali Era Baru merupakan Pembangunan Bali Era Baru yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana disajikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Arahan kebijakan Pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Bali Era Baru telah dirumuskan secara jelas dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali. Dimana setiap tahun memiliki tema fokus pembangunan, yang dijadikan pedoman dalam penyusunan strategi dan program pembangunan. Pemerintah Provinsi Bali memiliki lima bidang prioritas pembangunan, dan didukung oleh pembangunan infrastruktur sebagai penunjang. Apalahi 44 tonggak penanda Bali Era Baru telah menunjukkan realisasi nyata dari Pembangunan Bali Era Baru. Evaluasi dan penyesuaian perlu dilakukan untuk merespons pandemi Covid-19, dimana sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali juga telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk *recovery* akibat pandemi Covid-19. Ketika perekonomian Bali kembali pulih maka pemerintah perlu fokus kembali pada target Pembangunan, terutama pemenuhan standar hidup layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali.
- 2) Ditinjau dari capaian Pembangunan daerah berdasarkan beberapa indikator makro ekonomi Bali, maka diketahui bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Beberapa indikator yang belum mampu mencapai target setelah perubahan target pada RPJMD antara lain persentase kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kontribusi sektor pertanian dan pariwisata terhadap perekonomian Bali.

- 3) Daya saing Provinsi Bali bila ditinjau dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) memang memiliki nilai lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Namun, pada beberapa pilar (dari 12 pilar), nilai Provinsi Bali masih di bawah rata-rata nasional, yaitu pilar infrastruktur, pilar stabilitas ekonomi makro, pilar pasar tenaga kerja, dan pilar ukuran pasar. Selain itu, terdapat tiga kabupaten/kota di Bali yang memiliki IDSD lebih tinggi dari IDSD Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Buleleng.
- 4) Sektor yang memiliki peranan output tinggi terhadap perekonomian Bali adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor konstruksi. Namun bila ditinjau dari nilai tambah, maka sektor dengan Nilai Tambah Bruto (NTB) yang cukup tinggi adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan rasio biaya antara yang digunakan oleh setiap sektor produksi.
- 5) Sektor yang merupakan basis (sektor yang menentukan Pembangunan di suatu daerah) di Provinsi Bali yaitu: (1) penyediaan akomodasi dan makan minum; (2) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; (3) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; (4) jasa pendidikan; (5) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial warga; (6) real estate; (7) transportasi dan perdagangan; dan (8) informasi dan komunikasi. Lebih lanjut berdasarkan hasil pemetaan potensi sektor dengan analisis Tipologi Klassen, diketahui bahwa sektor yang maju dan tumbuh pesat di Provinsi Bali adalah sektor konstruksi, real estate, dan jasa pendidikan. Sebagian besar sektor usaha berada pada *stagnant sector*, yaitu: (1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Sektor Transportasi dan Pergudangan; (4) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (5) Sektor Informasi dan Komunikasi; (6) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; (7) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (8) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Adapun sektor yang merupakan sektor potensial adalah industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran.

- Sektor yang termasuk *underdeveloped sector* yaitu: (1) Sektor Pertambangan dan Penggalian; (2) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Sektor Jasa Perusahaan; dan (4) Sektor Jasa lainnya.
- 6) Terdapat 12 infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, dengan total senilai Rp14,7 Triliun. Dengan investasi infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru, akan menghasilkan tambahan PDRB sebesar Rp18,7 Triliun, atau dengan kata lain PDRB Bali akan mengalami kenaikan sebesar 9,71% dari kondisi tidak ada investasi. Kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) sebesar 4,01%, Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali sebesar 1,64%, dan Pembangunan Bendungan Sidan sebesar 1,14%.
 - 7) Pembangunan infrastruktur strategis dan monumental sebagai penanda Bali Era Baru telah menunjukkan *outcome* positif bagi perkembangan perekonomian maupun tatanan kehidupan Krama Bali, baik secara *sakala* maupun *niskala*. Beberapa infrastruktur memang masih dalam tahap pembangunan fisik, namun secara umum masyarakat memberikan respons yang positif terhadap infrastruktur yang dibangun. Namun beberapa infrastruktur yang telah dibangun masih belum optimal pemanfaatannya, seperti Pasar Sukawati Blok C. Selain itu, masih terdapat eksternalitas negatif akibat tata kelola sekitar infrastruktur yang belum diperhitungkan dengan baik, seperti kemacetan di sekitar jalan keluar-masuk Pelabuhan Sanur.
 - 8) *Forecasting*/peramalan atas beberapa indikator makro ekonomi Bali kedepannya menunjukkan sinyal positif. Diantaranya adalah penurunan persentase kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, TPAK, dan inflasi. *Forecasting* dengan data saat ini yang tentunya juga merupakan dampak dari adanya Pembangunan berbagai infrastruktur strategis dan monumental

penanda Bali Era baru. Sehingga pembangunan infrastruktur secara analisis statistik terbukti memberikan dampak positif bagi perekonomian Bali.

- 9) Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Provinsi Bali merupakan daerah yang kuat dan memiliki banyak peluang yang harus dioptimalkan. Strategi pembangunan yang perlu dikembangkan, menurut Teori Matriks SWOT, adalah Strategi progresif, yakni meneruskan pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, dengan kebijakan dan program yang lebih kreatif guna meraih kemajuan pembangunan secara maksimal.

6.4. Saran

Menindaklanjuti pembahasan hasil kajian ini, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi untuk mencapai target Pembangunan Bali Era Baru serta penguatan perekonomian Bali, yaitu sebagai berikut.

- 1) Terkait dengan arahan kebijakan Pembangunan Bali Era Baru dan tema fokus pembangunan, maka setelah capaian *recovery* menunjukkan sinyal positif dalam perekonomian Bali, maka Pemerintah Daerah perlu kembali fokus pada target awal capaian. Terutama dalam kaitan dengan daya saing SDM Krama Bali. Daya saing ini tentu dikaitkan dengan pemenuhan standar hidup layak, termasuk juga bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian keluarga Krama Bali. Apalagi target IPM Provinsi Bali memang belum tercapai, sehingga akselerasi pelayanan dasar dan dukungan pemulihan ekonomi perlu dilakukan.
- 2) Pembangunan infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru memang telah memberikan *outcome* positif. Namun penyelesaian eksternalitas negatif yang timbul juga perlu mendapat atensi pemerintah. Seperti kemacetan yang rutin terjadi pada jalan keluar-masuk Pelabuhan Sanur di waktu-waktu penyeberangan. Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Kota Denpasar perlu menyusun rekayasa lalu lintas untuk mencegah hal ini berlarut-larut, seperti peningkatan kapasitas parkir, atau jalur lingkaran yang membedakan jalur keluar-masuk kendaraan. Terkait dengan belum optimalnya pemanfaatan Pasar Sukawati Blok C, perlu

dilakukan evaluasi dan diskusi dengan para pedagang dan stakeholders terkait. Pertama adalah agar para pedagang dapat menggunakan area Pasar Sukawati, khususnya Blok C dapat optimal, serta mengarahkan dan mengupayakan wisatawan untuk mengunjungi pasar tersebut. Selain itu pula, dapat ditinjau kemungkinan pola insentif bagi pedagang untuk menumbuhkan minat memanfaatkan areal ini.

- 3) Provinsi Bali memang memiliki capaian yang baik dalam pengentasan kemiskinan di tingkat nasional, namun capaian tersebut belum memenuhi target yang dirancang. Sehingga Pemerintah Daerah dapat fokus pada upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan indikator kemiskinan. Selain itu, bagi Krama Bali yang telah mampu lepas dari kemiskinan perlu dilakukan penguatan ekonomi rumah tangga agar tidak kembali bergerak di bawah garis kemiskinan. Pemerintah juga perlu meningkatkan kompetensi Krama Bali serta memperbaiki iklim investasi untuk menambah peluang kerja bagi Krama Bali, sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Hal ini juga yang menyebabkan kontribusi sektor pariwisata Bali belum optimal karena aktivitas pariwisata belum pulih seperti sebelum pandemi Covid-19.
- 4) IDSD Provinsi Bali menunjukkan capaian yang baik secara nasional. Namun masih terdapat beberapa pilar yang perlu dioptimalkan dalam mewujudkan daya saing daerah. Seperti pilar infrastruktur yang masih di bawah daya saing nasional. Sehingga tepat bila Pemerintah Daerah di Bali tetap mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya yang terkait dengan dimensi dan indikator pilar infrastruktur, seperti infrastruktur transportasi (konektivitas jalan, kualitas infrastruktur jalan, serta proporsi bandara, pelabuhan, dan stasiun). Selain itu, Pemerintah Daerah di Bali juga perlu fokus pada kestabilan ekonomi makro yang juga merupakan indikator daya saing, seperti inflasi, kapasitas fiskal daerah, TPT, dan PDRB. Capaian atas indikator ini juga menjadi penentu kepercayaan investor untuk berinvestasi di Bali. Kepercayaan investor ini juga terkait dengan pilar tenaga kerja di Bali yang merupakan cerminan efisiensi investor dan tenaga kerja, juga juga masih menunjukkan nilai di bawah capaian nasional.

- 5) Pemerintah daerah di Bali dapat menyusun kebijakan untuk mendukung pengembangan stagnant sector dan sektor potensial (*developing sector*). Stagnant sektor merupakan sektor dengan potensi yang tidak terlalu tinggi namun memiliki pengelolaan yang baik sehingga mampu berkontribusi terhadap perekonomian. Untuk itu, kebijakan optimalisasi potensi atau intensifikasi perlu dilakukan untuk stagnant sector. Sedangkan untuk industry pengolahan serta perdagangan besar dan eceran dinilai memiliki potensi yang tinggi namun dalam pengelolaannya belum optimal. Oleh karena itu, kebijakan untuk peningkatan pengelolaan kedua sektor tersebut menjadi pilihan bagi Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.
- 6) Pemerintah perlu memperhatikan sektor basis dalam perekonomian Bali, agar sektor tersebut dapat stabil sehingga kondisi perekonomian Bali juga relatif stabil. Apalagi jumlah sektor basis di Provinsi Bali cukup banyak, dan masih didominasi oleh sektor pariwisata yang *diproxy* dengan sektor akomodasi dan makan minum. Lebih lanjut bahwa Pemerintah Daerah di Bali juga perlu memperhatikan pemetaan potensi sektor ekonomi Bali, khususnya optimalisasi potensi pada stagnant sektor yang relatif pengelolaannya sudah baik. Sebaliknya pada sektor potensial yang potensinya relatif tinggi namun pengelolaannya belum optimal, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sehingga dapat dilakukan peningkatan tata kelola.
- 7) Desa Adat memiliki peran sentral dalam berbagai strategi yang *feasible* untuk dilaksanakan dalam upaya akselerasi Pembangunan Bali Era Baru. Oleh karena itu, penguatan peran dan kelembagaannya menjadi sangat penting. Pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota perlu meningkatkan sinergi untuk Pembangunan Bali yang terintegrasi dan merata pada berbagai sektor, terutama pariwisata. Selain itu, dukungan pendanaan Pembangunan melalui berbagai sumber perlu dioptimalkan, baik bersumber dari APBD, APBN, KPBU, CSR, maupun bentuk Kerjasama lainnya.

REFERENSI

- BPS Provinsi Bali. (2022). *Statistik Kriminal Provinsi Bali 2021*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- BPS Provinsi Bali. (2021). *Tabel Input-Output Provinsi Bali Tahun 2016-Tahun Anggaran 2021*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- Basofi, D.B., Santoso, D.B. (2017). Analisis Pengukuran Kesejahteraan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2), 3-16.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2023). *Indeks Daya Saing Daerah 2022*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit BRIN.
- Creswell, J.W., Clark, V.L.P. (2011). *Designing and conducting mixed methods research*. 2nd Edition. California: SAGE Publication.
- Creswell, J.W. (2009). *Research Design-Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United States of America: SAGE Publication.
- Fauzi. 2019. Teknik Analisis Keberlanjutan. Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
- Hsiu, Y.H., Chiu, S.I., Tieh, M.Y. (2009). Modified IPA for Order-Winner Criteria Improvement: A MICMAC Approach. *Journal of Applied Sciences*, 9(21), 3792-3803. <https://dx.doi.org/10.3923/jas.2009.3792.3803>
- Lees, L. (2007). Progress in Gentrification Research? *Environment and Planning A: Economy and Space*, 39(1), 228-234. <https://doi.org/10.1068/a39329>
- Mardiyantoro, N. (2019). *Literature Review*.
- Moto, M.M. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan. *Indonesian Journal of Primary Education*, 3(1), 20-28.
- Nasution, L.N. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 49-55.
- Nicolau, B., Castonguay, G., Levine, A., Hong, Q.N., Summer Institute 2015 Participants, & Pluye, P. (2017). Applied Mixed Methods in Oral Health Research: Importance and Example of a Training Program. *JDR Clinical & Translational Research*, Vol. XX, Issue XX, 1-5.
- Nur'Aini, Y., Asjhari, A., Suriadi, A., Nadida, Z., Krisbandono, A., Yungga, B. (2013). *Mengukur Outcome Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman: Tantangan, Metode, dan Strategi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum.

- Rositawati, A.F.D., Budiantara, I N. (2019). Pemodelan Indeks Kebahagiaan Provinsi di Indonesia Menggunakan Regresi Nonparametrik *Spline Truncated*. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 8(2), 2337-3520.
- Soegijoko, B.T.S. dan Kusbiantoro, B.S. (penyunting). (1997). *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudarma, I M. & Nursetyohadi, D. (2010). Profil Perekonomian Bali (Pendekatan dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi). *SOCA-Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 10(1), 46-53.
- Sumodiningrat, G. (1999). Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (Dalam Perspektif Teori dan Implementasi). *Jurnal PWK*, 10(3), 146-159.
- Tim Penulis. (2016). *Teknik Dalam Evaluasi (Evaluasi Impact Assessment)*. Paper Mata Kuliah Teknik Evaluasi Pembangunan. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Widyaningrum, E.D.A. & Cahyono, H. (2020). Pemetaan Potensi Wilayah Guna Mendorong Pembangunan Ekonomi Kabupaten Ngawi. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 117-139.
- Wijaya, P.Y., Kawiana, I G.P., Suasih, N.N.R., Hartati, P.S., Sumadi, N.K. (2020). SWOT and MICMAC analysis to determine the development strategy and sustainability of the Bongkasa Pertiwi Tourism Village, Bali Province, Indonesia. *Decision Science Letters*, 9(2020), 439-452.
- Wulandari, P. & Rejeki, A. (2018). Analisis Pemetaan Potensi Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Wacana Kinerja*, 21(1), 1-18. DOI : 10.31845/jwk.v21i1.60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	WAKTU	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	BIAYA HONORARIUM PERSONIL					Rp 79,200,000.00
	1. TENAGA AHLI (PERGURUAN TINGGI)					
1.1	Team Leader (Kordinator)	1	3	Orang/Bulan	Rp 3,500,000.00	Rp 10,500,000.00
1.2	Tenaga Ahli	4	3	Orang/Bulan	Rp 3,250,000.00	Rp 39,000,000.00
	2. TENAGA PEMBANTU AHLI					
2.1	Pencari Data (Surveyor)	4	3	Orang/Bulan	Rp 1,250,000.00	Rp 15,000,000.00
	3. TENAGA PENDUKUNG					
3.1	Sekretaris	1	3	Orang/Bulan	Rp 2,000,000.00	Rp 6,000,000.00
	3. NARASUMBER/MODERATOR FGD/PRESENTASI					
3.1	Narasumber/Pembahas pada FGD (eselon II/yang disetarakan)	4	2	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00	Rp 8,000,000.00
3.2	Moderator (internal)	1	1	Orang/Kegiatan	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00
B	BIAYA OPERASIONAL KANTOR					Rp 3,892,000.00
1.1	Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Kertas HVS					
	Kertas HVS Folio/A4 70 Gr. Sinar Dunia	5		Rim	Rp 75,000.00	Rp 375,000.00
	Kertas HVS Folio/F4 70 Gr. Office Print	5		Rim	Rp 85,000.00	Rp 425,000.00
	Tinta Epson					
	Tinta Printer Epson T664 Hitam	3		Buah	Rp 140,000.00	Rp 420,000.00
	Tinta Printer Epson T664 Cyan	1		Buah	Rp 140,000.00	Rp 140,000.00
	Tinta Printer Epson T664 Magenta	1		Buah	Rp 140,000.00	Rp 140,000.00
	Tinta Printer Epson T664 Yellow	1		Buah	Rp 140,000.00	Rp 140,000.00
	Flashdisk 64GB	1		Buah	Rp 185,000.00	Rp 185,000.00
	Map Ordner Folio Bantex	1		Buah	Rp 90,000.00	Rp 90,000.00
	Map jepit seagull	20		Buah	Rp 20,000.00	Rp 400,000.00
	Map Buffalo	30		Buah	Rp 6,500.00	Rp 195,000.00
	Ballpoint Baliner dengan tinta cair	10		Buah	Rp 30,000.00	Rp 300,000.00
	Faster C600	30		Buah	Rp 4,500.00	Rp 135,000.00
	Staples Type Hd-50 Joyko	2		Buah	Rp 60,000.00	Rp 120,000.00
	Isi Staples	10		Buah	Rp 10,000.00	Rp 100,000.00
1.2	Fotocopy bahan/data					
	Bahan FGD 1	500		Lembar	Rp 250.00	Rp 125,000.00
	Bahan FGD 2	500		Lembar	Rp 250.00	Rp 125,000.00
	Fotocopy bahan/data	500		Lembar	Rp 250.00	Rp 125,000.00
1.3	Cetak spanduk	2		Lembar	Rp 80,000.00	Rp 160,000.00
1.4	SPJ dan surat-surat	768		Lembar	Rp 250.00	Rp 192,000.00
C	RAPAT-RAPAT					Rp 14,325,000.00
1.1	Rapat-rapat pembahasan					
	Konsumsi Rapat					
	Snack	50		Orang/Kali	Rp 15,000.00	Rp 750,000.00
	Makan	50		Orang/Kali	Rp 30,000.00	Rp 1,500,000.00
1.2	FGD					
	Biaya paket FGD di luar kantor					
	Halfday	30		Orang/Paket	Rp 300,000.00	Rp 9,000,000.00
	Uang harian kegiatan FGD di luar kantor					
	Halfday di dalam kota	15		Orang/Paket	Rp 115,000.00	Rp 1,725,000.00
	Konsumsi FGD Diseminasi					
	Snack	30		Orang/Kali	Rp 15,000.00	Rp 450,000.00
	Makan	30		Orang/Kali	Rp 30,000.00	Rp 900,000.00
D	PERJALANAN					Rp 47,790,000.00
1.3	Uang Harian Perjalanan Dinas	126		Orang/Hari	Rp 190,000.00	Rp 23,940,000.00
1.4	Kendaraan					
	Sewa Mobil	30		Unit/Hari	Rp 750,000.00	Rp 22,500,000.00
	Tiket Kapal (Fast Boat)	18		Orang/Kali	Rp 75,000.00	Rp 1,350,000.00
D	BIAYA PELAPORAN					Rp 3,040,000.00
1.1	Biaya Pengolah Data	1		penelitian	Rp 1,500,000.00	Rp 1,500,000.00
1.2	Laporan Pendahuluan	3		exp.	Rp 80,000.00	Rp 240,000.00
1.3	Laporan Akhir	10		exp.	Rp 130,000.00	Rp 1,300,000.00
	TOTAL					148,247,000.00

LAMPIRAN 2

PENILAIAN VARIABEL DAN INDIKATOR CAPAIAN OUTCOME INFRASTRUKTUR STRATEGIS DAN MONUMENTAL PENANDA BALI ERA BARU

1) Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih

Variabel		Bobot		Indikator		Bobot		Skor		Persentase	
1)	Tingkat kelancaran arus kendaraan dan keamanan kendaraan	40	%	1)	Lahan parkir dibangun terdiri dari empat lantai	5	%	90	4.5	%	
				2)	Tersedianya tempat parkir kendaraan yang cukup memadai untuk kapasitas 1.541 utk kendaraan roda empat, 250 unit utk bus, 1.268 unit kendaraan roda dua	8	%	95	7.6	%	
				3)	Pengisian parkir dilakukan secara berurutan mulai dari Lantai Paling Bawah B3, Lantai B2, Lantai B1, dan Lantai Dasar, perpindahan lantai dilakukan setelah lantai dibawahnya penuh	3	%	90	2.7	%	
				4)	Semua lantai dilengkapi sistem pemantauan digital dengan indikator lampu pada setiap slot, warna hijau menunjukkan slot masih tersedia dan warna merah menunjukkan slot sudah terisi	4	%	94	3.76	%	
				5)	Tersedia stasiun pengisian kendaraan listrik umum	4	%	92	3.68	%	
				6)	Setiap lantai parkir terdiri atas beberapa blok yang dilengkapi kode blok pada pilar	3	%	92	2.76	%	
				7)	Tersedia Fasilitas Tiket Parkir Elektronik untuk masuk dan keluar Gedung Parkir	4	%	94	3.76	%	
				8)	Pengaturan arus keluar masuk kendaraan dengan baik	3	%	90	2.7	%	
				9)	Tersedia Petugas Parkir yang mengatur untuk masuk-keluar kendaraan	3	%	92	2.76	%	
				10)	Lokasi parkir yang mudah dijangkau	3	%	92	2.76	%	
Persentase Outcome Variabel 1										36.98	%

Variabel		Bobot		Indikator		Bobot		Skor	Persentase	
2)	Tingkat kemudahan dan kenyamanan akses UMKM/pedagang	20	%	1)	Lokasi UMKM/pedagang yang mudah diakses	4	%	80	3.2	%
				2)	Tersedia Fasilitas UMKM berupa kios dan los, sebanyak 272 unit Kios dan 198 unit Los	4	%	81	3.24	%
				3)	Transaksi dapat dilakukan secara digital menggunakan Aplikasi Qris Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali)	4	%	82	3.28	%
				4)	Produk yang dijual oleh UMKM diutamakan produk lokal khas Kabupaten Karangasem, berupa kuliner, produk kerajinan, cinderamata branding Besakih, tanaman hias, dan hasil pertanian.	4	%	84	3.36	%
				5)	Penempatan UMKM/pedagang tersentralisasi dan tertata	4	%	85	3.4	%
Persentase Outcome Variabel 2									16.48	%
3)	Tingkat kenyamanan fasilitas umum/penunjang	20	%	1)	Tersedia Fasilitas Toilet di setiap lantai, termasuk Toilet Khusus untuk Difabel, yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, gratis	2	%	92	1.84	%
				2)	Tersedia halte kendaraan listrik	1	%	91	0.91	%
				3)	Tersedia Ruang Ganti pakaian untuk Pemedek dan Pengunjung, serta Ruang Laktasi (Ruang Menyusui) di Area Manik Mas	2	%	92	1.84	%
				4)	Tersedia Kantor BPD Bali dan ATM Center.	2	%	93	1.86	%
				5)	Bangunan Wiyata Graha berkapasitas 215 tempat duduk, untuk menayangkan Video Dokumenter tentang Pura Agung Besakih.	2	%	90	1.8	%
				6)	Tersedia Kendaraan Listrik antar jemput dari Parkir Kedungdung dan Parkir Manik Mas ke Area Bencingah.	3	%	91	2.73	%
				7)	Tersedia atap gedung parkir memakai PLTS dengan kapasitas 400 Kwh	2	%	91	1.82	%
				8)	Tersedia Instalasi Pengolahan Air Limbah dan sampah pada Gedung Parkir.	1	%	90	0.9	%
				9)	Tersedia Fasilitas Pemadam Kebakaran	1	%	90	0.9	%
				10)	Tersedia tangga dan elevator sebagai penghubung setiap lantai	2	%	92	1.84	%
				11)	Tersedia ruang terbuka publik yang nyaman	2	%	92	1.84	%
Persentase Outcome Variabel 3									18.28	%

Variabel		Bobot		Indikator		Bobot		Skor	Persentase	
4)	Tingkat kenyamanan pemedek melaksanakan persembahyangan	20	%	1)	Pengaturan pelaksanaan/antrean dengan baik	10	%	80	8	%
				2)	Terdapat informasi penunjuk arah yang jelas	5	%	90	4.5	%
				3)	Terdapat petugas/pengayah yang cukup	5	%	90	4.5	%
Persentase Outcome Variabel 4									17	%
Total Outcome Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih									88.74	%

2) Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali

Variabel		Bobot		Indikator	Bobot		Skor	Persentase	
1)	Tingkat kelayakan zona inti	40	%	1) Tersedianya fasilitas pentas seni	15	%	80	12.00	%
				2) Tersedianya bangunan museum	10	%	70	7.00	%
				3) Tersedianya auditorium maupun tempat MICE lainnya	5	%	80	4.00	%
				4) Kecukupan/daya tampung	10	%	90	9.00	%
Persentase Outcome Variabel 1								32.00	%
2)	Tingkat kelayakan zona penunjang	15	%	1) Tersedianya hotel, apartemen, dan fasilitas penunjang pariwisata	5	%	60	3.00	%
				2) Tersedia tempat rekreasi	10	%	80	8.00	%
Persentase Outcome Variabel 2								11.00	%
3)	Tingkat kelayakan zona penyangga	20	%	1) Normalisasi Tukad Unda	10	%	80	8.00	%
				2) Normalisasi Waduk Muara	10	%	80	8.00	%
Persentase Outcome Variabel 3								16.00	%
4)	Tingkat kelestarian kawasan	15	%	1) Terbentuknya zona ekologis	5	%	80	4.00	%
				2) Tidak mencemari lingkungan	5	%	70	3.50	%
				3) Kawasan tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan tingkat kehijauan	5	%	70	3.50	%
Persentase Outcome Variabel 4								11.00	%
5)	Kelancaran arus lalu lintas sekitar kawasan	10	%	1) Tersedianya tempat parkir kendaraan yang cukup	4	%	90	3.60	%
				2) Kelengkapan dan keamanan fasilitas parkir	3	%	70	2.10	%
				3) Pengaturan arus keluar masuk kendaraan dengan baik	3	%	90	2.70	%
Persentase Outcome Variabel 5								8.40	%
Total Outcome Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali								78.40	%

3) Pembangunan Ruas Jalan Shortcut Singaraja-Mengwitani

Variabel		Bobot	Indikator	Bobot	Skor	Persentase
1)	Tingkat pemerataan pembangunan infrastruktur Bali Utara-Selatan	30 %	1) Tersedianya jalan yang baik menuju wilayah Bali Utara	15 %	95	14.25 %
			2) Jarak tempuh relatif menjadi lebih singkat	15 %	96	14.4 %
Persentase Outcome Variabel 1						28.65 %
2)	Tingkat kelancaran arus lalu lintas pada kawasan	20 %	1) Pengaturan jalur kendaraan dapat mencegah penumpukan kendaraan.	10 %	80	8 %
			2) Memungkinkan adanya rekayasa	10 %	80	8 %
Persentase Outcome Variabel 2						16 %
3)	Tingkat keselamatan pengguna jalan	20 %	1) Kemiringan, tikungan, dan kondisi jalan aman bagi pengguna	8 %	90	7.2 %
			2) Lebar jalan sesuai dengan standar dan bila diperlukan dilengkapi dengan guard rail	8 %	90	7.2 %
			3) Kelengkapan papan penunjuk jalan	4 %	90	3.6 %
Persentase Outcome Variabel 3						18 %
4)	Tingkat multiplier effect secara ekonomi	15 %	1) Berkembangnya sektor usaha di sekitar jalur shortcut	5 %	80	4 %
			2) Tidak berdampak signifikan terhadap sektor usaha di jalur sebelumnya	5 %	50	2.5 %
			3) Kapasitas jalan memungkinkan untuk kendaraan logistik (jalur distribusi barang)	5 %	85	4.25 %
Persentase Outcome Variabel 4						10.75 %
5)	Tingkat kelestarian kawasan	15 %	1) Pembangunan diikuti dengan upaya pelestarian kawasan sekitar	10 %	80	8 %
			2) Jalur yang memungkinkan dilengkapi pohon perindang	5 %	75	3.75 %
Persentase Outcome Variabel 5						11.75 %
Total Outcome Pembangunan Ruas Jalan Shortcut Singaraja-Mengwitani						85.15 %

4) Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung

Variabel		Bobot		Indikator		Bobot		Skor	Persentase	
1)	Tingkat kapasitas fast boat	25	%	1)	Kapasitas fastboat sesuai kebutuhan dan meningkat dari sebelumnya	10	%	95	9.5	%
				2)	Rute penyebarangan semakin banyak	5	%	93	4.65	%
				3)	Dermaga membuat fast boat lebih mudah bersandar	10	%	98	9.8	%
Persentase Outcome Variabel 1									23.95	%
2)	Tingkat kapasitas penumpang	25	%	1)	Dapat melayani penumpang dalam kapasitas yang lebih tinggi	10	%	98	9.8	%
				2)	Dermaga memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan	15	%	98	14.7	%
Persentase Outcome Variabel 2									24.5	%
3)	Tingkat kenyamanan dan keamanan pengguna fasilitas	15	%	1)	Tersedianya fasilitas pelabuhan memadai dan nyaman	6	%	100	6	%
				2)	Tersedianya fasilitas parkir untuk kendaraan pengguna maupun pengantar	6	%	50	3	%
				3)	Tersedia fasilitas penunjang lainnya yang nyaman di sekitar area	3	%	80	2.4	%
Persentase Outcome Variabel 3									11.4	%
4)	Dampak ekonomi	20	%	1)	Berkembangnya sektor usaha di sekitar pelabuhan	5	%	80	4	%
				2)	Peningkatan jumlah wisatawan	10	%	80	8	%
				3)	Kemudahan arus logistik (barang dan jasa) ke Nusa	5	%	70	3.5	%
Persentase Outcome Variabel 4									15.5	%
5)	Dampak terhadap kawasan	15	%	1)	Pembangunan diikuti dengan upaya pelestarian kawasan sekitar	5	%	70	3.5	%
				2)	Jalur keluar-masuk kawasan pelabuhan tertata dengan baik	10	%	30	3	%
Persentase Outcome Variabel 5									6.5	%
Total Outcome Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung									81.85	%

5) Pengembangan Pelabuhan Benoa Menjadi Bali Maritime Tourism Hub, Denpasar

Variabel		Bobot		Indikator		Bobot		Skor		Persentase	
1)	Tingkat keberfungsian zona fasilitas pokok-terkait langsung kepelabuhan	25	%	1)	Tersedianya zona terminal yang sesuai standar dan kapasitas tinggi	10	%	90	9	%	
				2)	Tersedianya zona peti kemas dan general cargo yang sesuai kebutuhan	10	%	90	9	%	
				3)	Tersedianya zona terminal penumpang yang nyaman dan aman	5	%	90	4.5	%	
Persentase Outcome Variabel 1										22.5	%
2)	Tingkat keberfungsian zona fasilitas pokok lainnya (pariwisata)	20	%	1)	Tersedianya zona marina/pariwisata yang menarik wisatawan	10	%	90	9	%	
				2)	Tersedianya fasilitas penunjang untuk zona pariwisata	10	%	80	8	%	
Persentase Outcome Variabel 1										17	%
3)	Tingkat keberfungsian zona fasilitas penunjang	15	%	1)	Tersedianya zona logistik sesuai kebutuhan	10	%	80	8	%	
				2)	Tersedianya zona pemerintahan dan penunjang lainnya seperti plaza UMKM	5	%	80	4	%	
Persentase Outcome Variabel 2										12	%
3)	Tingkat feasibility sandar kapal besar (cruise)	20	%	1)	Tersedianya dermaga dan kondisi perairan yang sesuai untuk sandar kapal besar (cruise)	10	%	90	9	%	
				2)	Tersedianya terminal internasional	10	%	90	9	%	
Persentase Outcome Variabel 3										18	%
4)	Tingkat multiplier effect secara ekonomi	10	%	1)	Berkembangnya sektor usaha di sekitar BMTH	5	%	80	4	%	
				2)	Peningkatan aktivitas perdagangan dan lalu lintas barang	5	%	80	4	%	
Persentase Outcome Variabel 4										8	%
5)	Tingkat kelestarian kawasan	10	%	1)	Tersedianya terminal curah cair dan LNG di lokasi yang sesuai (tidak mengganggu dermaga)	5	%	80	4	%	
				2)	Tersedianya lingkungan yang mendukung green tourism	5	%	70	3.5	%	
Persentase Outcome Variabel 5										7.5	%
Total Outcome Pengembangan Pelabuhan Benoa Menjadi Bali Maritime Tourism Hub, Denpasar										85	%

6) Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan 4 (Empat) Lapangan Pendukung

Variabel		Bobot		Indikator	Bobot		Skor	Persentase	
1)	Tingkat kesesuaian standar stadion sepak bola internasional	20	%	1) Tersedianya rumput di lapangan yang berstandar internasional	15	%	95	14.25	%
				2) Tersedianya lampu penerangan lapangan yang berstandar internasional	5	%	95	4.75	%
Persentase Outcome Variabel 1								19	%
2)	Tingkat ketersediaan fasilitas penunjang stadion sepak bola internasional	20	%	1) Tersedia royal box dan corporate box	5	%	96	4.8	%
				2) Terdapat ruang wasit dan VAR	5	%	96	4.8	%
				3) Terdapat fasilitas untuk pers yang memadai	5	%	90	4.5	%
				4) Terdapat ruang kesehatan	5	%	80	4	%
Persentase Outcome Variabel 2								18.1	%
3)	Tingkat ketersediaan fasilitas untuk kenyamanan para pemain sepak bola	20	%	1) Tersedia ruang ganti pemain dan kelengkapannya berstandar internasional	10	%	90	9	%
				2) Tersedia ruang anggota staf pelatih	5	%	90	4.5	%
				3) Terdapat <i>refreshing area</i> bagi para pemain	5	%	90	4.5	%
Persentase Outcome Variabel 3								18	%
4)	Tingkat ketersediaan fasilitas untuk kenyamanan para penonton/ pengunjung	20	%	1) Tersedia kursi penonton yang nyaman dan sesuai standar	5	%	93	4.65	%
				2) Tersedia kapasitas parkir yang memadai	3	%	50	1.5	%
				3) Pengaturan parkir dan rekayasa kendaraan dengan baik ketika pertandingan	2	%	50	1	%
				4) Terdapat akses masuk-keluar dan pergerakan di stadion yang memadai	2	%	70	1.4	%
				5) Tersedia fasilitas belanja di area stadion	3	%	70	2.1	%
				6) Tersedia fasilitas untuk difabel	5	%	80	4	%
Persentase Outcome Variabel 4								14.65	%

Variabel		Bobot		Indikator	Bobot		Skor	Persentase	
5)	Tersedia lapangan penunjang	5	%	1) Tersedia lapangan penunjang yang sesuai standar	3	%	80	2.4	%
				2) Fasilitas lapangan penunjang memenuhi kebutuhan dan sesuai standar	2	%	80	1.6	%
Persentase Outcome Variabel 5								4	%
6)	Multiplier effect ekonomi dan lingkungan bagi kawasan sekitar	15	%	1) Pembangunan sarana akomodasi di sekitar kawasan stadion	5	%	80	4	%
				2) Peningkatan jumlah UMKM/tempat usaha di sekitar stadion	5	%	90	4.5	%
				3) Penambahan dan perbaikan kualitas ruang terbuka hijau di sekitar kawasan stadion	5	%	80	4	%
Persentase Outcome Variabel 5								12.5	%
Total Outcome Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan 4 (Empat) Lapangan Pendukung								86.25	%

7) Pembangunan Pasar Sukawati, Blok A, B, dan C

Variabel		Bobot	Indikator	Bobot	Skor	Persentase
1)	Tingkat daya tampung pedagang	20 %	1) Tersedianya kios dan los sesuai standar pasar	10 %	95	9.5 %
			2) Terdapat pola pengaturan pedagang yang tertata dan sesuai produk	10 %	90	9 %
Persentase Outcome Variabel 1						18.5 %
2)	Tingkat kenyamanan pembeli	25 %	1) Terdapat akses keluar-masuk dan pergerakan dalam pasar maupun antara blok yang nyaman dan mudah diakses	5 %	80	4 %
			2) Terdapat ruang publik yang nyaman	5 %	90	4.5 %
			3) Terdapat fasilitas umum penunjang yang nyaman bagi pembeli	5 %	80	4 %
			4) Terdapat papan petunjuk dalam pasar yang jelas	5 %	70	3.5 %
			5) Terdapat fasilitas bagi pengunjung difabel	5 %	70	3.5 %
Persentase Outcome Variabel 2						19.5 %
3)	Tingkat kenyamanan pedagang	25 %	1) Tersedia sirkulasi udara maupun lingkungan bersih di bangunan pasar	10 %	90	9 %
			2) Kios dan los memadai untuk pedagang	5 %	80	4 %
			3) Terdapat fasilitas penunjang bagi para pedagang	5 %	80	4 %
			4) Tersedia fasilitas yang menjamin keamanan dagangan	5 %	80	4 %
Persentase Outcome Variabel 3						21 %
4)	Tingkat multiplier effect secara ekonomi	20 %	1) Berkembangnya sektor usaha di sekitar kawasan pasar seni Sukawati	10 %	90	9 %
			2) Berpotensi untuk pengembangan sektor finansial bagi lembaga keuangan mikro	10 %	96	9.6 %
Persentase Outcome Variabel 4						18.6 %

Variabel		Bobot		Indikator	Bobot		Skor	Persentase	
5)	Tingkat kelancaran lalu lintas	10	%	1) Ketersediaan slot parkir yang memadai	4	%	75	3	%
				2) Pengaturan keluar-masuk kendaraan dengan jelas	2	%	70	1.4	%
				3) Ketersediaan jalur mobilitas pengunjung antar blok	2	%	70	1.4	%
				4) Tersedia jalur rekayasa lalu lintas dan tidak menimbulkan kemacetan di sekitar kawasan	2	%	70	1.4	%
Persentase Outcome Variabel 5								7.2	%
Total Outcome Pembangunan Pasar Sukawati, Blok A, B, dan C								77.6	%

8) Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali

Variabel		Bobot		Indikator		Bobot		Skor	Persentase	
1)	Tingkat pengaturan aliran sungai Tukad Unda	35	%	1)	Tersedianya saluran air Tukad Unda menunjang pematangan lahan PKB	15	%	98	14.7	%
				2)	Saluran air Tukad Unda lancar dari hulu sampai ke hilir	15	%	95	14.25	%
Persentase Outcome Variabel 1									28.95	%
2)	Tingkat penurunan risiko bencana	35	%	1)	Tersedianya infrastruktur pengendali banjir bagian hilir Tukad Unda	10	%	90	9	%
				2)	Tersedianya infrastruktur pengendali banjir lahar dingin yang melintasi Tukad Unda	10	%	90	9	%
				3)	Tersedianya tanggul pada saluran air Tukad Unda	15	%	95	14.25	%
Persentase Outcome Variabel 2									32.25	%
3)	Tingkat multiplier effect secara ekonomi dan pariwisata	20	%	1)	Tukad Unda menjadi kawasan wisata yang tertata	10	%	90	9	%
				2)	Terdapat ruang publik yang mendukung berkembangnya wisata di daerah aliran Tukad Unda	5	%	80	4	%
				3)	Berkembangnya unit usaha di sekitar kawasan Tukad Unda	5	%	75	3.75	%
Persentase Outcome Variabel 3									16.75	%
4)	Tingkat kelestarian kawasan	10	%	1)	Kawasan sungai Tukad Unda bersih	5	%	80	4	%
				2)	Pelaksanaan penghijauan di sekitar kawasan	5	%	74	3.7	%
Persentase Outcome Variabel 4									7.7	%
Total Outcome Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali									85.65	%

9) Pembangunan Bendungan Untuk Penyediaan Air Bersih, meliputi: Bendungan Sidan di Wilayah Badung, Gianyar, dan Bangli; dan (2) Bendungan Tamblang di Buleleng

Variabel		Bobot	Indikator	Bobot	Skor	Persentase	
1)	Tingkat keberfungsian bendungan Sidan	30 %	1) Daya tampung air Bendungan Sidan sesuai target pekerjaan	10 %	90	9	%
			2) Kemampuan Bendungan Sidan dalam penyediaan air baku	10 %	95	9.5	%
			3) Terciptanya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dari Bendungan Sidan	10 %	80	8	%
Persentase Outcome Variabel 1						26.5	%
2)	Tingkat keberfungsian bendungan Sidan	30 %	1) Daya tampung air Bendungan Tamblang sesuai target pekerjaan	10 %	95	9.5	%
			2) Kemampuan Bendungan Tamblang dalam penyediaan air baku	10 %	96	9.6	%
			3) Terciptanya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dari Bendungan Tamblang	10 %	80	8	%
Persentase Outcome Variabel 2						27.1	%
3)	Tingkat konservasi kawasan Bendungan Sidan	15 %	1) Tersedianya kawasan konservasi air untuk wilayah Sarbagita	10 %	90	9	%
			2) Tersedianya pasokan untuk irigasi pertanian kawasan Sarbagita	5 %	80	4	%
Persentase Outcome Variabel 3						13	%
4)	Tingkat konservasi kawasan Bendungan Tamblang	15 %	1) Tersedianya kawasan konservasi air untuk wilayah Bali Utara	10 %	90	9	%
			2) Tersedianya pasokan untuk irigasi pertanian kawasan Bali Utara	5 %	90	4.5	%
Persentase Outcome Variabel 4						13.5	%
5)	Tingkat multiplier effect secara ekonomi Bendungan Sidan	5 %	1) Berkembangnya kawasan Bendungan Sidan sebagai kawasan wisata	3 %	70	2.1	%
			2) Berkembangnya unit usaha/UMKM di sekitar kawasan Bendungan Sidan	2 %	50	1	%
Persentase Outcome Variabel 5						3.1	%

Variabel		Bobot		Indikator		Bobot		Skor		Persentase	
6)	Tingkat multiplier effect secara ekonomi Bendungan Tamblang	5	%	1)	Berkembangnya kawasan Bendungan Tamblang sebagai kawasan wisata	3	%	80	2.4	%	
				2)	Berkembangnya unit usaha/UMKM di sekitar kawasan Bendungan Tamblang	2	%	70	1.4	%	
Persentase Outcome Variabel 6									3.8	%	
Total Outcome Pembangunan Bendungan Untuk Penyediaan Air Bersih, meliputi:									87	%	
(1) Bendungan Sidan di Wilayah Badung, Gianyar, dan Bangli; dan (2) Bendungan Tamlang di Buleleng											

10) Pembangunan Turyapada Tower 6.0 KBS

Variabel		Bobot		Indikator		Bobot		Skor		Persentase	
1)	Jangkauan pemancar dan telekomunikasi	45	%	1)	Jangkauan pemancar siaran TV digital	15	%	90	13.5	%	
				2)	Jangkauan telekomunikasi seluler	15	%	90	13.5	%	
				3)	Jangkauan internet	15	%	90	13.5	%	
Persentase Outcome Variabel 1									40.5	%	
2)	Tingkat ketersediaan sarana dan fasilitas edukasi	20	%	1)	Tersedianya wahana edukasi	10	%	88	8.8	%	
				2)	Tersedianya museum	10	%	85	8.5	%	
Persentase Outcome Variabel 2									17.3	%	
3)	Tingkat ketersediaan sarana dan fasilitas pariwisata	25	%	1)	Tersedianya atraksi pariwisata	10	%	85	8.5	%	
				2)	Tersedianya area makan-minum penunjang pariwisata	15	%	90	13.5	%	
Persentase Outcome Variabel 3									22	%	
4)	Tingkat multiplier effect secara ekonomi dan pariwisata	10	%	1)	Masyarakat sekitar memanfaatkan jangkauan tower	5	%	90	4.5	%	
				2)	Masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi berkembangnya pariwisata di sekitar lokasi	5	%	75	3.75	%	
Persentase Outcome Variabel 4									8.25	%	
Total Outcome Pembangunan Turyapada Tower 6.0 KBS									88.05	%	

11) Pembangunan Tol Jagat Bali Kerthi (Gilimanuk-Mengwi)

Variabel		Bobot		Indikator		Bobot		Skor	Persentase	
1)	Tingkat pemerataan pembangunan infrastruktur Bali Barat - Tengah	30	%	1)	Tersedianya jalur yang cepat untuk menghubungkan Bali Barat - Tengah dan distribusi barang antar Pulau	15	%	90	13.5	%
				2)	Jarak tempuh relatif menjadi lebih singkat	15	%	96	14.4	%
Persentase Outcome Variabel 1									27.9	%
2)	Tingkat kelancaran arus lalu lintas pada kawasan	20	%	1)	Pengaturan jalur kendaraan dapat mencegah penumpukan kendaraan.	10	%	80	8	%
				2)	Memungkinkan adanya rekayasa	10	%	86	8.6	%
Persentase Outcome Variabel 2									16.6	%
3)	Tingkat keselamatan pengguna jalan	20	%	1)	Kemiringan, tikungan, dan kondisi jalan aman bagi pengguna	8	%	93	7.44	%
				2)	Lebar jalan sesuai dengan standar dan bila diperlukan dilengkapi dengan guard rail	8	%	92	7.36	%
				3)	Kelengkapan papan penunjuk jalan	4	%	80	3.2	%
Persentase Outcome Variabel 3									18	%
4)	Tingkat multiplier effect secara ekonomi	15	%	1)	Berkembangnya sektor usaha di sekitar jalur shortcut	5	%	90	4.5	%
				2)	Berkembang tata kota pemukiman baru	5	%	93	4.65	%
				3)	Kapasitas jalan memungkinkan untuk kendaraan logistik (jalur distribusi barang)	5	%	90	4.5	%
Persentase Outcome Variabel 4									13.65	%

Variabel		Bobot		Indikator	Bobot		Skor	Persentase	
5)	Tingkat kelestarian kawasan	15	%	1) Pembangunan diikuti dengan upaya pelestarian kawasan sekitar	10	%	75	7.5	%
				2) Jalur yang memungkinkan dilengkapi pohon perindang	5	%	75	3.75	%
Persentase Outcome Variabel 5								11.25	%
Total Outcome Pembangunan Ruas Jalan Shortcut Singaraja-Mengwitani								87.4	%

LAMPIRAN 3

KONKORDASI 17 LAPANGAN USAHA DENGAN 52 SEKTOR INDUSTRI PADA TABEL INPUT-OUTPUT

17 Lapangan Usaha		52 Industri	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	I-01	Pertanian Tanaman Pangan
		I-02	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya
		I-03	Perkebunan Semusim dan Tahunan
		I-04	Peternakan
		I-05	Jasa Pertanian dan Perburuan
		I-06	Kehutanan dan Penebangan Kayu
		I-07	Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian	I-08	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi
		I-09	Pertambangan Batubara dan Lignit
		I-10	Pertambangan Bijih Logam
		I-11	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
C	Industri Pengolahan	I-12	Industri Batubara dan Pengilangan Migas
		I-13	Industri Makanan dan Minuman
		I-14	Industri Pengolahan Tembakau
		I-15	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
		I-16	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
		I-17	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
		I-18	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
		I-19	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
		I-20	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
		I-21	Industri Barang Galian bukan Logam
		I-22	Industri Logam Dasar
		I-23	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik
		I-24	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
		I-25	Industri Alat Angkutan
I-26	Industri Furnitur		
I-27	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan		
D	Pengadaan Listrik dan Gas	I-28	Ketenagalistrikan
		I-29	Pengadaan Gas dan Produksi Es

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	I-30	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
F	Konstruksi	I-31	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	I-32	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
		I-33	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
H	Transportasi dan Pergudangan	I-34	Angkutan Rel
		I-35	Angkutan Darat
		I-36	Angkutan Laut
		I-37	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
		I-38	Angkutan Udara
		I-39	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I-40	Penyediaan Akomodasi
		I-41	Penyediaan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi	I-42	Jasa Informasi dan Komunikasi
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	I-43	Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral
		I-44	Asuransi dan Dana Pensiun
		I-45	Jasa Keuangan Lainnya
		I-46	Jasa Penunjang Keuangan
L	Real Estate	I-47	Real Estate
MN	Jasa Perusahaan	I-48	Jasa Perusahaan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	I-49	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	Jasa Pendidikan	I-50	Jasa Pendidikan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	I-51	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
RSTU	Jasa Lainnya	I-52	Jasa Lainnya

LAMPIRAN 4**PERHITUNGAN ANALISIS LQ****PDRB Provinsi Bali Tahun 2018-2022 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)**

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21143.22	21338.8	21269.19	21479.55	20760.22	21198.2
B	Pertambangan dan Penggalian	1426.412	1363.738	1362.771	1423.738	1441.411	1403.614
C	Industri Pengolahan	10248.6	9702.493	9694.782	10359.04	9700.322	9941.047
D	Pengadaan Listrik dan Gas	311.4455	268.4326	282.8073	338.6392	323.9947	305.0639
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	322.2518	323.911	337.2615	338.9762	319.2849	328.3371
F	Konstruksi	16441.18	15843.03	15856.02	16305.01	15256.99	15940.44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14814.45	14013.36	14219.22	15297.79	14250.45	14519.05
H	Transportasi dan Pergudangan	8067.465	6637.036	8062.815	11872.27	11347.35	9197.387
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24423.82	21454.56	23902.89	32970.99	31391.18	26828.69
J	Informasi dan Komunikasi	12639.6	12713.89	12375.04	11657.32	10888.27	12054.82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6750.326	6244.501	6456.681	6759.77	6214.395	6485.135
L	Real Estate	7716.048	7541.094	7504.59	7468.383	7054.141	7456.851
M,N	Jasa Perusahaan	1824.128	1681.048	1736.624	1810.448	1730.609	1756.571
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8655.97	8979.741	8921.601	8955.575	8569.581	8816.494
P	Jasa Pendidikan	8988.411	8986.754	8916.706	8991.011	8574.398	8891.456
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4302.231	4266.102	4042.261	3930.788	3709.331	4050.143
R,S,T,U	Jasa lainnya	2745.881	2506.492	2557.685	2734.057	2540.735	2616.97
	PDB	150821.4	143865	147498.9	162693.4	154072.7	151790.3

PDB Indonesia Tahun 2018-2022 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1307253	1354399.1	1378398.9	1404190.9	1435853.3	1258375.7
B	Pertambangan dan Penggalian	796505	806206.2	790475.2	822099.5	858146.6	779678.4
C	Industri Pengolahan	2193368.4	2276667.8	2209920.3	2284821.7	2396603	2103466.1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	107108.6	111436.7	108826.4	114861.1	122451.9	101551.3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8429.4	9004.9	9449.3	9919.3	10240.1	7985.3
F	Konstruksi	1048082.8	1108425	1072334.8	1102517.7	1124725.2	987924.9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1376878.7	1440185.7	1385651.2	1449831.4	1529885.6	1311746.5
H	Transportasi dan Pergudangan	435336.5	463125.9	393418.9	406169.3	486874.9	406679.4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	315068.6	333304.6	299122.4	310748.6	347943.8	298129.7
J	Informasi dan Komunikasi	538762.7	589536.1	652062.9	696506.1	750389.2	503420.7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	415620.6	443093.1	457486.5	464637.7	473615	398971.4
L	Real Estate	299648.2	316901.1	324259.4	333282.9	339014.9	289568.5
M,N	Jasa Perusahaan	187691.1	206936.2	195671.1	197106.7	214399	172763.8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	349277.6	365538.8	365446	364251.4	373439.1	326514.3
P	Jasa Pendidikan	321133.8	341349.9	350272.8	350662.6	352716.2	304810.8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117322.2	127487.9	142227.3	157085.3	161384.9	109497.5
R,S,T,U	Jasa lainnya	185405.6	205011.4	196608.9	200773.2	219777.8	170174.8
	PDB	10002893	10498610	10331632.3	10669465.4	11197460.5	9531259.1

Perhitungan Analisis LQ

No	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.0727	1.1497	1.0808	1.0032	1.0508	1.0714
B	Pertambangan dan Penggalian	0.1188	0.1234	0.1208	0.1136	0.1221	0.1197
C	Industri Pengolahan	0.3099	0.3110	0.3073	0.2973	0.2942	0.3039
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.1929	0.1758	0.1820	0.1933	0.1923	0.1873
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.5355	2.6250	2.5000	2.2411	2.2660	2.4335
F	Konstruksi	1.0404	1.0431	1.0357	0.9699	0.9859	1.0150
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.7136	0.7101	0.7188	0.6920	0.6770	0.7023
H	Transportasi dan Pergudangan	1.2291	1.0458	1.4355	1.9169	1.6938	1.4642
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.1413	4.6974	5.5973	6.9582	6.5568	5.7902
J	Informasi dan Komunikasi	1.5560	1.5738	1.3293	1.0976	1.0545	1.3222
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.0772	1.0284	0.9886	0.9541	0.9536	1.0004
L	Real Estate	1.7078	1.7366	1.6211	1.4696	1.5122	1.6095
M,N	Jasa Perusahaan	0.6446	0.5928	0.6217	0.6024	0.5866	0.6096
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.6436	1.7927	1.7100	1.6124	1.6678	1.6853
P	Jasa Pendidikan	1.8563	1.9212	1.7831	1.6815	1.7667	1.8018
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.4321	2.4420	1.9908	1.6410	1.6704	2.0353
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.9822	0.8922	0.9112	0.8930	0.8402	0.9038
	PDB	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	



RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN DAMPAK PEMBANGUNAN BALI ERA BARU TERHADAP PEREKONOMIAN BALI

Pembangunan Bali dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali.

“Program Pembangunan Infrastruktur merupakan program pendukung untuk lima program prioritas Pembangunan Bali serta akselerasi perwujudan Visi dan Misi

Program Prioritas Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana mencakup **5 (lima) bidang prioritas** yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali, yaitu:

Bidang 1: Pangan, Sandang, dan Papan

Bidang 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Bidang 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Bidang 5 : Pariwisata

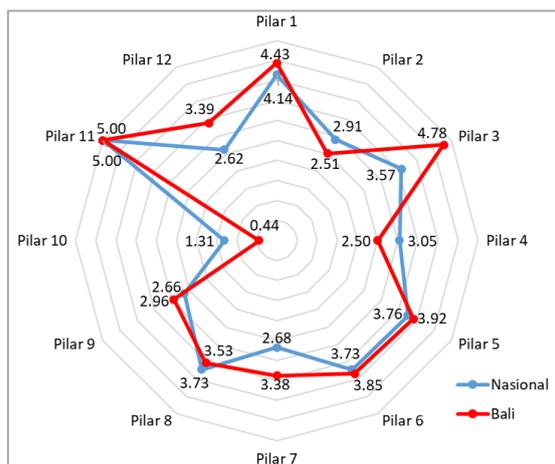
Pemerintah Provinsi Bali juga menyertakan **program pendukung, yaitu program Pembangunan infrastruktur** untuk mempercepat perwujudan Visi dan Misi serta disesuaikan dengan cakupan 5 (lima) bidang prioritas pembangunan Bali.

Pemerintah Provinsi Bali juga menyadari bahwa capaian infrastruktur memiliki peran penting dalam membentuk daya saing daerah. Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menunjukkan bahwa **IDSD Provinsi Bali (senilai 3,39) berada di atas IDS Nasional (senilai 3,26)**. Namun dari 12 pilar pembentuk IDSD, terdapat 4 (empat) pilar dimana skor IDSD Provinsi Bali berada di bawah skor IDS nasional, yaitu pilar infrastruktur dan pilar stabilitas ekonomi makro, pasar tenaga kerja, dan pilar ukuran pasar (Gambar 1).

“Nilai IDSD Provinsi Bali Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan IDS Nasional, namun nilai IDSD pada empat pilar masih lebih rendah (dari 12 pilar), dibandingkan nilai IDS nasional, salah

Salah satu tujuan dari kajian “Dampak Pembangunan Bali Era Baru Terhadap Perekonomian Bali” adalah **untuk menganalisis dampak pembangunan infrastruktur strategis dan monumental Bali Era Baru terhadap perekonomian Bali**. Metode yang

digunakan yaitu analisis input output. **Analisis input output** adalah sebuah analisis keseimbangan umum yang menyatakan hubungan antar-sektor dalam perekonomian. Penggunaan metode ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif. Pemilihan tabel transaksi domestik atas harga produsen dengan harapan untuk dapat mengetahui dan menganalisis perekonomian domestik (daerah) tanpa dipengaruhi oleh impor, serta untuk menganalisis margin perdagangan. Selanjutnya untuk melakukan *forecasting* (peramalan) terhadap beberapa indikator utama makro ekonomi digunakan **metode peramalan *time series-double exponential smoothing* serta dilengkapi *expert judgement***.

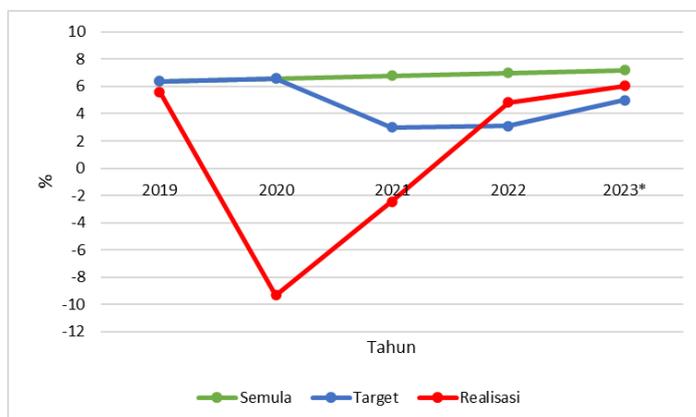


- Ket:
- Pilar 1: Institusi
 - Pilar 2: Infrastruktur
 - Pilar 3: Adopsi TIK
 - Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro
 - Pilar 5: Kesehatan
 - Pilar 6: Keterampilan
 - Pilar 7: Pasar produk
 - Pilar 8: Pasar tenaga kerja
 - Pilar 9: Sistem keuangan
 - Pilar 10: Ukuran pasar
 - Pilar 11: Dinamisme bisnis
 - Pilar 12: Kapabilitas inovasi

Gambar 1. Skor 12 Pilar Pembentuk Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2022

Gambaran Umum Beberapa Indikator Utama Makro Ekonomi Bali

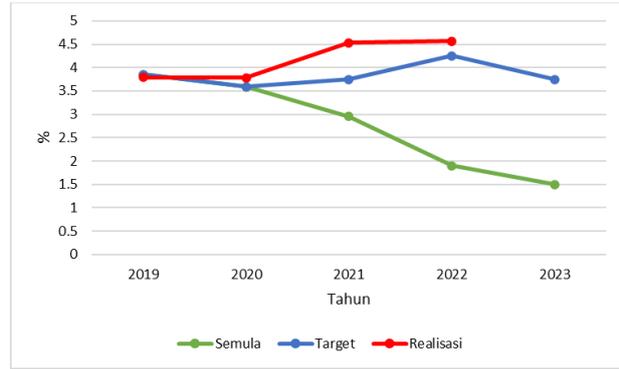
Berdasarkan **Surat Edaran Bersama (SEB)** Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang **Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2020-2024** perencanaan pembangunan daerah dirancang untuk menyasar **beberapa indikator makro daerah**, yaitu: laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan rasio gini. Target sasaran indikator makro ekonomi Bali telah diatur dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta dilakukan penyesuaian akibat pandemi Covid-19.



“Tahun 2019 realisasi pertumbuhan ekonomi Bali tidak mencapai target, dan semakin parah di tahun 2020. Setelah target disesuaikan dan kondisi ekonomi mulai pulih, perlahan disparitas antara target dan realisasi mulai menyempit, bahkan mampu melampaui target di tahun 2022 dan 2023”

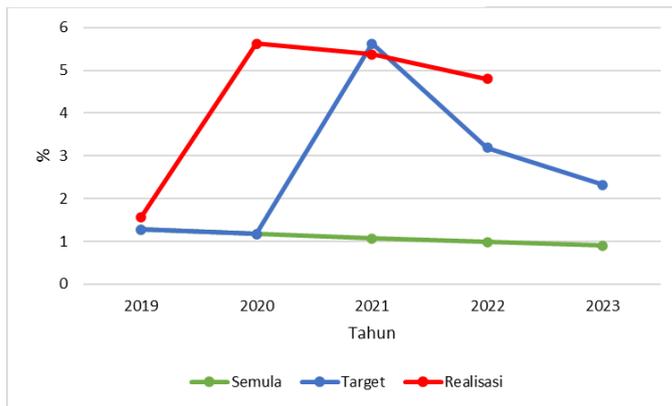
Gambar 2. Target RPJMD dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali

“Target persentase kemiskinan telah dikoreksi (dinaikkan), namun hingga tahun 2022, target tersebut belum dapat tercapai”



Gambar 3.

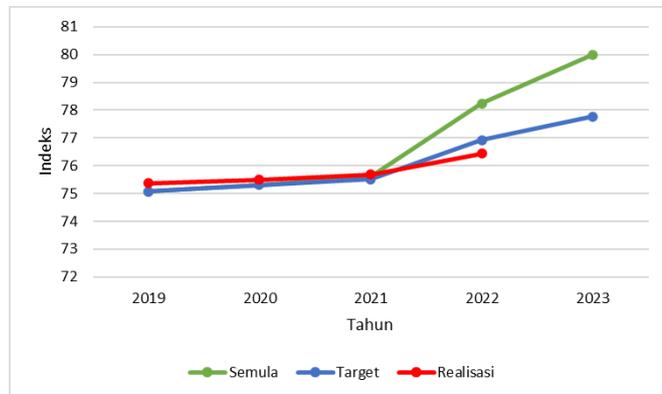
Target RPJMD dan Capaian Indikator Persentase Kemiskinan Bali



“Tahun 2020 terjadi disparitas yang tinggi antara target dan realisasi TPT, karena angka TPT melonjak sangat tinggi. Namun pada tahun 2021, target yang telah direvisi mampu dicapai. Hal itu sebagai respon atas keberhasilan upaya recovery,”

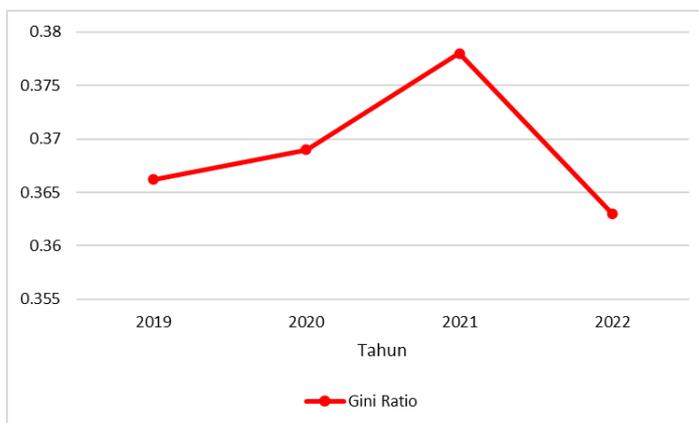
Gambar 4. Target RPJMD dan Capaian Indikator TPT Bali

“Tahun 2019, IPM Provinsi Bali masih di atas target, namun pada masa recovery, meskipun target telah disesuaikan, namun realisasinya belum dapat tercapai”



Gambar 5.

Target RPJMD dan Capaian Indikator IPM Bali



“Ketimpangan distribusi pendapatan di Bali meningkat sejak tahun 2019, dan semakin parah di 2021. Namun kemudian mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2022”

Gambar 6. Capaian Indikator Gini Ratio Bali

Pembangunan Infrastruktur Bali Dalam Kerangka Model Input-Output Bali

Pembangunan infrastruktur Bali yang dimaksud pada kajian ini meliputi beberapa proyek **infrastruktur strategis dan monumental Bali** (Tabel 1). Data besarnya nilai investasi proyek infrastruktur Bali berasal dari instansi terkait, dan apabila data tidak tersedia maka diestimasi atau menggunakan sumber dari berbagai informasi yang dapat diakses secara online.

Tabel 1. Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Besarnya Biaya Pembangunan di Bali

No	Jenis Proyek Infrastruktur		Nilai Investasi (Milyar Rp)	Lokasi	Kuantitas	Satuan	
1	Pembangunan Infrastruktur Agama dan Kebudayaan	1.1	Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih	900	Kab. Karangasem	6800	Ha
		1.2	Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB)	2,500	Kab. Klungkung	334	Ha
2	Pembangunan Sarana Transportasi	2.1	Pembangunan Ruas Jalan <i>Shortcut</i> Singaraja-Mengwitani	968.26	Kab. Buleleng – Kab. Badung	12,79	km
		2.2	Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung	560			
			-Pelabuhan Sanur		Kota Denpasar	7400	m ²
			-Pelabuhan Sampalan		Kab. Klungkung	9000	m ²
			-Pelabuhan Bias Munjul		Kab. Klungkung	4920	m ²
		2.3	Pengembangan Pelabuhan Benoa Menjadi <i>Bali Maritime Tourism Hub</i> , Denpasar	6,100	Kota Denpasar	128	Ha
		2.4	Tol Jagat Kerthi Bali	24.6	Kab. Badung – Kab. Jembrana	96,84	km
		3	Pembangunan Fasilitas Olahraga	3.1	Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan 4 Lapangan Usaha	171	Kab. Gianyar

No	Jenis Proyek Infrastruktur			Nilai Investasi (Milyar Rp)	Lokasi	Kuantitas	Satuan
4	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	4.1	Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C	167	Kab. Gianyar	19308	m2
5	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai	5.1	Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali	363	Kab. Klungkung	230,92	km2
6	Penyediaan Air Baku	6.1	Pembangunan Bendungan Untuk Penyediaan Air Bersih				
			-Bendungan Sidan	1,735	Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Bangli	82,7	Ha
			-Bendungan Tamblang	793.8	Kab. Buleleng	79	Ha
7	Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.1	Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0	500	Kab. Buleleng	115	M
			Jumlah	14,782.66			

Dalam kerangka **analisis model input-output berdasarkan tabel input-output Bali**, investasi proyek infrastruktur daerah akan dihitung sebagai investasi. Dimana investasi didefinisikan sebagai tambahan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sedang proyek infrastruktur dihitung dalam sektor konstruksi.

Investasi dalam tabel input-output didefinisikan sebagai penjumlahan antara Pembentukan Model Tetap Bruto (PMTB) dengan perubahan inventori. PMTB adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru. Barang modal, baik itu yang berasal dari luar negeri maupun dari luar daerah dalam keadaan baru maupun bekas tetap diperlukan sebagai barang modal baru. Pergantian baru disini adalah baru beredar dalam perekonomian di daerah atau negara. PMTB meliputi (BPS Provinsi Bali, 2016, hal. 38-39):

- Barang modal baru dalam bentuk konstruksi, mesin-mesin, alat angkutan, dan perlengkapan, yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.
- Biaya untuk perubahan dan perbaikan berat barang-barang modal yang akan meningkatkan produktivitas atau memperpanjang umur pemakaian.
- Pengeluaran untuk pengembangan dan pembukaan tanah, perluasan area hutan dan daerah pertambangan, serta penanaman dan peremajaan tanaman keras.
- Pembelian ternak produktif untuk keperluan pembiakan, pemerahan susu, pengangkutan, dan sebagainya, tidak termasuk ternak untuk dipotong.
- Margin perdagangan dan ongkos-ongkos lain yang berkenaan dengan transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak penguasaan hutan, hak paten, hak cipta, dan barang-barang modal bekas.

Sektor konstruksi mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prefabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini mencakup konstruksi bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakan sebagian atau seluruhnya.

Kinerja pembangunan ekonomi dalam kerangka analisis model input output Bali didefinisikan sebagai perubahan (meningkat/menurun) terhadap **output, Nilai Tambah Bruto (NTB), dan pendapatan.**

Output didefinisikan sebagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksi yang ada di wilayah tersebut, sehingga seringkali dikatakan sebagai output domestik atau produk domestik. Secara umum output dihitung berdasarkan perkalian antara volume barang dan jasa yang dihasilkan dengan harga per-satuan atau tarif, misalnya output sektor bangunan adalah seluruh nilai proyek yang telah dikerjakan selama periode waktu perhitungan, tanpa memperhatikan apakah proyek itu sudah selesai dalam periode perhitungan.

Nilai Tambah Bruto (NTB) terdiri dari komponen: (a) upah dan gaji; (b) surplus usaha yang merupakan gabungan dari keuntungan, sewa tanah dan pembayaran bunga modal netto (termasuk juga pembayaran deviden); (c) penyusutan; (d) pajak tidak langsung; dan (e) subsidi atas barang dan jasa.

Analisis ke Belakang (*Backward Linkage*) dan ke Depan (*Forward Linkage*)

Keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) atau disebut juga **daya penyebaran** menunjukkan besarnya output domestik yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan 1 unit permintaan akhir dari suatu sektor tertentu. Semakin tinggi keterkaitan kebelakang suatu sektor berarti semakin tinggi kemampuan sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi indeks daya penyebaran (IBLj) suatu sektor ekonomi akan semakin besar pula pengaruh sektor tersebut terhadap pertumbuhan sektor-sektor lainnya, yang berarti pula bahwa keterkaitan/ketergantungan sektor tersebut terhadap sektor lainnya cukup besar.

Keterkaitan antar-sektor juga dapat dilihat dari besarnya output yang dihasilkan oleh suatu sektor sebagai akibat dari peningkatan permintaan akhir seluruh sektor ekonomi. Keterkaitan antar-sektor ini disebut dengan **keterkaitan ke depan (*forward linkage*)** atau **derajat kepekaan** suatu sektor. Indeks derajat kepekaan (IFLj) merupakan ukuran total dampak terhadap output suatu sektor akibat penggunaan output sektor tersebut oleh sektor lainnya sebagai input. Semakin tinggi nilai indeks derajat berarti semakin tinggi pula daya kepekaan sektor tersebut karena pertumbuhan sektor-sektor lain yang menggunakan sektor tersebut untuk proses produksinya.

Hubungan kait mengkait antar-sektor dapat ditelaah melalui nilai IBLj dan IFLi. Kaidah umum untuk menentukan sektor kunci dalam perekonomian adalah dengan mensyaratkan nilai IBLj dan IFLi harus lebih besar daripada 1, dan nilai IFLi harus lebih besar daripada nilai IBLj.

Berdasarkan Tabel IO Provinsi Bali, maka dapat dipetakan posisi masing-masing sektor industri (berdasarkan 52 sektor industri) ke dalam kuadran tersebut diharapkan bisa menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Kuadran II (Indeks FL>1 dan Indeks BL<1)	Kuadran I (Indeks FL>1 dan Indeks BL>1)
I-01 Pertanian Tanaman Pangan I-04 Peternakan I-11 Pertambangan dan Penggalian Lainnya I-32 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya I-35 Angkutan Darat I-43 Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	I-17 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dsj I-28 Ketenagalistrikan I-33 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor I-38 Angkatan Udara I-40 Penyediaan Akomodasi I-41 Penyediaan Makan Minum I-42 Jasa Informasi dan Komunikasi I-47 Real Estate I-48 Jasa Perusahaan I-52 Jasa Lainnya
I-02 Pertanian Tanaman Holtikultura, Semusim, Holtikultura Tahunan, dan Lainnya I-03 Perkebunan Semusim dan Tahunan I-05 Jasa Pertanian dan Perburuan I-06 Kehutanan dan Penebangan Kayu I-07 Perikanan I-08 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi I-09 Pertambangan Batubara dan Lignit I-10 Pertambangan Bijih Logam I-12 Industri Batubara dan Pengilangan Migas I-14 Industri Pengolahan Tembakau I-18 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman I-20 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik I-22 Industri Logam Dasar I-23 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik I-24 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL I-34 Angkutan Rel I-44 Asuransi dan Dana Pensiun I-46 Jasa Penunjang Keuangan I-50 Jasa Pendidikan I-51 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	I-13 Industri Makanan dan Minuman I-15 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi I-16 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki I-19 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional I-21 Industri Barang Galan Bukan Logam I-25 Industri Alat Angkutan I-26 Industri Furnitur I-27 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan I-29 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang I-31 Konstruksi I-36 Angkutan Laut I-37 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan I-39 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos, dan Kurir I-45 Jasa Keuangan Lainnya I-49 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Kuadran III (Indeks FL<1 dan Indeks BL<1)	Kuadran IV (Indeks FL<1 dan Indeks BL>1)

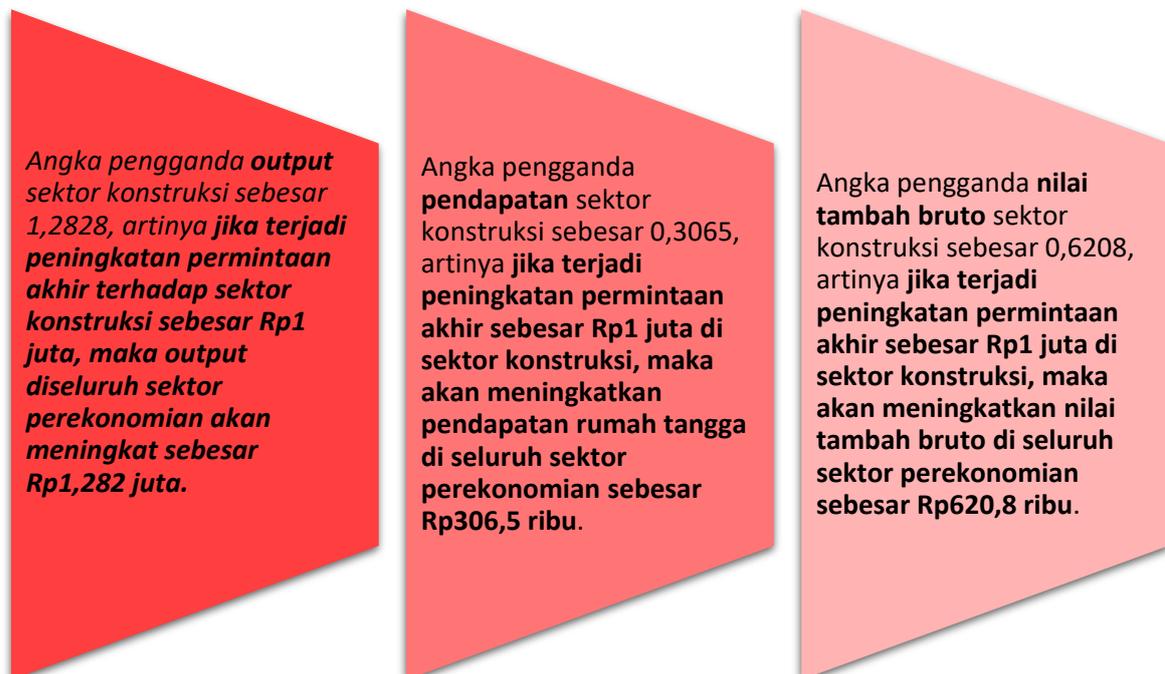
Gambar 7. Identifikasi Industri Unggulan Provinsi Bali Berdasarkan Tabel IO

“Gambar 7 menunjukkan bahwa terdapat 10 Industri yang termasuk ke dalam kuadran I. Ke-10 Industri pada kuadran I itu memiliki keterkaitan ke depan (forward Linkage) dan keterkaitan ke belakang (backward linkage) yang tinggi. Selanjutnya ada 6 industri yang termasuk ke dalam kuadran II, 20 Industri dalam kuadran III dan 16 Industri

Angka Pengganda (*Multiplier*) Sektor Konstruksi di Bali

Pengganda atau *multiplier* digunakan untuk menangkap dampak langsung dan tidak langsung atas perubahan output dikarenakan adanya perubahan permintaan akhir. Dalam kajian ini digunakan pengaruh total yang meliputi pengaruh peningkatan output dari sektor-sektor ekonomi yang merupakan penyusun input langsung dari sektor bersangkutan (pengaruh langsung) dan pengaruh peningkatan output dari sektor ekonomi yang lain (pengaruh tidak langsung).

Angka pengganda Pembangunan infrastruktur pada Tabel I-O Provinsi Bali, ditunjukkan oleh sektor konstruksi (kode sektor 31), dimana secara lebih jelas diketahui bahwa:



Dampak Pembangunan Total Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bali

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat laju pertumbuhan PDRB. PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian. Pada dasarnya Nilai Tambah Bruto (NTB) (kode sektor 2090) dalam tabel input output adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah sektoral dengan pajak penjualan impor dan bea masuk, sehingga perhitungannya ada beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dalam tabel input output besarnya PDRB menurut lapangan usaha ditunjukkan oleh Nilai Tambah Bruto (NTB).

Tabel 2. Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bali pada 10 Sektor Utama (Berdasarkan Klasifikasi 52 Sektor Industri)

No	Kode	Uraian Sektor	Total Infrastruktur			
			Sebelum ada Investasi (Milyar Rp)	Setelah ada Investasi (Milyar Rp)	Selisih	Pertumbuhan (%)
1	40	Penyediaan Akomodasi	26,989.29	27,023.88	34.59	0.13
2	31	Konstruksi	16,128.28	31,218.12	15,089.84	93.56
3	41	Penyediaan Makan Minum	15,760.62	15,813.39	52.77	0.33
4	33	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	14,333.35	14,426.92	93.57	0.65
5	38	Angkutan Udara	11,515.77	11,558.94	43.17	0.37
6	47	Real Estate	10,986.57	12,201.26	1,214.69	11.06
7	42	Jasa Informasi dan Komunikasi	9,959.17	10,004.55	45.38	0.46
8	43	Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral	8,363.51	8,549.92	186.41	2.23
9	50	Jasa Pendidikan	8,193.06	8,284.72	91.65	1.12
10	52	Jasa Lainnya	7,455.17	7,576.83	121.66	1.63
		Sub Total	129,684.78	146,658.53	16,973.75	
		Lainnya	63,141.73	64,886.77	1,745.09	
		Jumlah Total	192,826.51	211,545.30	18,718.84	9.71
		Rata-rata Pertumbuhan Sektor				19.05

Dampak pembangunan infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru terhadap pertumbuhan ekonomi Bali dapat dilihat pada Tabel 2. Dengan rencana investasi yang nilainya merupakan total nilai proyek Pembangunan infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru, yaitu sebesar Rp14.782,66 Milyar, akan menghasilkan tambahan PDRB sebesar Rp18.718,84 Milyar atau dengan kata lain PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 9,71% dari kondisi tidak ada investasi. Sektor ekonomi yang merasakan dampak kenaikan terbesar yaitu sektor konstruksi mengalami kenaikan sebesar 93,56%, diikuti oleh sektor real estate sebesar (11,06%). Rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi sebesar 19,05% dari kondisi awal tidak ada investasi.

“Dengan investasi infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru, akan menghasilkan tambahan PDRB sebesar Rp18,7 Triliun, atau dengan kata lain PDRB Bali akan mengalami kenaikan sebesar 9,71% dari kondisi tidak ada ...”

Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perekonomian Bali

Dampak Pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian ditunjukkan oleh tambahan NTB (PDRB), dan peningkatan jumlah output perekonomian. Dampak Pembangunan infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru terhadap perekonomian Bali dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Dampak Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru Terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB)

Jenis Proyek Infrastruktur			Nilai Investasi (Milyar Rp)	Tambahan NTB (Milyar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (% Perubahan)
Pembangunan Infrastruktur Agama dan Kebudayaan	1.1	Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih	900.00	1,139.64	0.59
	1.2	Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB)	2,500.00	3,165.68	1.64
Pembangunan Sarana Transportasi	2.1	Pembangunan Ruas Jalan <i>Shortcut</i> Singaraja-Mengwitani	968.26	1,226.08	0.64
	2.2	Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung	560.00	709.11	0.37
	2.3	Pengembangan Pelabuhan Benoa Menjadi <i>Bali Maritime Tourism Hub</i> , Denpasar	6,100.00	7,724.25	4.01
	2.4	Tol Jagat Kerthi Bali	24.60	31.15	0.02
Pembangunan Fasilitas Olahraga	3.1	Pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar dan 4 Lapangan Usaha	171.00	216.53	0.11
Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	4.1	Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C	167.00	211.47	0.11
Pembangunan Pengendali Banjir Sungai	5.1	Pembangunan Sungai Buatan (Normalisasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali	363.00	459.66	0.24
Penyediaan Air Baku	6.1	Pembangunan Bendungan Untuk Penyediaan Air Bersih		-	0.00
		-Bendungan Sidan	1,735.00	2,196.98	1.14
		-Bendungan Tamblang	793.80	1,005.17	0.52
Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.1	Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0	500.00	633.14	0.33
Jumlah			14,782.66	18,718.84	9.71

Tabel 3 memberi penjelasan tentang dampak Pembangunan infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru terhadap perekonomian Bali. Dengan rencana investasi sebesar **Rp14.782,66 Milyar** yang diinvestasikan pada 12 jenis proyek infrastruktur akan berdampak **meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,71%** dari kondisi tidak ada investasi tersebut.

“Kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) sebesar 4,01%, Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali sebesar 1,64%, dan Pembangunan Bendungan ...”

Forecasting/Peramalan Perekonomian Bali Setelah Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Monumental Penanda Bali Era Baru

Berbagai proyek pembangunan infrastruktur strategis dan monumental Bali Era Baru telah mulai dikerjakan, dimana beberapa proyek telah selesai, dan sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Sehingga nilai proyek tersebut telah diperhitungkan dalam PDRB Bali. Dalam proses *forecasting* ini tidak dilakukan penambahan kembali nilai proyek karena akan menyebabkan *double accounting*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *forecasting* menggunakan metode peramalan *time series-double exponential smoothing* dengan *tools* minitab. Adapun *forecast* dengan *double exponential smoothing* dilakukan dengan rumus:

$$S_{t+m} = a_t + b_{tm}$$

m = jangka waktu *forecast* ke depan

$$a_t = 2S'_t - S''_t$$

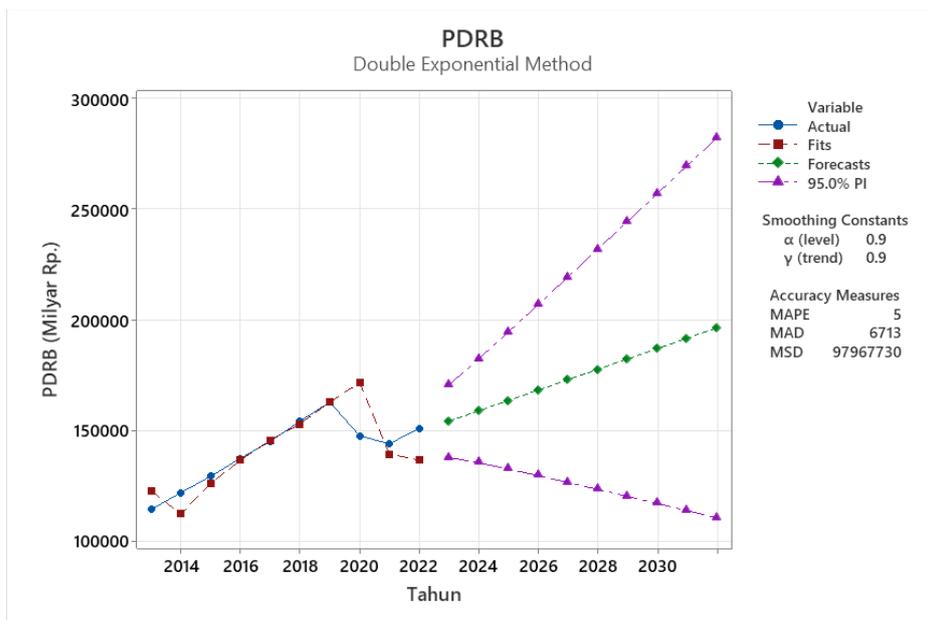
$$b_t = \frac{\alpha}{1 - \alpha} (S'_t - S''_t)$$

Peramalan PDRB Provinsi Bali

Data dasar untuk peramalan PDRB Provinsi Bali menggunakan PDRB selama 10 tahun (tahun 2013 s.d. 2022), dan peramalan dilakukan untuk waktu 10 tahun ke depan, dengan tiga skenario, yaitu *forecast*, *optimis*, dan *pesimis*. Adapun hasil peramalan disajikan pada Tabel 4 dan Gambar 8.

Tabel 4. Aktual dan Peramalan PDRB Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

PDRB Aktual (Milyar Rp)			PDRB Forecasting (Milyar Rp)				
Periode	Tahun	PDRB	Periode	Tahun	PDRB		
					Forecast	Optimis	Pesimis
1	2013	114,104	11	2023	154,085	170,533	137,637
2	2014	121,788	12	2024	158,781	182,303	135,260
3	2015	129,127	13	2025	163,478	194,514	132,442
4	2016	137,296	14	2026	168,174	206,910	129,438
5	2017	144,933	15	2027	172,870	219,399	126,342
6	2018	154,073	16	2028	177,567	231,941	123,192
7	2019	162,693	17	2029	182,263	244,516	120,010
8	2020	147,499	18	2030	186,959	257,114	116,805
9	2021	143,865	19	2031	191,656	269,726	113,585
10	2022	150,821	20	2032	196,352	282,350	110,354



Gambar 7. Grafik Aktual dan Peramalan PDRB Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

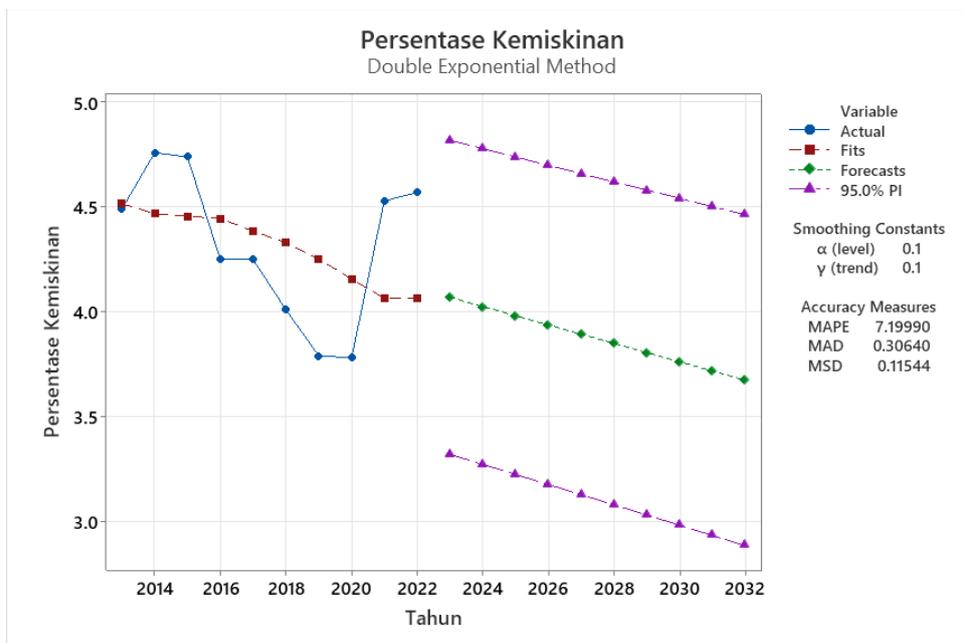
Hasil *forecast* PDRB Bali sebagaimana pada Tabel 4 maupun Gambar 7 menunjukkan bahwa PDRB Bali akan mengalami peningkatan. Peramalan ini juga telah dilakukan uji coba pada beberapa taraf α (yaitu 0,1; 0,5; dan 0,9) dimana hasil terbaik ditunjukkan pada $\alpha = 0,9$. Nilai MAPE pada Gambar 7 sebesar 5% (<10%) menunjukkan bahwa metode pendugaan mempunyai kemampuan peramalan yang sangat baik.

Peramalan Kemiskinan di Provinsi Bali

Data dasar untuk peramalan kemiskinan Provinsi Bali menggunakan persentase kemiskinan selama 10 tahun (tahun 2013 s.d. 2022), dan peramalan dilakukan untuk waktu 10 tahun ke depan, dengan tiga skenario, yaitu *forecast*, *optimis*, dan *pesimis*. Adapun hasil peramalan disajikan pada Tabel 5 dan Gambar 8.

Tabel 5. Aktual dan Peramalan Persentase Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

Persentase Kemiskinan Aktual			Persentase Kemiskinan <i>Forecasting</i>				
Periode	Tahun	% Kemiskinan	Periode	Tahun	% Kemiskinan		
					<i>Forecast</i>	<i>Optimis</i>	<i>Pesimis</i>
1	2013	4.49	11	2023	4.07	3.32	4.82
2	2014	4.76	12	2024	4.03	3.27	4.78
3	2015	4.74	13	2025	3.98	3.22	4.74
4	2016	4.25	14	2026	3.94	3.17	4.70
5	2017	4.25	15	2027	3.89	3.13	4.66
6	2018	4.01	16	2028	3.85	3.08	4.62
7	2019	3.79	17	2029	3.81	3.03	4.58
8	2020	3.78	18	2030	3.76	2.98	4.54
9	2021	4.53	19	2031	3.72	2.93	4.50
10	2022	4.57	20	2032	3.67	2.88	4.46



Gambar 8. Grafik Aktual dan Peramalan Persentase Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

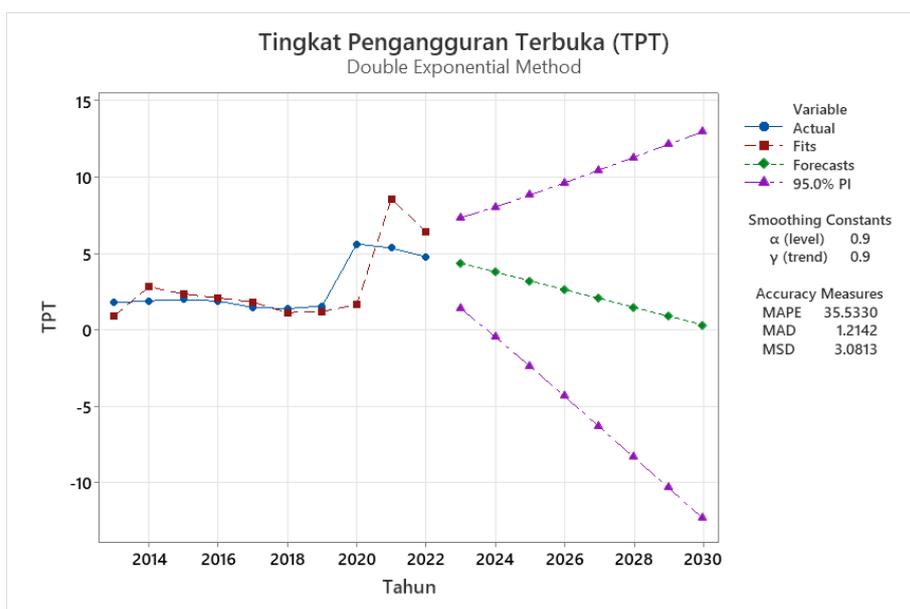
Hasil *forecast* persentase kemiskinan Bali sebagaimana pada Tabel 5 maupun Gambar 8 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan Bali cenderung menurun. Peramalan ini juga menggunakan taraf $\alpha = 0,1$, dimana memberikan nilai MAPE pada Gambar 7 sebesar 7,19% (<10%) menunjukkan bahwa metode pendugaan mempunyai kemampuan peramalan yang sangat baik.

Peramalan Pengangguran di Provinsi Bali

Data dasar untuk peramalan pengangguran Provinsi Bali menggunakan TPT selama 10 tahun (tahun 2013 s.d. 2022), dan peramalan dilakukan untuk waktu 8 tahun ke depan, dengan tiga skenario, yaitu *forecast*, optimis, dan pesimis. Adapun hasil peramalan disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 9.

Tabel 6. Aktual dan Peramalan TPT Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2030

TPT Aktual			TPT Forecasting				
Periode	Tahun	% TPT	Periode	Tahun	% TPT		
					Forecast	Optimis	Pesimis
1	2013	1.79	11	2023	4.38	1.41	7.36
2	2014	1.9	12	2024	3.80	-	8.06
3	2015	1.99	13	2025	3.22	-	8.84
4	2016	1.89	14	2026	2.65	-	9.65
5	2017	1.48	15	2027	2.07	-	10.48
6	2018	1.4	16	2028	1.49	-	11.32
7	2019	1.57	17	2029	0.91	-	12.17
8	2020	5.63	18	2030	0.33	-	13.01
9	2021	5.37					
10	2022	4.8					



Gambar 9. Grafik Aktual dan Peramalan TPT Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2030

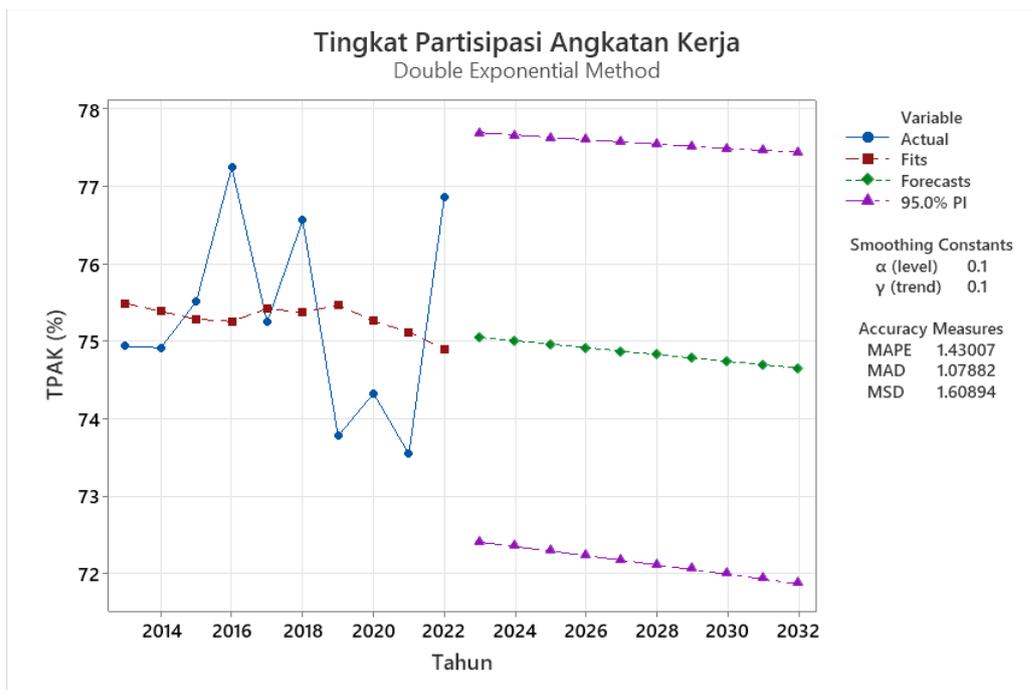
Forecast dilakukan hanya 8 (delapan) tahun karena setelahnya *forecast* cenderung negatif. Hasil *forecast* TPT Bali sebagaimana pada Tabel 6 maupun Gambar 9 menunjukkan bahwa TPT Bali diramalkan menurun. Peramalan ini juga telah dilakukan uji coba pada beberapa taraf α (yaitu 0,1; 0,5; dan 0,9) dimana hasil terbaik ditunjukkan pada $\alpha = 0,9$. Nilai MAPE pada Gambar 9 sebesar 35% ($20\% < \text{MAPE} < 50\%$) menunjukkan bahwa metode pendugaan mempunyai kemampuan peramalan yang masih layak.

Peramalan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Bali

Data dasar untuk peramalan TPAK Provinsi Bali menggunakan TPAK selama 10 tahun (tahun 2013 s.d. 2022), dan peramalan dilakukan untuk waktu 10 tahun ke depan, dengan tiga skenario, yaitu *forecast*, optimis, dan pesimis. Adapun hasil peramalan disajikan pada Tabel 7 dan Gambar 10.

Tabel 7. Aktual dan Peramalan TPAK Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

TPAK Aktual			TPAK Forecasting				
Periode	Tahun	% TPAK	Periode	Tahun	% TPAK		
					Forecast	Optimis	Pesimis
1	2013	74.93	11	2023	75.04	77.69	72.40
2	2014	74.91	12	2024	75.00	77.66	72.34
3	2015	75.51	13	2025	74.96	77.63	72.29
4	2016	77.24	14	2026	74.91	77.60	72.23
5	2017	75.24	15	2027	74.87	77.57	72.17
6	2018	76.56	16	2028	74.82	77.54	72.11
7	2019	73.77	17	2029	74.78	77.51	72.05
8	2020	74.32	18	2030	74.74	77.49	71.99
9	2021	73.54	19	2031	74.69	77.46	71.92
10	2022	76.86	20	2032	74.65	77.43	71.86



Gambar 10. Grafik Aktual dan Peramalan TPAK Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

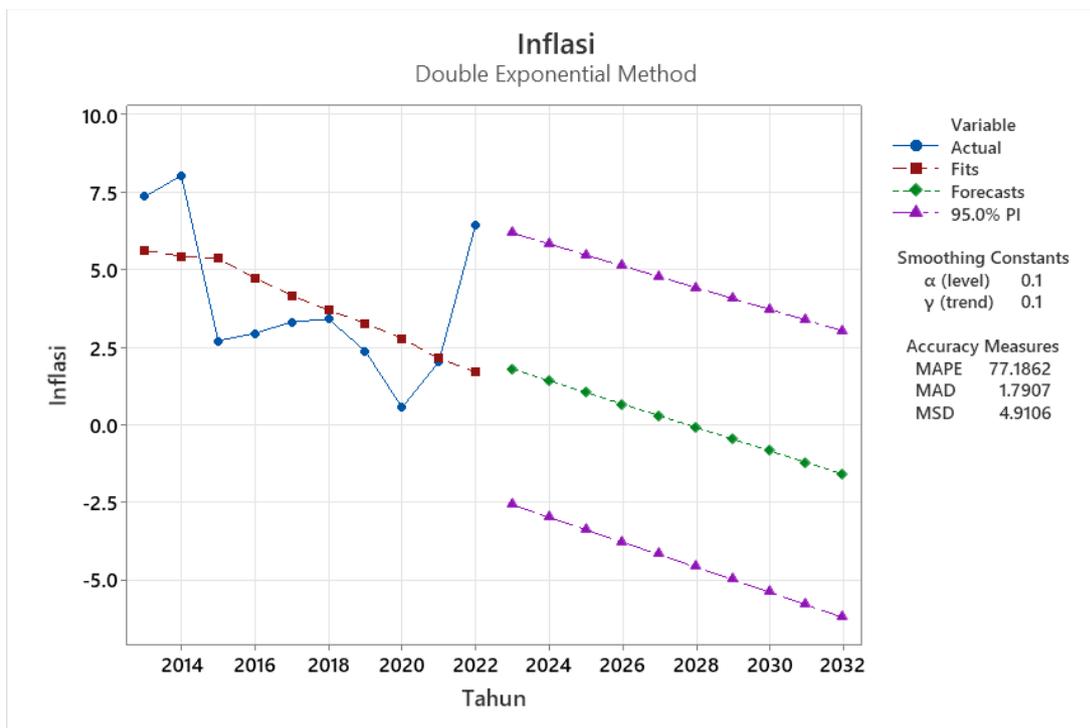
Hasil *forecast* TPAK Bali sebagaimana pada Tabel 7 maupun Gambar 10 menunjukkan bahwa TPAK Bali diramalkan menurun. Peramalan ini juga telah dilakukan uji coba pada beberapa taraf α (yaitu 0,1; 0,5; dan 0,9) dimana hasil terbaik ditunjukkan pada $\alpha = 0,1$. Nilai MAPE pada Gambar 10 sebesar 1,43% (<10%) menunjukkan bahwa metode pendugaan mempunyai kemampuan peramalan yang sangat baik.

Peramalan Inflasi di Provinsi Bali

Data dasar untuk peramalan inflasi Provinsi Bali menggunakan data inflasi selama 10 tahun (tahun 2013 s.d. 2022), yaitu inflasi Kota Denpasar, dan peramalan dilakukan untuk waktu 10 tahun ke depan, dengan tiga skenario, yaitu *forecast*, optimis, dan pesimis. Adapun hasil peramalan disajikan pada Tabel 8 dan Gambar 11.

Tabel 8. Aktual dan Peramalan Inflasi Provinsi Bali (Kota Denpasar) Tahun 2013 s.d. 2032

Inflasi Aktual			Inflasi Forecasting				
Periode	Tahun	% Inflasi	Periode	Tahun	% Inflasi		
					Forecast	Optimis	Pesimis
1	2013	7.35	11	2023	1.79	-	6.18
2	2014	8.03	12	2024	1.41	-	5.82
3	2015	2.7	13	2025	1.04	-	5.47
4	2016	2.94	14	2026	0.66	-	5.12
5	2017	3.31	15	2027	0.28	-	4.76
6	2018	3.4	16	2028	-	-	4.41
7	2019	2.37	17	2029	-	-	4.06
8	2020	0.55	18	2030	-	-	3.71
9	2021	2.01	19	2031	-	-	3.36
10	2022	6.44	20	2032	-	-	3.02



Gambar 11. Grafik Aktual dan Peramalan Inflasi Provinsi Bali Tahun 2013 s.d. 2032

Hasil *forecast* inflasi Bali sebagaimana pada Tabel 8 maupun Gambar 11 menunjukkan bahwa inflasi Bali diramalkan menurun. Peramalan ini juga telah dilakukan uji coba pada beberapa taraf α (yaitu 0,1; 0,5; dan 0,9) dimana hasil terbaik ditunjukkan pada $\alpha = 0,1$. Nilai MAPE pada Gambar 11 sebesar 77% (>50%) menunjukkan bahwa metode pendugaan mempunyai kemampuan kurang baik.

General Conclusion dan Implikasi

Pemerintah Provinsi Bali sangat tepat melakukan pembangunan berbagai proyek infrastruktur, terutama infrastruktur strategis dan monumental sebagai penanda Bali Era Baru. Apalagi infrastruktur Bali juga perlu diprioritaskan untuk meningkatkan daya saing daerah. Ditinjau dari beberapa capaian indikator makro ekonomi Bali, diketahui bahwa capaian ekonomi Bali masih belum mencapai target.

Terdapat 12 infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, dengan total senilai Rp14,7 Triliun. Dengan investasi infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era Baru, akan menghasilkan tambahan PDRB sebesar Rp18,7 Triliun, atau dengan kata lain PDRB Bali akan mengalami kenaikan sebesar 9,71% dari kondisi tidak ada investasi. Kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) sebesar 4,01%, Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali sebesar 1,64%, dan Pembangunan Bendungan Sidan sebesar 1,14%.

Forecasting/peramalan atas beberapa indikator makro ekonomi Bali kedepannya menunjukkan sinyal positif. Diantaranya adalah penurunan persentase kemiskinan,

tingkat pengangguran terbuka, TPAK, dan inflasi. Forecasting dengan data saat ini yang tentunya juga merupakan dampak dari adanya Pembangunan berbagai infrastruktur strategis dan monumental penanda Bali Era baru. Sehingga **pembangunan infrastruktur secara analisis statistik terbukti memberikan dampak positif bagi perekonomian Bali.**

ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវស្រាវ

*Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Menuju Bali Era Baru*